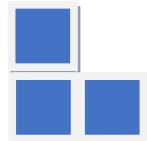




**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2018**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MUARA SABAK, Maret 2019



KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim, Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah, kita semua telah dapat menjalankan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018. Selama itu pula kami bersama DPRD dan segenap OPD serta komponen yang terkait telah dapat melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung yang sama-sama kita cintai ini. Tentu belum banyak prestasi yang ditoreh, namun kebijakan dan “road map” yang disusun sudah berada di jalur yang tepat, sehingga kita tetap optimis, sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021, Insya Allah akan tercapai.

Memenuhi amanat ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, serta memenuhi komitmen akuntabilitas satu tahun masa jabatan selaku Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2016-2021, maka dengan ini disampaikan dokumen mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan pemerintahan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan sebuah keberhasilan bersama dari seluruh perangkat daerah dan masyarakat, dibawah koordinasi dan arahan Kepala Daerah.

Semoga dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini, akan semakin memberikan informasi yang lebih obyektif terhadap seluruh upaya perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok yang didukung DPRD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Timur. Prestasi kinerja yang diperoleh tidak lepas dari perkenan dan hidayah Allah SWT yang senantiasa memberikan bimbingan-Nya kepada masyarakat dan para penyelenggara pemerintahan daerah. Sebaliknya kinerja program pembangunan daerah yang belum terealisasi secara optimal, dipengaruhi oleh faktor internal di pemerintah disamping tentunya faktor eksternal yang diluar kendali pemerintah daerah.

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta para pihak dan masyarakat yang telah turut serta memajukan pantai timur Jambi Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung ini.

Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO,SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Maksud Dan Tujuan	I-3
1.4. Gambaran Umum Daerah.....	I-3
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah.....	I-3
1.4.2. Kondisi Demografis.....	I-6
1.4.3. Kondisi Ekonomi.....	I-6
1.4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	I-7
1.4.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	I-8
1.4.3.3. Struktur Ekonomi	I-9
1.4.3.4. PDRB per kapita	I-10
1.4.3.5. Indeks Gini (Gini Ratio)	I-12
1.4.3.6. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	I-12
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	II-1
2.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	II-2
2.2. Prioritas Dan Pembangunan Tahun 2017	II-8
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan.....	III-2
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan.....	III-3
3.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah	III-4
3.1.2.2. Pendapatan Dana Perimbangan	III-7
3.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	III-9
3.1.2.4. Pembiayaan	III-10
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah.....	III-12
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah.....	III-12
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja	III-12
3.2.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung	III-13
3.2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung	III-15
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Dinas Pendidikan	IV-1
4.2. Dinas Kesehatan.....	IV-8
4.3. RSUD Nurdin Hamzah	IV-17
4.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-22
4.5. Dinas Perumahan dan Permukiman.....	IV-26
4.6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	IV-29
4.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-38
4.8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IV-42
4.9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-46
4.10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	IV-50
4.11. Dinas Ketahanan Pangan	IV-56
4.12. Dinas Lingkungan Hidup	IV-62

4.13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-67
4.14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	IV-71
4.15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-73
4.16. Dinas Perhubungan	IV-78
4.17. Dinas Komunikasi dan Informatika	IV-81
4.18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	IV-85
4.19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	IV-90
4.20. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga	IV-99
4.21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	IV-106
4.22. Dinas Perikanan.....	IV-109
4.23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	IV-113
4.24. Dinas Perkebunan dan Peternakan.....	IV-119
4.25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	IV-127
4.26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	IV-131
4.27. Inspektorat	IV-135
4.28. Badan Keuangan Daerah.....	IV-139
4.29. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah....	IV-142
4.30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	IV-146
4.31. Sekretariat Daerah	IV-149
4.32. Sekretariat DPRD	IV-157
4.33. 11 Kecamatan.....	IV-159
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	V-1
5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima	V-2
5.1.1. Satuan Kerja Pelaksana	V-2
5.1.2. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya.....	V-2
5.1.4.1. Dinas Ketahanan Pangan	V-2
5.1.4.2. Dinas Perumahan dan Permukiman.....	V-2
5.1.4.2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	V-3
5.2. Dana Dekonsentrasi.....	V-6
5.2.1. Satuan Kerja Pelaksana	V-6
5.2.1.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V-6
5.2.1.2 Dinas Ketahanan Pangan	V-7
5.3. Bantuan Hibah	V-10
5.2.1. Satuan Kerja Pelaksana	V-10
5.2.1.1. Dinas Perkebunan dan Peternakan	V-10
5.4. Bantuan Keuangan Kepada Desa	V-14
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH.....	VI-1
6.1. Kerjasama Antar Daerah.....	VI-1
6.2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	VI-6
6.3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah	VI-9
6.4. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana.....	VI-14
6.5. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	VI-21
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	I-4
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2017 dan 2018	I-6
Tabel 1.3.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017	I-8
Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	II-4
Tabel 2.2	Prioritas Pembangunan Daerah	II-8
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018.....	III-3
Tabel 3.2.	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017–2018*	III-4
Tabel 3.3.	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018	III-5
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018	III-5
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018.....	III-6
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018.....	III-7
Tabel 3.7.	Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2018*	III-8
Tabel 3.8.	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018.....	III-9
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2018.....	III-10
Tabel 3.10.	Perkembangan Pembiayaan Periode 2018	III-11
Tabel 3.11.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	III-13
Tabel 3.12.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	III-14
Tabel 3.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung menurut OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	III-14
Tabel 3.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	III-16
Tabel 3.15.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	III-16
Tabel 3.16.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja OPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	III-17
Tabel 4.1.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2018	IV-2
Tabel 4.2.	Capaian Program Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-5
Tabel 4.3.	Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018	IV-6
Tabel 4.4.	Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018	IV-7
Tabel 4.5.	Persentase Siswa yang Melanjutkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018	IV-7

Tabel 4.6.	Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-7
Tabel 4.7.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018	IV-8
Tabel 4.8.	Capaian Program Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-13
Tabel 4.9.	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-15
Tabel 4.10.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Tahun Anggaran 2018	IV-17
Tabel 4.11.	Capaian Program RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-19
Tabel 4.12.	Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2017-2018.....	IV-20
Tabel 4.13.	Jumlah Pasien Perbulan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2017-2018.....	IV-21
Tabel 4.14.	Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2017-2018.....	IV-21
Tabel 4.15.	Data Efisiensi Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2018.....	IV-22
Tabel 4.16.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018.....	IV-23
Tabel 4.17.	Capaian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-25
Tabel 4.18.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2018.....	IV-27
Tabel 4.19.	Capaian Program Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-28
Tabel 4.20.	Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2018	IV-29
Tabel 4.21.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018.....	IV-30
Tabel 4.22.	Pencapaian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-31
Tabel 4.23.	Kegiatan Penertiban Tahun 2018.....	IV-32
Tabel 4.24.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2018	IV-39
Tabel 4.25.	Pencapaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-40
Tabel 4.26.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018	IV-42
Tabel 4.27.	Pencapaian Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-44
Tabel 4.28.	Capaian Kinerja Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018	IV-45
Tabel 4.29.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2018	IV-46

Tabel 4.30.	Pencapaian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-47
Tabel 4.31.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018	IV-51
Tabel 4.32.	Pencapaian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-53
Tabel 4.33.	Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA Tahun Anggaran 2018	IV-55
Tabel 4.34.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Ketahanan PanganTahun Anggaran 2018	IV-56
Tabel 4.35.	Pencapaian Program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-57
Tabel 4.36.	Keragaman dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH)	IV-58
Tabel 4.37.	Jumlah Alokasi Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (keadaan s/d Desember 2018).....	IV-58
Tabel 4.38.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2018	IV-62
Tabel 4.39.	Pencapaian Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-64
Tabel 4.40.	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018.....	IV-64
Tabel 4.41.	Rekapitulasi Kualifikasi Mutu Air Sungai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-65
Tabel 4.42.	Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-66
Tabel 4.43.	Izin Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-66
Tabel 4.44.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2018.....	IV-68
Tabel 4.45.	Pencapaian Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-69
Tabel 4.46.	Realisasi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-70
Tabel 4.47.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2018	IV-71
Tabel 4.48.	Pencapaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-73
Tabel 4.49.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2018.....	IV-74
Tabel 4.50.	Pencapaian Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-76
Tabel 4.51.	Capaian Kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sampai dengan Tahun 2018	IV-77
Tabel 4.52.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018	IV-79

Tabel 4.53.	Pencapaian Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-80
Tabel 4.54.	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018	IV-81
Tabel 4.55.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018	IV-82
Tabel 4.56.	Pencapaian Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-83
Tabel 4.57.	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018.....	IV-84
Tabel 5.58.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018	IV-85
Tabel 4.59.	Pencapaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-87
Tabel 4.60.	Jumlah KUD dan Non KUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018.....	IV-89
Tabel 4.61.	Perkembangan KUD dan Non KUD Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018.....	IV-89
Tabel 4.62.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2018	IV-91
Tabel 4.63.	Pencapaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-92
Tabel 4.64.	Jumlah Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018.....	IV-93
Tabel 4.65.	Data Realisasi Izin per Kecamatan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018	IV-95
Tabel 4.66.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik Tahun 2018	IV-98
Tabel 4.67.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.....	IV-100
Tabel 4.68.	Pencapaian Program Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-103
Tabel 4.69.	Capaian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Tahun Anggaran 2018.....	IV-104
Tabel 4.70.	Situs dan Cagar Budaya yang ada dikabupaten tanjung Jabung Timur sampai dengan tahun 2018.....	IV-105
Tabel 4.71.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2018.....	IV-106
Tabel 4.72.	Pencapaian Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-107
Tabel 4.73.	Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2018.....	IV-108
Tabel 4.74.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018	IV-109
Tabel 4.75.	Pencapaian Program Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-111

Tabel 4.76.	Jumlah Produksi perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-111
Tabel 4.77.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2018.....	IV-114
Tabel 4.78.	Pencapaian Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-115
Tabel 4.79.	Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2018	IV-117
Tabel 4.80.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun Anggaran 2018.....	IV-119
Tabel 4.81.	Pencapaian Program Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-121
Tabel 4.82	Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-122
Tabel 4.83	Perkembangan Ternak Sapi UPTD-BPPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-123
Tabel 4.84.	Pengembangan inseminasi buatan (IB) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-124
Tabel 4.85.	Peningkatan Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur	IV-124
Tabel 4.86.	Peningkatan Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	IV-124
Tabel 4.87.	Bantuan Bibit Perkebunan untuk Masyarakat.....	IV-125
Tabel 4.88.	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan	IV-125
Tabel 4.89.	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan	IV-125
Tabel 4.90.	Produktifitas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan	IV-125
Tabel 4.91.	Kejadian Kebakaran lahan dan kebun tahun 2018 berdasarkan Kecamatan.....	IV-126
Tabel 4.92.	Kejadian serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan tahun 2018.....	IV-126
Tabel 4.93.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2018	IV-128
Tabel 4.94.	Pencapaian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-130
Tabel 4.95.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2018	IV-132
Tabel 4.96.	Pencapaian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-134
Tabel 4.97.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2018	IV-136
Tabel 4.98.	Pencapaian Program Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-137
Tabel 4.99.	Jumlah Pemeriksaan Internal dan Review, 2018.....	IV-137
Tabel 4.100.	Total Temuan hasil audit pemeriksaan Tahun 2012 – 2017	IV-138

Tabel 4.101.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Jabung Timur Tahun Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018.....	IV-140
Tabel 4.102.	Pencapaian Program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-141
Tabel 4.103.	Dana transper dan bantuan keuangan tahun 2018.....	IV-141
Tabel 4.104.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	IV-143
Tabel 4.105.	Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tahun Anggaran 2018	IV-145
Tabel 4.106.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2018	IV-147
Tabel 4.107.	Pencapaian Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-148
Tabel 4.108.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2018.....	IV-149
Tabel 4.109.	Pencapaian Program Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-153
Tabel 4.110.	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018.....	IV-153
Tabel 4.111.	Jumlah produk hukum yang dihasilkan Tahun 2018.....	IV-154
Tabel 4.112.	Penyelesaian Sengketa Lahan.....	IV-154
Tabel 4.113.	Rekap Lelang Tahun 2018	IV-155
Tabel 4.114.	Efisiensi Anggaran Lelang Tahun 2018.....	IV-155
Tabel 4.115.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2018	IV-158
Tabel 4.116.	Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2018	IV-159
Tabel 4.117.	Anggaran dan Realisasi Penyerapan 11 Kecamatan Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018	IV-160
Tabel 4.118.	Data Pekerjaan Alat Berat (Excavator) Tahun 2018	IV-161
Tabel 4.119.	Target dan Realisasi PBB dan Retribusi Daerah Kecamatan Tahun 2018.....	IV-163
Tabel 5.1.	Penyelenggaraan Tugas sumber Dana APBN tahun 2018 Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH	V-3
Tabel 5.2.	Penyelenggaraan Tugas sumber Dana APBN tahun 2018 Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPH	V-5
Tabel 5.3.	Penyelenggaraan Tugas sumber Dana APBN tahun 2018 Bidang Hortikultura Dinas TPH	V-6
Tabel 5.4.	Kegiatan Pelatihan dari Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	V-7
Tabel 5.5.	Target dan Realisasi Belanja Dana Dekonstrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.....	V-8
Tabel 5.6.	Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dana Dekonstrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018	V-9

Tabel 5.7.	Bantuan saprodi peremajaan Kelapa Dalam Sumber Dana APBN.....	V-11
Tabel 5.8.	Bantuan Ternak Sapi Sumber Dana APBN	V-11
Tabel 5.9.	Bantuan Vaksin Kesehatan Hewan Ternak Sumber Dana APBN.....	V-12
Tabel 5.10.	Bantuan saprodi/uang pembersihan lahan peremajaan Kelapa Dalam, kopi, dan kakao Sumber Dana APBD I	V-12
Tabel 5.11.	Bantuan sarana/alat pengolah pinang Sumber Dana APBD I.....	V-13
Tabel 5.12.	Penerimaan nitrogen cair (N2), semen beku Sumber Dana APBD I.....	V-13
Tabel 5.13.	Bantuan ternak Ayam Sumber Dana APBD I	V-14
Tabel 5.14.	Bantuan vaksin kesehatan hewan ternak Sumber Dana APBD I.....	V-14
Tabel 5.15.	Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016-2018	V-15
Tabel 5.16.	Rekapitulasi Bantuan Keuangan Desa Tahun 2018	V-16
Tabel 6.1.	Kerjasama Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.....	VI-3
Tabel 6.2.	Kejadian Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2017 dan 2018	VI-15
Tabel 6.3.	Kejadian Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2017 dan 2018	VI-15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Luas Wilayah per kecamatan (%).....	I-5
Gambar 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	I-7
Gambar 1.3.	PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2013-2017	I-9
Gambar 1.4.	Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2017.....	I-10
Gambar 1.5.	PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.....	I-11
Gambar 1.6.	Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013-2017 (persen).....	I-11
Gambar 1.7.	Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017	I-12
Gambar 1.8.	Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2018	I-13
Gambar 1.9.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan i Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 – 2018	I-14
Gambar 4.1	Perkembangan Harga Beras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018.....	IV-59
Gambar 4.2.	Perkembangan Harga Bahan Pangan Pabrikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-59
Gambar 4.3.	Perkembangan Harga Cabe dan Bawang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018	IV-60

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan dasar hukum tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundangan lainnya yang diperlukan; gambaran umum daerah yang terdiri dari kondisi geografis daerah, gambaran umum demografis, dan kondisi ekonomi yang terdiri dari potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi/PDRB.

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan sistem daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas dan Kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Hak dan kewajiban tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan kepada publik melalui instrumen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk tanggungjawab yang harus dipenuhi menurut pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 ini, dijelaskan bahwa dokumen LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2018 ini sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 25).
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 disusun untuk :

1. Memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
2. Memberikan gambaran sejauh mana perencanaan program dapat dilaksanakan, tingkat capaian keberhasilan serta manfaatnya.
3. Sebagai evaluasi atas kinerja Bupati selama menjalankan tugas jabatan periode tahun 2018.

1.4. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah



Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (Berdasarkan UU RI No.54 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi 5.445,0 Km² dan menempati urutan kelima diantara Kabupaten / Kota yang ada di Propinsi Jambi atau seluas ± 10,2

persen dari luas wilayah Provinsi Jambi. namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2011 – 2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 27 pulau kecil. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5 % dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera ini berbatasan langsung dengan Propinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah *Hinterland* segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura – Batam – Johor (Sibajo).

Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara ke selatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang.

Secara geografis keberadaannya terletak antara $0^{\circ}53'$ Lintang Selatan sampai $1^{\circ}41'$ Lintang Utara atau antara $103^{\circ}23'$ - $104^{\circ}31'$ Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut China Selatan. Sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki luas daratan sekitar 5.445 km^2 dan luas perairan (laut) $\pm 3.560,09 \text{ km}^2$ yang terbagi dalam 11 kecamatan, 20 kelurahan, dan 73 desa, sebagaimana tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan Km ²	(%)
1.	Mendahara	1	8	911,15	16,73
2.	Mendahara Ulu	1	6	381,30	7,00
3.	Geragai	1	8	285,35	5,24
4.	Dendang	1	6	478,17	8,78
5.	Muara Sabak Barat	7	0	251,75	4,62
6.	Muara Sabak Timur	2	10	410,28	7,53
7.	Kuala Jambi	2	4	120,52	2,21
8.	Rantau Rasau	1	10	356,12	6,54
9.	Berbak	1	5	194,46	3,57
10.	Nipah Panjang	2	8	234,70	4,31
11.	Sadu	1	8	1.821,20	33,45
JUMLAH		20	73	5.445,00	100,00

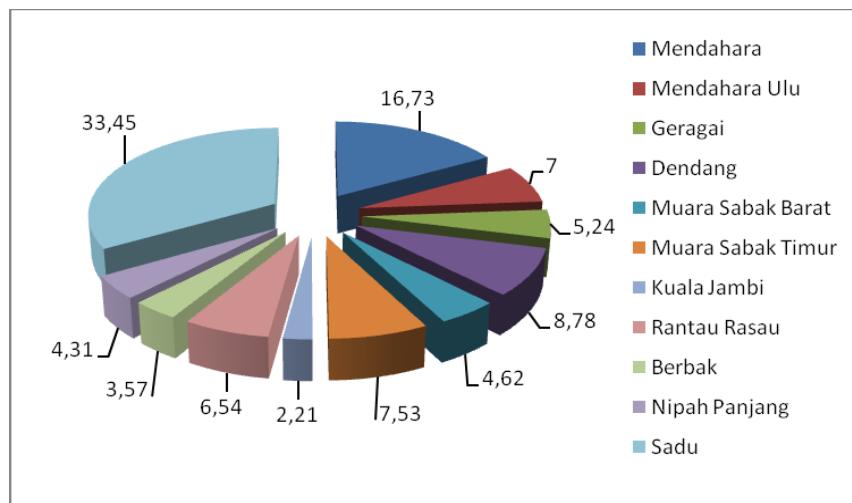
Sumber : Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2018

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan

kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 10 desa dan 2 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Kuala Jambi dan Berbak merupakan kecamatan yang paling sedikit memiliki desa/kelurahan yaitu masing-masing 4 desa 2 kelurahan dan 5 desa 1 kelurahan. Perlu kita pahami bahwa sebaran desa dan kelurahan bisa sangat mempengaruhi berkaitan tingkat sebaran pelayanan administrasi pada masyarakat. Secara ideal, jangkauan pelayanan administrasi pada masyarakat harus sedekat mungkin berada disekitar masyarakat. Namun tentu saja hal ini harus dikaitkan dengan tingkat sebaran dan tingkat kepadatan masyarakat pada suatu wilayah.

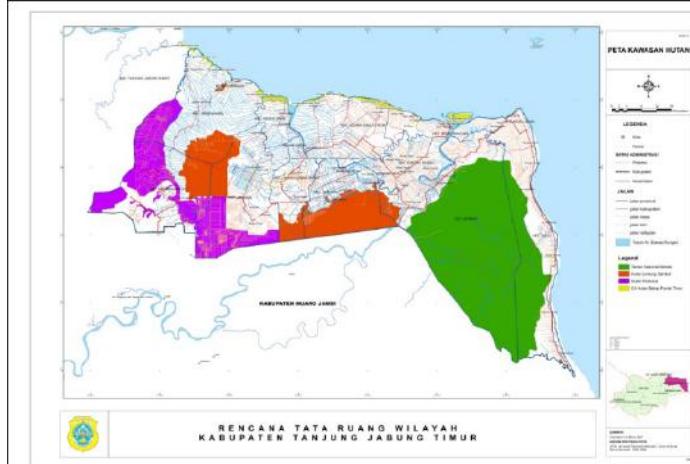
Berikut diagram pie dari luas wilayah per kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Gambar 1.1.
Luas Wilayah per kecamatan (%)



Topografi wilayah ; dataran rendah, rawa-rawa, dengan ketinggian 0 – 10 meter dari permukaan laut. Jenis tanah : rawa bergambut, cocok untuk tanaman padi dan hortikultura lain; alluvial untuk hortikultural dan perkebunan; dan prozolik merah kuning (PMK) juga cocok untuk perkebunan. Sekitar 37,45% (203.921 ha)

luas daratan kabupaten ini merupakan kawasan hutan produksi, hutan lindung, tahura, dan kawasan TNB yang luasnya mencapai 116.605 ha. Luas kawasan budidaya pertanian dan non pertanian : 340.579 ha (62,55 %).



Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 8 - 10 bulan basah dan 2 - 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 68-106 mm. Suhu udara rata-rata 22,90 C – 31,40 C. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan September.

1.4.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 bertambah sebanyak 1.636 jiwa dari 216.777 jiwa pada tahun 2017 menjadi 218.413 jiwa pada tahun 2018 atau dengan laju pertumbuhan 0,68 %. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata tahun 2018 sebesar 40,11 jiwa/km² dan sex ratio 105,48.

Dari data pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kepadatan tertinggi di kecamatan Kuala Jambi, hal ini karena memang jumlah penduduknya yang relatif besar dan mempunyai luas wilayah paling kecil bila dibanding kecamatan lain. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2017 dan 2018

Kecamatan	2017					2018				
	Laki-Laki	PR	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Laki-Laki	PR	Σ Penduduk	SR (%)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Mendahara	13.405	12.838	26.243	104,42	28,79	13.453	12.895	26.348	104,33	28,92
Mendahara Ulu	9.527	8.410	17.937	113,28	47,04	9.801	8.667	18.468	113,08	48,43
Geragai	12.215	10.721	22.936	113,94	80,38	12.343	10.850	23.193	113,76	81,28
Dendang	7.662	7.372	15.034	103,93	31,44	7.672	7.386	15.058	103,87	31,49
Sabak Barat	8.979	8.499	17.478	105,65	69,43	9.133	8.656	17.789	105,51	70,66
Sabak Timur	15.773	15.569	31.342	101,31	76,39	15.803	15.612	31.415	101,22	76,57
Kuala Jambi	7.399	7.185	14.584	102,98	121,01	7.441	7.230	14.671	102,92	121,73
Rantau Rasau	12.042	11.462	23.504	105,06	66,00	12.122	11.545	23.667	105,00	66,46
Berbak	5.076	4.831	9.907	105,07	50,95	5.082	4.842	9.924	104,96	51,03
Nipah	12.943	12.637	25.580	102,42	108,99	12.961	12.663	25.624	102,35	109,18
Sadu	6.297	5.935	12.232	106,10	6,72	6.307	5.949	12.256	106,02	6,73
Jumlah	111.318	105.459	216.777	105,56	39,81	112.118	106.295	218.413	105,48	40,11

Sumber : BPS, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2018

1.4.3. Kondisi Ekonomi

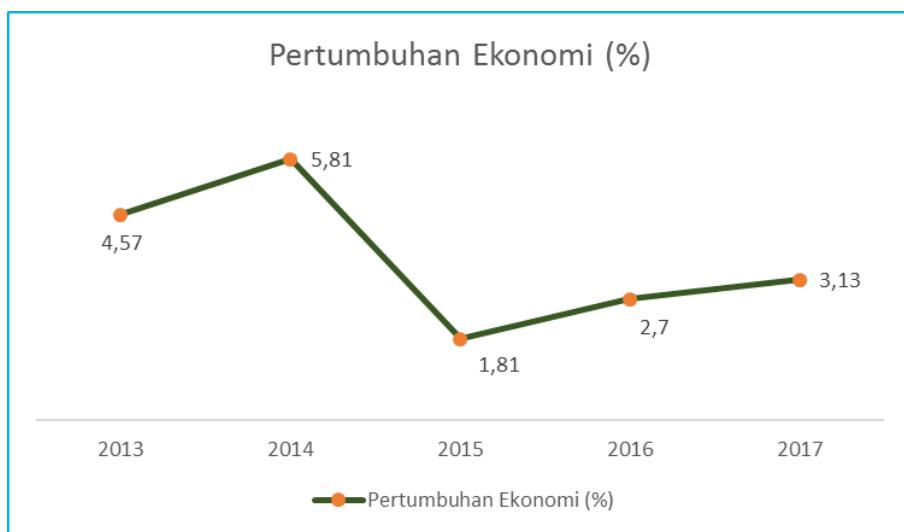
Kondisi ekonomi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2018 ini akan menggunakan indikator ekonomi makro seperti: pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku pada tahun 2017. Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan

dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta prakiraan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti : pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), selanjutnya Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.

1.4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 mencapai 3,13 persen, sedangkan tahun 2016 sebesar 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kategori Konstruksi sebesar 13,32 persen. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mencatat pertumbuhan yang positif .

Gambar 1.2.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : BPS, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2018

Besaran kontribusi kategori lain dalam pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Timur sebagai berikut : 1) kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,54 persen, 2) kategori Real Estate sebesar 8,80 persen; 3) kategori trasnportasi dan pergudangan sebesar 8,06 persen; 4) kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,8 persen; 5) kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 7,69 persen; 6) kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 6,47 persen; 7) kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,07 persen; 8) kategori Jasa Pendidikan sebesar 6,03 persen; 9) kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,40 persen; 10) kategori Jasa Lainnya sebesar 5,39 persen; 11) kategori Jasa Perusahaan

sebesar 5,32 persen; 12) kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,55 persen; 13) kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,64 persen; 14) kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,05 persen; 15) kategori Industri Pengolahan sebesar 1,93 persen; 16) kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,87 persen.

Tabel 1.3.

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), 2013–2017

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2014	2016	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,14	9,67	5,62	8,94	6,47
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,42	5,35	(0,42)	(0,31)	0,87
3.	Industri Pengolahan	10,90	(0,70)	2,68	1,08	1,93
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	13,77	6,43	7,09	5,07	2,05
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	2,85	4,53	5,11	2,64
6.	Konstruksi	24,09	4,40	2,66	6,54	13,32
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,18	11,56	13,11	12,61	7,80
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,84	7,83	3,62	7,74	8,06
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,50	16,19	9,57	10,27	10,54
10.	Informasi dan Komunikasi	5,57	10,46	6,05	9,91	7,69
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,95	5,93	3,23	8,95	5,40
12.	Real Estate	5,45	1,70	4,17	8,23	8,80
13.	Jasa Perusahaan	1,66	5,38	6,83	7,67	5,32
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,21	12,29	9,39	5,44	4,55
15.	Jasa Pendidikan	3,97	2,46	5,02	8,59	6,03
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,24	15,26	13,43	9,76	6,07
17.	Jasa lainnya	4,67	5,45	6,78	7,83	5,39
Laju Pertumbuhan		4,57	5,81	1,87	2,7	3,13

Sumber : BPS, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2018

1.4.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku dalam tahun yang bersangkutan, dan bertujuan untuk melihat struktur Perekonomian. Sementara PDRB dasar harga konstan dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yakni harga tahun dasar tertentu yang dipilih dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 dalam dokumen ini menggunakan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) pada tahun 2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2016. PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga berlaku tahun 2017 dengan migas yaitu sebesar Rp 21.041.327,9 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dasar harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp 16.766.263,6 juta.

Gambar 1.3.
PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas
Tahun 2013-2017



Sumber : BPS, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Angka, 2018

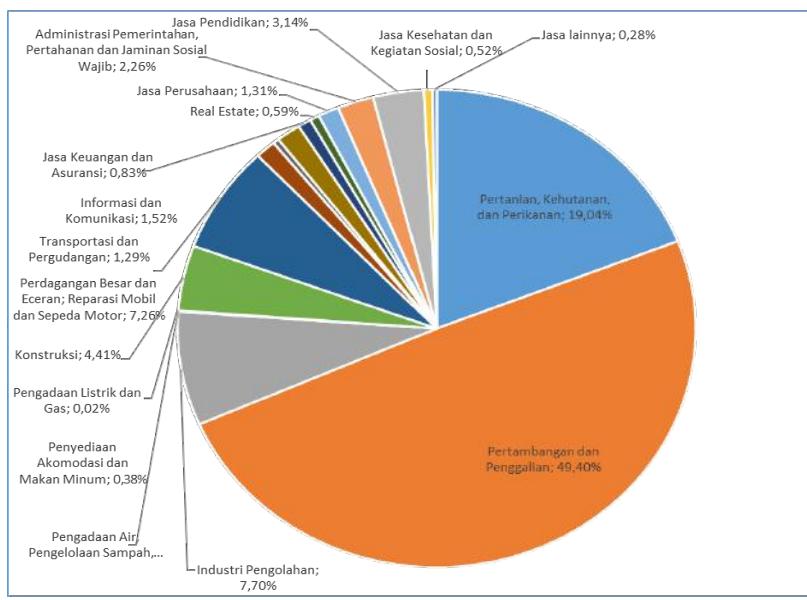
Peranan/kontribusi sektor lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi yang terbentuk disuatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor lapangan usaha. Di kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sektor pengalian dan pertambangan masih mendominasi dalam kontribusi struktur ekonomi.

1.4.3.3. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu tahun 2012 – 2017 tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2017 struktur ekonomi masih berbasis pada kategori Pertambangan dan Penggalian yang mencatat sebesar 49,40 persen, urutan kedua kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 19,04 persen, urutan ketiga kategori Industri Pengolahan sebesar 7,70 persen, urutan keempat kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor sebesar 7,26 persen, dan urutan kelima kategori Kontruksi sebesar 4,41 persen. Laju pertumbuhan kelima kategori ini akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap nilai PDRB.

Gambar 1.4.
Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur
Tahun 2017



Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2018

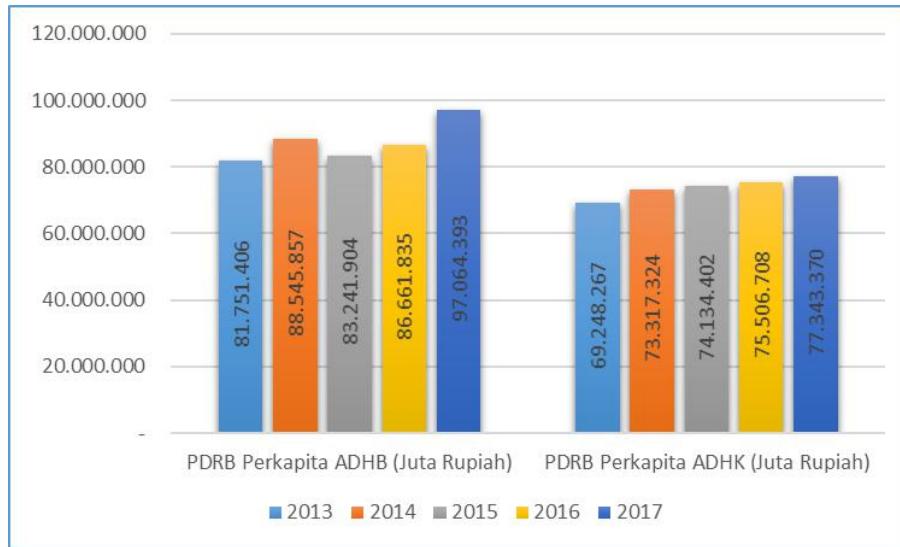
1.4.3.4. PDRB per kapita

Tingkat kemakmuran suatu daerah juga dapat dihitung dengan menggunakan angka PDRB Perkapita yaitu dengan cara nilai total PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan cara ini dapat diketahui pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Walaupun secara teoritis angka yang diperoleh merupakan indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah, namun dari angka ini belum dapat melihat tingkat pemerataan pendapatan penduduk daerah tersebut.

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuasi. Tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2015 PDRB Perkapita ADHB mengalami penurunan, dan pada tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami kenaikan. Sedangkan PDRB Perkapita ADHK periode 2013-2017 selalu mengalami peningkatan. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2017 sebesar Rp. 97.064.393 pertahun atau sebesar Rp. 8.088.699 perbulan mengalami kenaikan sebesar 12 persen dari tahun 2016. Sementara PDRB Perkapita ADHK

pada tahun 2017 Rp. 77.343.370 pertahun atau Rp. 6.445.281 perbulan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 2,43 persen. Yang perlu menjadi perhatian adalah PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Gambar 1.5.
PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2018

Gambar 1.6.
Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013-2017 (persen)

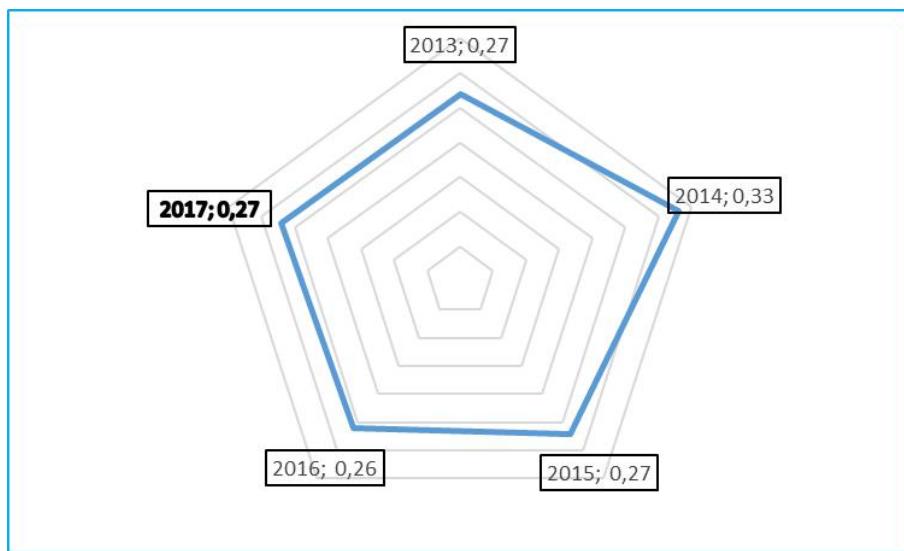


Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam angka, 2018

1.4.3.5. Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana semakin mendekati 0 semakin menunjukkan pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013-2017 menunjukkan angka yang Fluktuatif dan cenderung menurun mendekati 0. Hal ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup mengecil. Indeks Gini pada tahun 2013 sebesar 0.27 menurun menjadi 0.26 pada tahun 2016, namun sedikit mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 sebesar 0.27. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada posisi ketimpangan rendah menuju kearah ketimpangan yang hampir sempurna. Grafik perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.8 di bawah ini.

Gambar 1.7.
Rasio Gini Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2.2.1.6. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

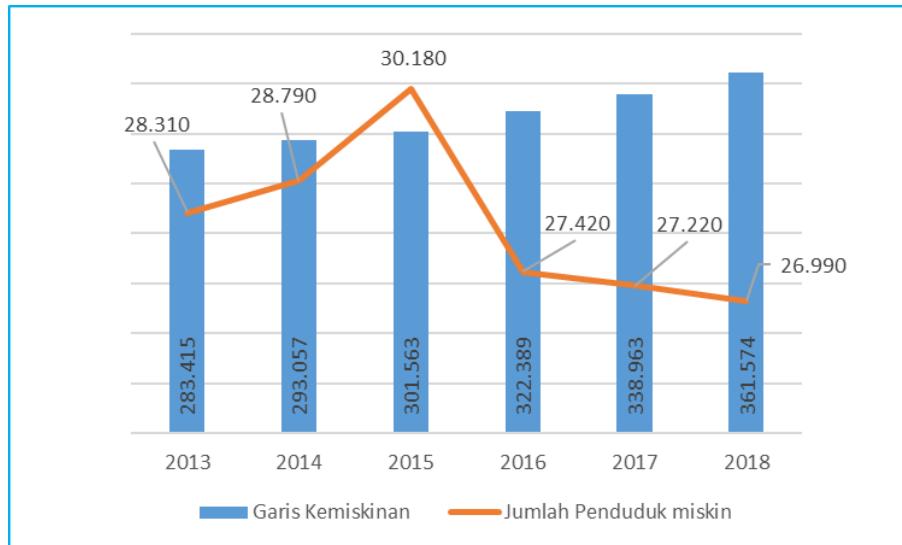
Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup

dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun tahun 2013 sampai dengan 2018 menunjukkan tren angka menurun. Sedangkan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jumlah penduduk miskin menunjukkan adanya peningkatan dengan jumlah 28.310 orang kemudian meningkat hingga pada tahun 2015 berjumlah 30.180 orang. Pada Tahun 2016 sampai dengan 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menurun dengan jumlah 27.420 orang pada tahun 2016, 27.220 orang pada tahun 2017 dan 26.990 pada tahun 2018.

Sementara pendapatan keluarga miskin pada tahun 2013 berjumlah Rp. 283.415 kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2018 menjadi Rp. 361.574.

Gambar 1.8.
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2018

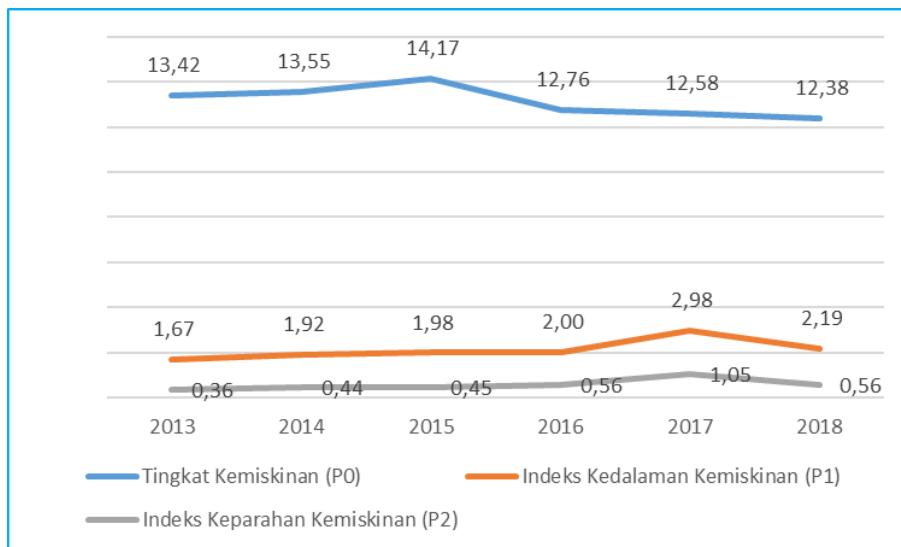


Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018 (diolah)

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalamannya dan keparahannya dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin,

kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbeck (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil.

Gambar 1.9.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 – 2018



Sumber : BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018 (data diolah)

Indeks kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berfluktuatif meningkat selama periode 2013 sampai dengan 2018. dimana pada tahun 2013 P1 berada di posisi 1,67 persen kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 2,19 persen. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) naik dari 0,36 tahun 2013 menjadi 0,56 pada tahun 2018. Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat kebijakan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018. Gambaran tentang Kebijakan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan terdiri dari :

- A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- B. Prioritas dan Pembangunan Tahun 2018

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya memuat program-program unggulan OPD yang terkait langsung dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan Kepala Daerah yang berhubungan dengan janji politik Kepala Daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, karena terkait dengan keterbatasan anggaran, identifikasi dan *magnitude* masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategis, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan Kepala Daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
- b) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d) Korelasinya terhadap berbagai isu-isu strategis daerah.

2.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 beserta perubahannya merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 – 2021.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021, maka dirumuskan dan ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, adalah :

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (MERAKYAT)”

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim);
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK;
4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis.

Kelima misi tersebut ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang konsisten menuju terwujudnya Visi Pembangunan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 5 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, dengan Delapan Pilar Utama yaitu :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.

Untuk melaksanakan misi-misi tersebut di atas maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama 5 (lima) tahun (2016-2021) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)		
Misi I : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas	Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan koneksi
		Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan
		Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten
	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air	Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk
Misi II : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) investasi industri, kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat nelayan (maritim)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan Peternakan	Meningkatnya produksi tanaman padi
		Meningkatnya produksi tanaman palawija
		Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan
		Meningkatnya Populasi Ternak
		Meningkatnya produksi daging
		Meningkatnya pendapatan petani
	Meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat
	Meningkatkan daya saing Produksi perikanan	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budaya
		Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan
	Meningkatkan daya saing Usaha Industri Kecil dan Menengah	Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM

Misi	TUJUAN	SASARAN
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)		
	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Domestik maupun Mancanegara	Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing
	Mewujudkan cabang olah raga yang kompetitif dan berdaya saing	Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi
Misi III : Meningkatkan kualitas sdm melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, pengendalian penduduk dan penerapan IPTEK	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
	Meningkatkan sarana pendidikan dasar	Meningkatnya sarana pendidikan dasar
	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan	Meningkatnya status kesehatan masyarakat
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah
	Meningkatkan peran perempuan dalam aktifitas pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan	Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan
	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berbasis IPTEk serta kemudahan mendapat informasi	Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK
Misi IV : Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang agamis dan berbudaya	Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat
	Meningkatkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan yang kondusif di masyarakat.	Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat
	Meningkatkan pengamalan Ideologi Pancasila dan nilai-nilai	Meningkatnya stabilitas tbumtranmas, kesadaran politik dan hukum
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran
		Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur

Misi	TUJUAN	SASARAN
Visi : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)		
	Iluhur budaya bangsa kepada masyarakat	budaya bangsa terhadap masyarakat
	Meningkatkan pelayanan penyelesaian sengketa tanah, lahan dan tapal batas	Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatkan mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah daerah dan Pemerintah desa	Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik
	Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis	Meningkatnya manajemen pemerintahan desa
	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas pemerintahan daerah	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, sebagaimana tabel diatas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Meningkatnya Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas;
2. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dalam menunjang kedaulatan pangan;
3. Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis sesuai RTRW Kabupaten;
4. Mengurangi kawasan kumuh pada permukiman Padat Penduduk;
5. Meningkatnya keselamatan dan kenyamanan transportasi darat maupun air;
6. Meningkatnya produksi tanaman padi;
7. Meningkatnya produksi tanaman palawija;
8. Meningkatnya produksi tanaman buah-buahan;

9. Meningkatnya Populasi Ternak;
10. Meningkatnya produksi daging;
11. Meningkatnya pendapatan petani;
12. Meningkatnya diversifikasi dan Keamanan pangan masyarakat;
13. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya;
14. Meningkatnya hasil olahan perikanan masyarakat dan tingkat konsumsi ikan;
15. Tersedianya sarana dan prasarana serta Skim Pembiayaan yang mudah, cepat dan terjangkau bagi Koperasi dan UMKM;
16. Meningkatnya Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman, Menarik dan berdaya saing;
17. Meningkatnya atlet yang berkualitas dan berprestasi;
18. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
19. Meningkatnya sarana pendidikan dasar;
20. meningkatnya status kesehatan masyarakat;
21. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
22. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan potensi wilayah;
23. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan;
24. Tersedianya akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan keterampilan berbasis IPTEK;
25. Meningkatnya aktivitas keagamaan masyarakat;
26. Meningkatnya kualitas seni budaya masyarakat;
27. Meningkatnya stabilitas timumtranmas, kesadaran politik dan hukum;
28. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dari bencana kebakaran;
29. Meningkatnya pengamalan ideologi pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa terhadap masyarakat;
30. Meningkatnya pelayanan penyelesaian sengketa tanah lahan dan tapal batas;
31. Meningkatnya mutu pelayanan Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa yang melayani publik;
32. Meningkatnya manajemen pemerintahan desa;
33. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan keterjangkauan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai kondisi dan karakteristik daerah;
34. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.

2.2. PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2018 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas;
2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain;
3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah;
5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;
6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;
7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;
8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, demokratis dan terpercaya.

Tabel 2.2
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD) 2018
I.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (Pendidikan gratis berkualitas) 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional. 4. Peningkatan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (berobat gratis dan berkualitas). 6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat. 7. Menata zonasi dan perlindungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur daerah yang berkualitas; 2. Meretas ketertinggalan wilayah sampai ke tingkat desa terutama desa – desa yang berbatasan dengan desa kabupaten lain; 3. Membangun pusat – pusat pertumbuhan ekonomi secara terpadu dan terintegrasi dalam mendukung daerah sebagai pintu gerbang perekonomian propinsi; 4. Pemberdayaan masyarakat melalui Ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan wilayah; 5. Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan layanan dibidang

	<p>terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.</p> <p>8. Mewujudkan kehidupan beragama, sosial dan budaya yang dinamis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokratis.</p> <p>9. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga dan pembinaan alit berprestasi.</p>	<p>kesehatan, pendidikan, agama dan budaya;</p> <p>6. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan SDM, Kesetaraan Gender, Pengendalian Penduduk dan penerapan IPTEK;</p> <p>7. Menjadikan Daerah tujuan investasi dan pariwisata berbasis kelestarian lingkungan;</p> <p>8. Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, bersih, demokratis dan terpercaya.</p>
--	--	--

Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program sesuai dengan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat laporan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang meliputi dari target dan realisasinya serta kebijakan keuangan daerah lainnya.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD pada dasarnya merupakan perkiraan penerimaan daerah tahun bersangkutan yang terukur secara rasional untuk dicapai dari setiap sumber pendapatan yang ada. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui sumber-sumber pendapatan yang ada memiliki posisi yang sangat penting bagi kesinambungan hidup dan kemandirian suatu daerah.

Sampai dengan tahun 2018 sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tergantung kepada dana perimbangan (yang bersumber dari APBN) seperti dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang sangat kecil dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Meskipun begitu, secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2018 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan, ditunjukkan dengan peningkatan penerimaan PAD dan serapan belanja daerah tahun 2018 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan

yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Garis besar kebijakan untuk penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Membangun dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan swasta. Kesadaran ini dimaksudkan untuk menciptakan kesiapan dan kemampuan membayar berbagai retribusi. Untuk itu, prinsip pengenaan retribusi haruslah dijaga, bahwa retribusi harus sesuai dengan pendefinisianya, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, tidak distortif, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- b. Menetapkan landasan sumber penerimaan yang membangun potensi ekonomi masyarakat. Sebagai daerah yang relatif baru, dibutuhkan rancangan jangka panjang pemerintah daerah guna dapat menggali dan memanfaatkan sumber pembiayaan yang bersumber dari daerah itu sendiri.
- c. Mengoptimalkan peran berbagai perusahaan di daerah guna dapat membiayai sebagian kebutuhan biaya pembangunan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menggali sumbangan pihak ketiga.
- d. Melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah.

Kebijakan tersebut diatas diambil sebagai upaya mengatasi beberapa permasalahan yang ada dalam meningkatkan penerimaan daerah, antara lain :

- a. Jumlah petugas pendata dan penagih pada bagian pendapatan dan UPTD masih sangat kurang.
- b. Masih ada wajib pajak/retribusi yang belum memahami tentang pajak dan retribusi serta rendahnya kesadaran kewajibannya terhadap pajak dan retribusi daerah.
- c. Dasar hukum berupa Perda yang menjadi payung hukum pemungutan pajak, retribusi daerah dan ada beberapa tarif yang belum direvisi/diperbarui sesuai dengan ketentuan.
- d. Masih rendahnya penerimaan BPHTB dari masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dan turun waris.

Selain melaksanakan garis besar kebijakan untuk penerimaan, solusi yang diambil adalah :

- a. Penambahan personil yang khusus ditugaskan sebagai petugas pendata dan pemungut/penagih pajak dan retribusi daerah.

- b. Optimalisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 2 zona yang dianggap strategis.

3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018 telah melampaui target yang telah ditetapkan atau mengalami peningkatan sebesar 0,95%. Penyumbang kontribusi pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 4.061.156.462,16 atau meningkat 8,92% dari target yang telah ditetapkan, dan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan kontribusi pendapatan sebesar Rp. 7.871.772.102,20 atau meningkat sebesar 6,03% dari target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Target	Realisasi	+/-	%
1.	PENDAPATAN	1.083.172.878.144,06	1.093.501.080.092,57	10.328.201.948,51	100,95
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.546.397.039,00	49.607.553.501,16	4.061.156.462,16	108,92
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	17.453.350.000,00	17.711.538.820,42	258.188.820,42	111,48
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.698.020.000,00	1.174.130.455,14	(523.889.544,86)	69,15
1.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.300.000.000,00	6.393.385.881,15	93.385.881,15	101,48
1.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	20.095.027.039,00	24.328.498.344,45	4.233.471.305,45	121,07
1.2.	DANA PERIMBANGAN	907.092.822.062,85	905.488.095.447,00	(1.604.726.615,85)	99,82
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	156.265.318.062,85	168.165.542.361,00	11.900.224.298,15	107,62
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	540.400.531.000,00	540.400.531.000,00	-	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	210.426.973.000,00	196.922.022.086,00	(13.504.950.914,00)	93,58
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.533.659.042,21	138.405.431.144,41	7.871.772.102,20	106,03
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	229.615.000,00	229.615.000,00	-
1.3.2.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.899.831.042,21	43.732.150.448,41	7.832.319.406,20	121,82
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.053.828.000,00	88.863.665.696,00	(190.162.304,00)	99,79
1.3.5.	Bantuan Keuangan	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	-	100,00

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Jika dibanding dengan total realisasi pendapatan daerah tahun 2017, total realisasi pendapatan daerah tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 1,15%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017–2018*

Uraian	Realisasi		Bertambah (berkurang)	
	2017	2018	(Rp)	%
PENDAPATAN	1.081.024.250.749,69	1.093.501.080.092,57	12.476.829.342,88	1,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	76.775.700.725,52	49.607.553.501,16	(27.168.147.224,36)	(35,39)
Pendapatan Pajak Daerah	16.624.742.998,10	17.711.538.820,42	1.086.795.822,32	6,54
Pendapatan Retribusi Daerah	7.353.063.946,00	1.174.130.455,14	(6.178.933.490,86)	(84,03)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.782.470.649,60	6.393.385.881,15	610.915.231,55	10,56
Lain-lain PAD Yang Sah	47.015.423.131,82	24.328.498.344,45	(22.686.924.787,37)	(48,25)
DANA PERIMBANGAN	896.259.003.727,00	905.488.095.447,00	9.229.091.720,00	1,03
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	192.017.565.563,00	168.165.542.361,00	(23.852.023.202,00)	(12,42)
Dana Alokasi Umum (DAU)	533.204.953.000,00	540.400.531.000,00	7.195.578.000,00	1,35
Dana Alokasi Khusus (DAK)	171.036.485.164,00	196.922.022.086,00	25.885.536.922,00	15,13
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.989.546.297,17	138.405.431.144,41	30.415.884.847,24	28,17
Pendapatan Hibah	253.956.000,00	229.615.000,00	(24.341.000,00)	(9,58)
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	38.985.907.297,17	43.732.150.448,41	4.746.243.151,24	12,17
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.169.683.000,00	88.863.665.696,00	28.693.982.696,00	47,69
Bantuan Keuangan	8.580.000.000,00	5.580.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(34,97)

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

3.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 mencapai Rp 49.607.553.501,16 atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 4.061.156.462,16 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 45.546.397.039,00 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 17.711.538.820,42 atau 111,48% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang menyebabkan meningkatnya pendapatan pajak daerah tersebut berasal dari komponen Pajak Restoran sebesar 135,62%, Pajak Reklame sebesar 101,94%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 104,03%. Komponen yang tidak tercapai target yaitu Pajak Hotel 86,67%, Pajak Hiburan 96,55%, Pajak Penerangan Jalan 97,97%, Pajak Air Tanah 99,71%, Pajak Sarang Burung Walet 72,98%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 55,32% dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 96,87%. Secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	17.453.350.000,00	17.711.538.820,42	258.188.820,42	111,48
4.1.1.06.	Pajak Hotel	6.000.000,00	5.200.000,00	(800.000,00)	86,67
4.1.1.07.	Pajak Restoran	2.550.000.000,00	3.458.343.957,70	908.343.957,70	135,62
4.1.1.08.	Pajak Hiburan	4.350.000,00	4.200.000,00	(150.000,00)	96,55
4.1.1.09.	Pajak Reklame	98.000.000,00	99.903.346,00	1.903.346,00	101,94
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	9.000.000.000,00	8.814.020.720,00	(185.979.280,00)	97,93
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	19.942.130,00	(57.870,00)	99,71
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	72.976.000,00	(27.024.000,00)	72,98
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.075.000.000,00	594.705.723,72	(480.294.276,28)	55,32
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.000.000.000,00	1.973.397.044,00	(26.602.956,00)	96,87
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.600.000.000,00	2.704.849.899,00	104.849.899,00	104,03

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi 69,15% yaitu sebesar Rp. 1.174.130.455,14 dari target sebesar Rp. 1.698.020.000,00. Komponen yang realisasi melebihi target pendapatan Retribusi daerah terbesar berasal dari komponen Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mencapai 100,83%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mencapai 156,53%, Retribusi Pelayanan Pasar mencapai 103,50%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mencapai 111,58%, Retribusi Tempat Pelelangan mencapai 100,13% dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan mencapai 144,61%. Secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.698.020.000,00	1.174.130.455,14	(523.889.544,86)	69,15
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	350.000.000,00	352.904.800,00	2.904.800,00	100,83
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	50.000.000,00	39.252.000,00	(10.748.000,00)	78,50
4.1.2.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.000.000,00	7.826.500,00	2.826.500,00	156,53
4.1.2.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	60.000.000,00	62.100.000,00	2.100.000,00	103,50
4.1.2.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	125.000.000,00	139.470.000,00	14.470.000,00	111,58
4.1.2.09.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.020.000,00	-	-	-
4.1.2.12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00	-	-	-
4.1.2.14.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000,00	-	-	-
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520.000.000,00	343.312.600,00	(176.687.400,00)	66,02

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)
4.1.2.17.	Retribusi Tempat Pelelangan	4.000.000,00	4.000.500,00	500,00	100,13
4.1.2.18.	Retribusi Terminal	50.000.000,00	6.800.000,00	(43.200.000,00)	13,60
4.1.2.20.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	40.000.000,00	27.240.000,00	(12.760.000,00)	68,10
4.1.2.22.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	21.000.000,00	30.368.358,00	9.368.358,00	144,61
4.1.2.23.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	22.000.000,00	17.885.000,00	(4.115.000,00)	81,30
4.1.2.26.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	107.973.697,14	(92.026.302,86)	53,99
4.1.2.28.	Retribusi Izin Gangguan	-	19.942.500,00	-	-

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 6.393.385.881,15 atau setara 101,48% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang melebihi target tersebut berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. secara rinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)
1.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.300.000.000,00	6.393.385.881,15	93.385.881,15	101,48
1.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.300.000.000,00	6.393.385.881,15	93.385.881,15	101,48

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 24.328.498.344,45 atau setara 121,07% dari target yang telah ditetapkan. Komponen yang menyebabkan terjadinya Pelampauan dari target pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut berasal dari seluruh komponen Lain-Lain PAD Yang Sah kecuali Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan yang hanya sebesar 87,43%. secara rinci realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Target dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	20.095.027.039,00	24.328.498.344,45	4.233.471.305,45	121,07
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	1.120.000.000,00	979.181.875,00	(140.818.125,00)	87,43
4.1.4.01.01.	Penjualan Hasil Pertanian	40.000.000,00	46.000.000,00	6.000.000,00	1155,0
4.1.4.01.03.	Pendapatan PDAM	-	261.929.500,00	-	-
1.1.4.01.06.	Penjualan Hasil Benih Perikanan	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	20,0
4.1.4.01.07.	Penjualan Hasil PDAM	850.000.000,00	618.836.375,00	(231.163.625,00)	72,80
1.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Peternakan	200.000.000,00	46.416.000,00	(153.584.000,00)	23,21
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	3.475.872.919,00	4.438.754.073,11	962.881.154,11	127,70
4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	3.450.000.000,00	4.318.607.284,64	868.607.284,64	125,18
4.1.4.03.02.	Jasa Giro Pemegang Kas	25.872.919,00	120.146.788,47	94.273.869,47	464,37
4.1.4.04.	Pendapatan Bunga	3.460.000.000,00	3.698.036.986,23	238.036.986,23	106,88
4.1.4.04.01.	Pendapatan Bunga Deposito Bank 9 Jambi	3.340.000.000,00	3.432.636.986,23	92.636.986,23	102,77
4.1.4.04.02.	Pendapatan Bunga Deposito BNI	120.000.000,00	265.400.000,00	145.400.000,00	221,17
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	-	20.494.032,00	-	-
4.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	-	20.494.032,00	-	-
4.1.4.11.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	3.400.000,00	-	-
4.1.4.11.03	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda tentang Penertiban Hewan	-	3.400.000,00	-	-
4.1.4.13.	Pendapatan dari Pengembalian	1.650.458.160,00	3.620.242.884,66	1.969.784.724,66	219,35
4.1.4.13.04	Pendapatan Dari Kegiatan SKPD	-	831.612.500,00	-	-
4.1.4.13.05.	Pendapatan Dari Pengembalian Temuan Pemeriksaan	1.446.458.160,00	2.706.949.848,66	1.260.491.688,66	187,14
4.1.4.13.06.	Pendapatan Dari Pengembalian Taspen	204.000.000,00	81.680.536,00	(122.319.464,00)	40,04
4.1.4.18.	Pendapatan dari BLUD	6.000.000.000,00	6.400.224.464,45	400.224.464,45	106,67
4.1.4.18.01	Pendapatan Jasa dari BLUD	6.000.000.000,00	6.400.224.464,45	400.224.464,45	106,67
4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4.388.695.960,00	5.168.164.029,00	779.468.069,00	117,76
4.1.4.19.02.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.388.695.960,00	5.168.164.029,00	779.468.069,00	117,76

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019
Sumber Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

3.1.2.2. Pendapatan Dana Perimbangan

Selama tahun 2018 penerimaan dari Dana perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp. 905.488.095.447,00 atau mencapai 99,82% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 907.092.822.062,85. Dari tiga sumber pendapatan dana perimbangan tersebut, pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai sebesar 93,58% atau sejumlah Rp. 196.922.022.086,00 dari target sebesar Rp. 210.426.973.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2018*

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)			Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	907.092.822.062,85	905.488.095.447,00	(1.604.726.615,85)	99,82	
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	156.265.318.062,85	168.165.542.361,00	11.900.224.298,15	107,62	
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	72.726.221.650,00	63.370.935.922,00	(9.355.285.728,00)	87,14	
1.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	325.935.000,00	237.227.093,00	(88.707.907,00)	72,78	
1.2.1.01.05.	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	-	62.841.250,00	-	-	
1.2.1.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	63.538.218.500,00	55.493.560.012,00	(8.044.658.488,00)	87,34	
1.2.1.01.07.	Biaya Pungut PBB	1.876.531.000,00	1.551.697.189,00	(324.833.811,00)	82,69	
1.2.1.01.08.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	6.985.537.150,00	6.025.610.378,00	(959.926.772,00)	86,26	
1.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	83.539.096.412,85	104.794.606.439,00	21.255.510.026,15	125,44	
1.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	1.766.215.000,00	2.218.596.140,00	452.381.140,00	125,61	
1.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	-	-	-	
1.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksloitasi (Royalti)	2.824.642.000,00	5.853.117.773,00	3.028.475.773,00	207,22	
1.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	-	135.418.391,00	-	-	
1.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	565.816.200,00	(927.307.800,00)	37,89	
1.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	37.263.442.500,00	31.103.229.405,00	(6.160.213.095,00)	83,47	
1.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	40.191.672.912,85	64.918.428.530,00	24.726.755.617,15	161,52	
1.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	540.400.531.000,00	540.400.531.000,00	-	100,00	
1.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	540.400.531.000,00	540.400.531.000,00	-	100,00	
1.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	540.400.531.000,00	540.400.531.000,00	-	100,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	210.426.973.000,00	196.922.022.086,00	(13.504.950.914,00)	93,58	
1.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus Fisik Reguker	38.584.448.000,00	35.359.744.289,00	(3.224.703.711,00)	91,64	
1.2.3.01.01.	DAK Bidang Pendidikan (SD)	6.092.000.000,00	6.073.704.000,00	(18.296.000,00)	99,70	
1.2.3.01.02.	DAK Bidang Pendidikan (SMP)	5.533.000.000,00	5.527.766.900,00	(5.233.100,00)	99,91	
1.2.3.01.03.	DAK Bidang Pendidikan (SKB)	822.000.000,00	821.546.000,00	(454.000,00)	99,94	
1.2.3.01.04.	DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan Dasar)	2.700.000.000,00	1.890.000.000,00	(810.000.000,00)	70,00	
1.2.3.01.05.	DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan Rujukan)	6.599.000.000,00	5.180.828.845,00	(1.418.171.155,00)	78,51	
1.2.3.01.06.	DAK Bidang Kesehatan (Kefarmasian)	2.187.448.000,00	1.697.459.648,00	(489.988.352,00)	77,60	
1.2.3.01.07.	DAK Bidang Kesehatan (Keluarga Berencana)	1.101.000.000,00	854.275.896,00	(246.724.104,00)	77,59	
1.2.3.01.08.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	1.800.000.000,00	1.762.528.000,00	(37.472.000,00)	97,92	
1.2.3.01.09.	DAK Bidang Pertanian	3.235.000.000,00	3.154.792.000,00	(80.208.000,00)	97,52	
1.2.3.01.10.	DAK Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	2.000.000.000,00	1.966.591.000,00	(33.409.000,00)	98,33	
1.2.3.01.12.	DAK Bidang Amnesitas Pariwisata	-	-	-	-	
1.2.3.01.13.	DAK Bidang Air Minum	582.000.000,00	569.500.000,00	(12.500.000,00)	97,85	
1.2.3.01.14.	DAK Bidang Sanitasi	1.414.000.000,00	1.413.882.000,00	(118.000,00)	99,99	
1.2.3.01.15.	DAK Bidang Pasar	4.519.000.000,00	4.446.870.000,00	(72.130.000,00)	98,40	
1.2.3.01.18.	DAK Bidang Pendidikan	-	-	-	-	
1.2.3.01.20.	DAK Penataan Kepariwisataan	-	-	-	-	
1.2.3.01.21.	DAK Amnesitas Pariwisata	-	-	-	-	
1.2.3.01.22.	DAK Affirmasi Bidang Transportasi	-	-	-	-	
1.2.3.02.	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan	61.216.642.000,00	58.552.707.900,00	(2.663.934.100,00)	95,65	
1.2.3.02.01.	DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum	-	-	-	-	
1.2.3.02.02.	DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi	4.709.000.000,00	4.708.801.000,00	(199.000,00)	100,00	
1.2.3.02.03.	DAK Fisik Penugasan Bidang Infrastruktur Irigasi	4.076.000.000,00	3.854.770.000,00	(221.230.000,00)	94,57	
1.2.3.02.04.	DAK Fisik Penugasan Bidang Pasar	-	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)			Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)	
1.2.3.02.05.	DAK Fisik Penugasan Bidang Infrastruktur Jalan	47.790.000.000,00	45.782.373.000,00	(2.007.627.000,00)	95,80	
1.2.3.02.06.	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan (Transfusi Darah)	3.677.642.000,00	3.296.381.000,00	(381.261.000,00)	89,63	
1.2.3.02.07.	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup	964.000.000,00	910.382.900,00	(53.617.100,00)	94,44	
1.2.3.02.09.	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	
1.2.3.03.	Dana Alokasi Khusus Affirmasi	21.388.000.000,00	20.961.312.000,00	(426.688.000,00)	98,01	
1.2.3.03.01.	DAK Fisik Affirmasi Bidang Transportasi	9.094.000.000,00	8.682.000.000,00	(412.000.000,00)	95,47	
1.2.3.03.02.	DAK Fisik Affirmasi Bidang Pendidikan	1.812.000.000,00	1.812.127.000,00	127.000,00	100,01	
1.2.3.03.03.	DAK Fisik Affirmasi Bidang Air Minum	1.404.000.000,00	1.389.400.000,00	(14.600.000,00)	98,96	
1.2.3.03.04.	DAK Fisik Affirmasi Bidang Sanitasi	9.078.000.000,00	9.077.785.000,00	(215.000,00)	100,00	
1.2.3.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	89.237.883.000,00	82.048.257.897,00	(7.189.625.103,00)	91,94	
1.2.3.04.01	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD	3.412.800.000,00	1.319.400.000,00	(2.093.400.000,00)	38,66	
1.2.3.04.02.	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	65.372.773.000,00	62.219.216.570,00	(3.153.556.430,00)	95,18	
1.2.3.04.03.	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.284.000.000,00	1.110.000.000,00	(174.000.000,00)	86,45	
1.2.3.04.04.	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	1.812.160.000,00	1.436.754.400,00	(375.405.600,00)	79,28	
1.2.3.04.05.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	13.595.222.000,00	12.225.317.227,00	(1.369.904.773,00)	89,92	
1.2.3.02.07.	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga berencana	2.785.440.000,00	2.777.967.000,00	(7.473.000,00)	99,73	
1.2.3.02.09.	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	975.488.000,00	959.602.700,00	(15.885.300,00)	98,37	

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

3.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari dana hibah; dana darurat; dana bagi hasil pajak provinsi dan pemda lainnya; dana penyesuaian dan Otonomi khusus (Dana Pengembangan Desentralisasi Fiskal); dan bantuan keuangan.

Tabel 3.8.
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)			Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)	
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.533.659.042,21	138.405.431.144,41	7.871.772.102,20	106,03	
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	229.615.000,00	-	-	
1.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	-	229.615.000,00	-	-	
1.3.1.03.01.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	-	229.615.000,00	-	-	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.899.831.042,21	43.732.150.448,41	7.832.319.406,20	121,82	
1.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	35.899.831.042,21	43.732.150.448,41	7.832.319.406,20	121,82	
1.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Provinsi Kenderaan Bermotor (DBH-PKB)	5.847.931.424,70	6.876.540.385,86	1.028.608.961,16	117,59	
1.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendermotor (DBH-BBNKB)	8.633.707.063,72	9.576.023.904,00	942.316.840,28	110,91	

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)
1.3.3.01.04	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor (DBH-PBBNKB)	15.549.930.449,26	16.978.907.052,88	1.428.976.603,62	109,19
1.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pengembangan & Pemanfaatan Air Permukaan	443.910,59	784.652,53	340.741,94	176,76
1.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	5.867.818.193,94	10.299.894.453,14	4.432.076.259,20	175,53
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.053.828.000,00	88.863.665.696,00	(190.162.304,00)	99,79
1.3.4.01.	Dana Penyesuaian	89.053.828.000,00	88.863.665.696,00	(190.162.304,00)	99,79
1.3.4.01.05.	Bantuan Operasional Sekolah	27.928.400.000,00	27.738.237.696,00	(190.162.304,00)	99,32
1.3.4.01.06.	Dana Desa	61.125.428.000,00	61.125.428.000,00	-	100,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	-	100,00
1.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	-	100,00
1.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.580.000.000,00	5.580.000.000,00	-	100,00
				

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Jika dilihat dari tabel 3.8 diatas, penerimaan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 138.405.431.144,41 atau 106,03 persen dari target yang telah ditetapkan, komponen yang belum mencapai target adalah Dana Penyesuaian pada Bantuan Operasional Sekolah yang terealisasi 99,32%.

Selanjutnya Target pendapatan daerah pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh 26 organisasi Perangkat Daerah Pemungut dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Pendapatan berdasarkan OPD Pemungut Tahun 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	Dinas Kesehatan	4.738.695.960,00	5.512.079.829,00	773.383.869,00	116,32
2	Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah	6.000.000.000,00	6.409.213.464,45	409.213.464,45	106,82
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	580.000.000,00	255.110.000,00	(324.890.000,00)	43,98
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.020.000,00	-	(1.020.000,00)	-
5	Dinas Perhubungan	201.000.000,00	184.464.858,00	(16.535.142,00)	91,77
6	Dinas Lingkungan Hidup	50.000.000,00	56.679.600,00	6.679.600,00	113,35
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	160.000.000,00	77.150.000,00	(82.850.000,00)	48,21
8	Dinas Perkebunan dan Peternakan	204.000.000,00	53.821.000,00	(150.179.000,00)	26,38
9	Dinas Perikanan	30.000.000,00	6.000.000,00	(24.000.000,00)	20,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.500.000,00	100.527.704,00	(16.972.296,00)	85,55
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga	22.000.000,00	17.885.000,00	(4.115.000,00)	81,29
12	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	40.000.000,00	46.000.000,00	6.000.000,00	115,00
13	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	850.000.000,00	880.765.875,00	30.765.875,00	103,61
14	Dinas Pendidikan	27.928.400.000,00	27.738.237.696,00	(190.162.304,00)	99,31
15	Badan Keuangan Daerah	17.583.350.000,00	17.809.553.820,42	226.203.820,42	101,28

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	+/-	%
16	Kecamatan Muara Sabak Barat	4.708.971,00	6.197.500,00	1.488.529,00	131,61
17	Kecamatan Muara Sabak Timur	4.522.962,00	8.391.300,00	3.868.338,00	185,52
18	Kecamatan Mendahara	5.384.478,00	10.200.000,00	4.815.522,00	189,43
19	Kecamatan Mendahara Ulu	4.855.822,00	-	(4.855.822,00)	-
20	Kecamatan Geragai	7.920.078,00	-	(7.920.078,00)	-
21	Kecamatan Kuala Jambi	3.994.304,00	-	(3.994.304,00)	-
22	Kecamatan Dendang	8.595.586,00	671.543,14	(7.924.042,86)	7,81
23	Kecamatan Berbak	1.928.622,00	-	(1.928.622,00)	-
24	Kecamatan Rantau Rasau	15.654.147,00	550.600,00	(15.103.547,00)	3,51
25	Kecamatan Nipah Panjang	15.389.818,00	744.000,00	(14.645.818,00)	4,83
26	Kecamatan Sadu	9.545.212,00	633.550,00	(8.911.662,00)	6,63
	JUMLAH	58.588.465.960,00	59.174.877.340,01	586.411.380,01	101,00

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

3.1.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SILPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Tabel 3.10.
Perkembangan Pembiayaan Periode 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)			Bertambah (Berkurang)
		Target	Realisasi	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(117.148.747.825,70)	(39.965.932.558,43)	77.182.815.267,27	34,12
3.	PEMBIAYAAN	121.148.747.825,70	121.148.747.825,70	-	100,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	119.148.747.825,70	119.148.747.825,70	-	100,00
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	119.148.747.825,70	119.148.747.825,70	-	100,00
3.1.1.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	119.148.747.825,70	119.148.747.825,70	-	100,00
3.1.1.01.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	119.148.747.825,70	119.148.747.825,70	-	100,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
3.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
3.2.2.02.01.	Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)			Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)	(6=4/3*100)	
PEMBIAYAAN NETTO		117.148.747.825,70	117.148.747.825,70	-	100,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-	77.182.815.267,27	77.182.815.267,27	-	

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Dari sisi penerimaan pembiayaan tahun 2018, anggaran SILPA ditargetkan sebesar Rp. 119.148.747.825,70 terealisasi mencapai sebesar 100%. Dari sisi pengeluaran pembiayaan tahun 2018, anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.000.000.000 dan terealisasi mencapai 100%. sehingga pembiayaan netto tahun 2018 terealisasi sebesar Rp 117.148.747.825,70 atau 100,00%.

3.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran, dapat dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

3.2.2. Target dan Realisasi Belanja

Secara umum anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan satuan pagu tertinggi guna pelaksanaan kegiatan, sehingga apabila dalam pengeluaran tertentu tidak mencapai catatan target belanja, dapat diartikan adanya efisiensi. Dengan pengeluaran tetap mengedepankan azas manfaat dan target kinerja masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahun 2018, anggaran belanja Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dialokasikan sebesar Rp. 1.200.321.625.969,76 dengan rincian alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 537.900.064.661,82 atau sebesar 44,81% dari total target belanja Daerah, sedangkan untuk Alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 662.421.561.307,94 atau sebesar 55,19% dari total alokasi belanja daerah. Dari alokasi belanja daerah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 1.133.467.012.651,00 atau sebesar 94,43%, terdiri dari Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 516.984.927.575,00 sebesar 45,61% dari target anggaran dan untuk Belanja Langsung terealisasi Rp. 616.482.085.076,00 atau sebesar 54,39% dari target anggaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11.
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
2.	BELANJA	1.200.321.625.969,76	1.133.467.012.651,00	(66.854.613.318,76)	94,43
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	537.900.064.661,82	516.984.927.575,00	(20.915.137.086,82)	96,11
2.2.	BELANJA LANGSUNG	662.421.561.307,94	616.482.085.076,00	(45.939.476.231,94)	93,06

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

3.2.2.1. Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

Tahun 2018 belanja tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 537.900.064.661,82 dan terealisasi sebesar Rp. 516.984.927.575,00 atau 96,11% lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit). Belanja pegawai yang merupakan belanja gaji pegawai dan TKD yang ditargetkan sebesar Rp. 375.186.472.798,53 terealisasi sebesar Rp. 354.894.755.579,00 atau 94,59%. Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp. 24.108.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.398.919.899,00 atau 101,20%. Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,00 atau 100,00%. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menganggarkan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa tahun 2018 sebesar Rp. 1.886.402.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.852.354.934,00 atau 98,20%. Selain itu juga dianggarkan Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten dan Desa serta Parpol sebesar Rp. 135.972.012.906,29 dan teralisasi sebesar Rp. 135.525.260.635,00 atau 99,67%. Anggaran belanja tidak terduga pada tahun 2018 disediakan anggaran sebesar Rp. 646.476.957,00 dan teralisasi sebesar Rp. 213.636.528,00 atau 33,05%. Hal ini disebabkan penggunaan belanja ini dilakukan sangat selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.12.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
2.	BELANJA	1.200.321.625.969,76	1.133.467.012.651,00	(66.854.613.318,76)	94,43
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	537.900.064.661,82	516.984.927.575,00	(20.915.137.086,82)	96,11
2.1.1.	Belanja Pegawai	375.186.472.798,53	354.894.755.579,00	(20.291.717.219,53)	94,59
2.1.4.	Belanja Hibah	24.108.700.000,00	24.398.919.899,00	290.219.899,00	101,20
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.886.402.000,00	1.852.354.934,00	(34.047.066,00)	98,20
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	135.972.012.906,29	135.525.260.635,00	(446.752.271,29)	99,67
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	646.476.957,00	213.636.528,00	(432.840.429,00)	33,05

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Belanja Tidak Langsung menurut OPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung menurut OPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
1.	DINAS PENDIDIKAN	224.201.901.731,00	212.042.273.384,00	(12.159.628.347)	94,58
2.	DINAS KESEHATAN	29.145.083.620,00	28.872.551.355,00	(272.532.265)	99,06
3.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	8.646.286.076,00	8.410.719.817,00	(235.566.259)	97,28
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.463.325.797,00	4.219.574.352,00	(243.751.445)	94,54
5.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2.786.881.384,00	2.547.901.901,00	(238.979.483)	91,42
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.074.911.619,00	1.917.131.551,00	(157.780.068)	92,40
7.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.847.872.928,00	1.538.449.302,00	(309.423.626)	83,26
8.	DINAS PERHUBUNGAN	2.069.634.965,00	1.954.846.109,00	(114.788.856)	94,45
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.460.166.483,07	1.391.306.922,00	(68.859.561)	95,28
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.865.346.101,00	1.724.620.193,00	(140.725.908)	92,46
11.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Perlindungan ANAK	2.083.412.684,00	2.035.616.958,00	(47.795.726)	97,71
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.044.562.113,00	2.025.875.083,00	(18.687.030)	99,09
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.716.210.623,00	1.675.598.319,00	(40.612.304)	97,63
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.808.084.429,00	1.749.339.816,00	(58.744.613)	96,75
15.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA & OLAHraga	2.300.823.431,00	2.231.271.110,00	(69.552.321)	96,98
16.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.833.987.767,00	1.766.704.655,00	(67.283.112)	96,33
17.	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK	1.376.382.690,00	1.344.302.404,00	(32.080.286)	97,67
18.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	597.731.249,00	469.878.219,00	(127.853.030)	78,61
19.	SEKRETARIAT DPRD	2.278.408.232,00	2.070.683.709,00	(207.724.523)	90,88

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
20.	SEKRETARIAT DAERAH	6.987.508.411,00	6.918.538.589,00	(68.969.822)	99,01
21.	DPRD	11.924.975.675,00	11.449.748.566,00	(475.227.109)	96,01
22.	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.102.888.011,51	5.111.335.689,00	(1.991.552.323)	71,96
23.	PPKD	162.713.591.863,29	162.090.171.996,00	(623.419.867)	99,62
24.	INSPEKTORAT	2.158.323.321,00	2.075.492.997,00	(82.830.324)	96,16
25.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.013.997.922,00	4.646.331.564,00	(367.666.358)	92,67
26.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.652.536.415,00	1.584.407.334,00	(68.129.081)	95,88
28.	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	3.510.972.521,91	3.418.039.129,00	(92.933.393)	97,35
29.	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	3.049.128.272,33	2.913.218.985,00	(135.909.287)	95,54
30.	KECAMATAN MENDAHARA	1.642.247.253,43	1.573.492.706,00	(68.754.547)	95,81
31.	KECAMATAN MENDAHARA ULU	1.544.851.531,64	1.491.782.676,00	(53.068.856)	96,56
32.	KECAMATAN GERAGAI	1.843.949.977,35	1.790.928.867,00	(53.021.110)	97,12
33.	KECAMATAN KUALA JAMBI	1.470.059.649,53	1.361.824.248,00	(108.235.402)	92,64
34.	KECAMATAN DENDANG	1.599.727.508,48	1.526.647.016,00	(73.080.492)	95,43
35.	KECAMATAN BERBAK	1.356.000.459,58	1.303.221.771,00	(52.778.689)	96,11
36.	KECAMATAN RANTAU RASAU	2.124.255.528,14	2.036.858.627,00	(87.396.901)	95,89
37.	KECAMATAN NIPAH PANJANG	3.024.590.913,86	2.949.299.670,00	(75.291.244)	97,51
38.	KECAMATAN SADU	1.830.732.953,70	1.729.841.597,00	(100.891.357)	94,49
39.	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.007.412.520,00	1.956.231.089,00	(51.181.431)	97,45
40.	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.558.843.913,00	1.531.981.760,00	(26.862.153)	98,28
41.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.062.510.629,00	1.384.863.160,00	(677.647.469)	67,14
42.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6.722.997.594,00	6.410.686.033,00	(312.311.561)	95,35
43.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	2.930.417.084,00	2.809.060.349,00	(121.356.735)	95,86
44.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.909.510.925,00	1.580.314.533,00	(329.196.392)	82,76
45.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.474.944.051,00	1.374.369.251,00	(100.574.800)	93,18
47.	DINAS PERIKANAN	2.155.375.525,00	2.081.556.987,00	(73.818.538)	96,58
48.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.926.700.310,00	1.896.037.227,00	(30.663.083)	98,41
	JUMLAH	537.900.064.661,82	516.984.927.575,00	(20.915.137.086,82)	96,11

Sumber : LKPJ OPD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

3.2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Langsung

selanjutnya belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 662.421.561.307,94 dan terealisasi sebesar Rp. 616.482.085.076,00 atau 93,06 % lebih rendah dari rencana anggaran (unaudit).

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	662.421.561.307,94	616.482.085.076,00	(45.939.476.231,94)	93,06
2.2.1.	Belanja Pegawai	66.484.366.020,00	62.770.409.061,41	(3.713.956.958,59)	94,41
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.554.460.154,25	240.677.812.250,59	(13.876.647.903,66)	94,55
2.2.3.	Belanja Modal	341.382.735.133,69	313.033.863.764,00	(28.348.871.369,69)	91,70

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Untuk belanja pegawai dalam belanja langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 66.484.366.020,00 terealisasi sebesar Rp. 62.770.409.061,41 atau 94,41%, sedangkan untuk belanja barang dan jasa yang ditargetkan sebesar Rp. 254.554.460.154,25 terealisasi sebesar Rp. 240.677.812.250,59 atau 94,55% dan untuk belanja modal yang ditargetkan Rp. 341.382.735.133,69 terealisasi sebesar Rp. 313.033.863.764,00 atau 91,70%. untuk lebih jelasnya belanja langsung pada masing-masing OPD dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut OPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1.	DINAS PENDIDIKAN	72.450.146.530,00	72.287.125.410,00	(163.021.120)	99,77
2.	DINAS KESEHATAN	41.866.412.610,00	34.722.206.701,00	(7.144.205.909)	82,94
3.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	27.364.247.266,32	24.749.787.595,00	(2.614.459.671)	90,45
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	253.177.750.000,00	229.108.857.968,00	(24.068.892.032)	90,49
5.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	40.601.467.173,00	39.120.429.005,00	(1.481.038.168)	96,35
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.396.094.287,70	4.950.209.479,00	(445.884.809)	91,74
7.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.662.323.984,00	1.600.464.126,00	(61.859.858)	96,28
8.	DINAS PERHUBUNGAN	5.259.752.111,00	4.842.305.491,00	(417.446.620)	92,06
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.147.342.691,67	5.998.069.688,00	(149.273.004)	97,57
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.727.090.552,00	3.677.978.511,00	(49.112.041)	98,68
11.	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.067.650.000,00	3.045.460.613,00	(22.189.387)	99,28
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.451.258.640,97	4.728.631.714,00	(722.626.927)	86,74
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.887.362.334,00	1.799.109.396,00	(88.252.938)	95,32
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.779.530.600,00	1.753.504.416,00	(26.026.184)	98,54
15.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA & OLAH RAGA	17.366.891.800,00	16.384.174.195,00	(982.717.605)	94,34
16.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.000.332.606,28	4.571.308.963,00	(429.023.643)	91,42
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.030.079.000,00	1.983.843.553,00	(46.235.447)	97,72
18.	SEKRETARIAT DPRD	21.382.131.000,00	20.160.015.223,00	(1.222.115.777)	94,28
19.	SEKRETARIAT DAERAH	38.254.468.228,00	36.500.428.399,00	(1.754.039.829)	95,41
20.	BADAN KEUANGAN DAERAH	11.517.384.645,03	10.728.519.822,00	(788.864.823)	93,15

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
21.	INSPEKTORAT	3.783.222.890,00	3.771.923.524,00	(11.299.366)	99,70
22.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.330.796.882,00	4.911.301.845,00	(419.495.037)	92,13
23.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.833.102.000,00	1.802.415.234,00	(30.686.766)	98,33
24.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.877.997.000,00	3.822.700.576,00	(55.296.424)	98,57
25.	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4.948.161.562,85	4.929.516.179,00	(18.645.384)	99,62
26.	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	2.304.433.857,92	2.298.609.022,00	(5.824.836)	99,75
27.	KECAMATAN MENDAHARA	1.330.938.512,54	1.322.639.324,00	(8.299.189)	99,38
28.	KECAMATAN MENDAHARA ULU	1.806.350.000,00	1.662.296.305,00	(144.053.695)	92,03
29.	KECAMATAN GERAGAI	1.510.474.753,99	1.298.609.722,00	(211.865.032)	85,97
30.	KECAMATAN KUALA JAMBI	2.076.086.587,00	1.969.382.088,00	(106.704.499)	94,86
31.	KECAMATAN DENDANG	1.537.825.613,96	1.514.393.623,00	(23.431.991)	98,48
32.	KECAMATAN BERBAK	1.884.589.077,00	1.818.204.860,00	(66.384.217)	96,48
33.	KECAMATAN RANTAU RASAU	1.678.959.225,33	1.668.257.224,00	(10.702.001)	99,36
34.	KECAMATAN NIPAH PANJANG	2.355.111.173,38	2.347.644.729,00	(7.466.444)	99,68
35.	KECAMATAN SADU	1.625.010.435,00	1.618.822.560,00	(6.187.875)	99,62
36.	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.263.903.700,00	3.172.441.857,00	(91.461.843)	97,20
37.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.016.899.440,00	3.938.323.660,00	(78.575.780)	98,04
38.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.889.950.429,00	1.857.409.727,00	(32.540.702)	98,28
39.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	15.773.443.750,00	14.897.183.652,00	(876.260.098)	94,44
40.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	7.354.924.000,00	7.169.000.111,00	(185.923.889)	97,47
41.	DINAS PENGENDAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.533.935.648,00	7.219.860.665,00	(314.074.983)	95,83
42.	DINAS PERIKANAN	6.147.675.400,00	5.925.242.412,00	(222.432.988)	96,38
43.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.168.053.310,00	12.833.475.909,00	(334.577.401)	97,46
	JUMLAH	662.421.561.307,94	616.482.085.076,00	(45.939.476.231,94)	93,06

Sumber : LKPJ OPD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

Dari tabel 3.15 di atas memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) OPD yang tingkat realisasinya berada di bawah 90 persen yaitu Dinas Kesehatan dengan realisasi 82,94%, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi 86,74% dan Kecamatan Geragai dengan realisasi 85,97%. Realisasi Belanja Langsung menurut Jenis Belanja per OPD dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Menurut Jenis Belanja OPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
1.	DINAS PENDIDIKAN	72.450.146.530,00	72.287.125.410,00	(163.021.120,00)	99,77
	Belanja Pegawai	15.492.489.720,00	14.091.752.761,41	(1.400.736.958,59)	90,96
	Belanja Barang dan Jasa	31.400.267.352,00	33.268.765.024,59	1.868.497.672,59	105,95
	Belanja Modal	25.557.389.458,00	24.926.607.624,00	(630.781.834,00)	97,53
2.	DINAS KESEHATAN	41.866.412.610,00	34.722.206.701,00	(7.144.205.909,00)	82,94
	Belanja Pegawai	3.376.450.000,00	3.340.060.000,00	(36.390.000,00)	98,92
	Belanja Barang dan Jasa	31.570.035.642,00	27.008.066.844,00	(4.561.968.798,00)	85,55

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Modal	6.919.926.968,00	4.374.079.857,00	(2.545.847.111,00)	63,21
3.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH	27.364.247.266,32	24.749.787.595,00	(2.614.459.671,32)	90,45
	Belanja Pegawai	3.627.270.000,00	3.607.640.000,00	(19.630.000,00)	99,46
	Belanja Barang dan Jasa	12.320.841.735,23	10.561.007.844,00	(1.759.833.891,23)	85,72
	Belanja Modal	11.416.135.531,09	10.581.139.751,00	(834.995.780,09)	92,69
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM	253.177.750.000,00	229.108.857.968,00	(24.068.892.032,00)	90,49
	Belanja Pegawai	2.949.900.000,00	2.208.396.000,00	(741.504.000,00)	74,86
	Belanja Barang dan Jasa	17.057.577.000,00	15.990.933.439,00	(1.066.643.561,00)	93,75
	Belanja Modal	233.170.273.000,00	210.909.528.529,00	(22.260.744.471,00)	90,45
5.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	40.601.467.173,00	39.120.429.005,00	(1.481.038.168,00)	96,35
	Belanja Pegawai	3.645.848.000,00	3.412.881.000,00	(232.967.000,00)	93,61
	Belanja Barang dan Jasa	11.289.836.597,00	10.679.643.230,00	(610.193.367,00)	94,60
	Belanja Modal	25.665.782.576,00	25.027.904.775,00	(637.877.801,00)	97,51
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.396.094.287,70	4.950.209.479,00	(445.884.808,70)	91,74
	Belanja Pegawai	1.348.080.000,00	1.300.338.000,00	(47.742.000,00)	96,46
	Belanja Barang dan Jasa	3.601.664.287,70	3.205.271.479,00	(396.392.808,70)	88,99
	Belanja Modal	446.350.000,00	444.600.000,00	(1.750.000,00)	99,61
7.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.662.323.984,00	1.600.464.126,00	(61.859.858,00)	96,28
	Belanja Pegawai	305.100.000,00	302.213.000,00	(2.887.000,00)	99,05
	Belanja Barang dan Jasa	1.264.754.984,00	1.207.145.604,00	(57.609.380,00)	95,45
	Belanja Modal	92.469.000,00	91.105.522,00	(1.363.478,00)	98,53
8.	DINAS PERHUBUNGAN	5.259.752.111,00	4.842.305.491,00	(417.446.620,00)	92,06
	Belanja Pegawai	1.572.305.000,00	1.444.366.000,00	(127.939.000,00)	91,86
	Belanja Barang dan Jasa	2.488.784.311,00	2.219.569.491,00	(269.214.820,00)	89,18
	Belanja Modal	1.198.662.800,00	1.178.370.000,00	(20.292.800,00)	98,31
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6.147.342.691,67	5.998.069.688,00	(149.273.003,67)	97,57
	Belanja Pegawai	1.161.775.000,00	1.155.268.000,00	(6.507.000,00)	99,44
	Belanja Barang dan Jasa	3.379.457.691,67	3.265.376.288,00	(114.081.403,67)	96,62
	Belanja Modal	1.606.110.000,00	1.577.425.400,00	(28.684.600,00)	98,21
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.727.090.552,00	3.677.978.511,00	(49.112.041,00)	98,68
	Belanja Pegawai	1.041.680.000,00	1.020.192.000,00	(21.488.000,00)	97,94
	Belanja Barang dan Jasa	2.382.062.052,00	2.354.732.511,00	(27.329.541,00)	98,85
	Belanja Modal	303.348.500,00	303.054.000,00	(294.500,00)	99,90
11.	DINAS SOSIAL PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN Perlindungan Anak	3.067.650.000,00	3.045.460.613,00	(22.189.387,00)	99,28
	Belanja Pegawai	578.250.000,00	569.700.000,00	(8.550.000,00)	98,52
	Belanja Barang dan Jasa	2.416.815.000,00	2.403.175.613,00	(13.639.387,00)	99,44
	Belanja Modal	72.585.000,00	72.585.000,00	-	100,00
12.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.451.258.640,97	4.728.631.714,00	(722.626.926,97)	86,74
	Belanja Pegawai	799.910.000,00	788.012.000,00	(11.898.000,00)	98,51
	Belanja Barang dan Jasa	2.562.301.140,97	2.391.139.414,00	(171.161.726,97)	93,32
	Belanja Modal	2.089.047.500,00	1.549.480.300,00	(539.567.200,00)	74,17
13.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.887.362.334,00	1.799.109.396,00	(88.252.938,00)	95,32
	Belanja Pegawai	519.890.000,00	502.140.000,00	(17.750.000,00)	96,59
	Belanja Barang dan Jasa	1.114.087.334,00	1.044.108.754,00	(69.978.580,00)	93,72
	Belanja Modal	253.385.000,00	252.860.642,00	(524.358,00)	99,79
14.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.779.530.600,00	1.753.504.416,00	(26.026.184,00)	98,54
	Belanja Pegawai	247.060.000,00	246.000.000,00	(1.060.000,00)	99,57

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Barang dan Jasa	1.461.259.600,00	1.436.714.416,00	(24.545.184,00)	98,32
	Belanja Modal	71.211.000,00	70.790.000,00	(421.000,00)	99,41
15.	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA & OLAHRAGA	17.366.891.800,00	16.384.174.195,00	(982.717.605,00)	94,34
	Belanja Pegawai	1.166.860.000,00	1.145.145.000,00	(21.715.000,00)	98,14
	Belanja Barang dan Jasa	12.900.925.500,00	11.978.748.195,00	(922.177.305,00)	92,85
	Belanja Modal	3.299.106.300,00	3.260.281.000,00	(38.825.300,00)	98,82
16.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	5.000.332.606,28	4.571.308.963,00	(429.023.643,28)	91,42
	Belanja Pegawai	1.610.640.000,00	1.531.402.000,00	(79.238.000,00)	95,08
	Belanja Barang dan Jasa	2.949.662.606,28	2.622.365.763,00	(327.296.843,28)	88,90
	Belanja Modal	440.030.000,00	417.541.200,00	(22.488.800,00)	94,89
17.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.030.079.000,00	1.983.843.553,00	(46.235.447,00)	97,72
	Belanja Pegawai	508.440.000,00	489.090.000,00	(19.350.000,00)	96,19
	Belanja Barang dan Jasa	1.376.159.000,00	1.349.300.553,00	(26.858.447,00)	98,05
	Belanja Modal	145.480.000,00	145.453.000,00	(27.000,00)	99,98
18	SEKRETARIAT DPRD	21.382.131.000,00	20.160.015.223,00	(1.222.115.777,00)	94,28
	Belanja Pegawai	1.516.185.000,00	1.465.324.000,00	(50.861.000,00)	96,65
	Belanja Barang dan Jasa	17.164.681.000,00	16.043.386.192,00	(1.121.294.808,00)	93,47
	Belanja Modal	2.701.265.000,00	2.651.305.031,00	(49.959.969,00)	98,15
19	SEKRETARIAT DAERAH	38.254.468.228,00	36.500.428.399,00	(1.754.039.829,00)	95,41
	Belanja Pegawai	4.301.355.000,00	4.075.698.500,00	(225.656.500,00)	94,75
	Belanja Barang dan Jasa	29.598.403.928,00	28.316.209.372,00	(1.282.194.556,00)	95,67
	Belanja Modal	4.354.709.300,00	4.108.520.527,00	(246.188.773,00)	94,35
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	11.517.384.645,03	10.728.519.822,00	(788.864.823,03)	93,15
	Belanja Pegawai	1.975.829.800,00	1.756.076.800,00	(219.753.000,00)	88,88
	Belanja Barang dan Jasa	7.862.012.025,66	7.320.252.022,00	(541.760.003,66)	93,11
	Belanja Modal	1.679.542.819,37	1.652.191.000,00	(27.351.819,37)	98,37
21	INSPEKTORAT	3.783.222.890,00	3.771.923.524,00	(11.299.366,00)	99,70
	Belanja Pegawai	461.180.000,00	458.454.000,00	(2.726.000,00)	99,41
	Belanja Barang dan Jasa	2.987.492.890,00	2.980.398.524,00	(7.094.366,00)	99,76
	Belanja Modal	334.550.000,00	333.071.000,00	(1.479.000,00)	99,56
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	5.330.796.882,00	4.911.301.845,00	(419.495.037,00)	92,13
	Belanja Pegawai	1.482.565.000,00	1.440.976.000,00	(41.589.000,00)	97,19
	Belanja Barang dan Jasa	3.805.931.882,00	3.428.490.845,00	(377.441.037,00)	90,08
	Belanja Modal	42.300.000,00	41.835.000,00	(465.000,00)	98,90
23	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.833.102.000,00	1.802.415.234,00	(30.686.766,00)	98,33
	Belanja Pegawai	386.070.000,00	376.480.000,00	(9.590.000,00)	97,52
	Belanja Barang dan Jasa	1.306.282.000,00	1.285.235.234,00	(21.046.766,00)	98,39
	Belanja Modal	140.750.000,00	140.700.000,00	(50.000,00)	99,96
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.877.997.000,00	3.822.700.576,00	(55.296.424,00)	98,57
	Belanja Pegawai	587.104.000,00	574.561.000,00	(12.543.000,00)	97,86
	Belanja Barang dan Jasa	2.535.763.000,00	2.494.713.876,00	(41.049.124,00)	98,38
	Belanja Modal	755.130.000,00	753.425.700,00	(1.704.300,00)	99,77
25	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4.948.161.562,85	4.929.516.179,00	(18.645.383,85)	99,62
	Belanja Pegawai	1.819.525.000,00	1.819.482.000,00	(43.000,00)	99,99
	Belanja Barang dan Jasa	1.278.800.400,00	1.261.640.691,00	(17.159.709,00)	98,66
	Belanja Modal	1.849.836.162,85	1.848.393.488,00	(1.442.674,85)	99,92
26	KECAMATAN MUARA SABAK	2.304.433.857,92	2.298.609.022,00	(5.824.835,92)	99,75

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
TIMUR					
	Belanja Pegawai	625.900.000,00	625.900.000,00	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.093.733.857,92	1.087.909.022,00	(5.824.835,92)	99,47
	Belanja Modal	584.800.000,00	584.800.000,00	-	100,00
27	KECAMATAN MENDAHARA	1.330.938.512,54	1.322.639.324,00	(8.299.188,54)	99,38
	Belanja Pegawai	482.155.000,00	482.155.000,00	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	582.377.702,54	574.078.514,00	(8.299.188,54)	98,57
	Belanja Modal	266.405.810,00	266.405.810,00	-	100,00
28	KECAMATAN MENDAHARA ULU	1.806.350.000,00	1.662.296.305,00	(144.053.695,00)	92,03
	Belanja Pegawai	515.785.000,00	515.589.000,00	(196.000,00)	99,96
	Belanja Barang dan Jasa	921.090.900,00	777.439.505,00	(143.651.395,00)	84,40
	Belanja Modal	369.474.100,00	369.267.800,00	(206.300,00)	99,94
29	KECAMATAN GERAGAI	1.510.474.753,99	1.298.609.722,00	(211.865.031,99)	85,97
	Belanja Pegawai	588.095.000,00	575.795.000,00	(12.300.000,00)	97,91
	Belanja Barang dan Jasa	653.879.753,99	473.314.722,00	(180.565.031,99)	72,39
	Belanja Modal	268.500.000,00	249.500.000,00	(19.000.000,00)	92,92
30	KECAMATAN KUALA JAMBI	2.076.086.587,00	1.969.382.088,00	(106.704.499,00)	94,86
	Belanja Pegawai	785.275.000,00	785.025.000,00	(250.000,00)	99,97
	Belanja Barang dan Jasa	677.461.550,00	573.891.088,00	(103.570.462,00)	84,71
	Belanja Modal	613.350.037,00	610.466.000,00	(2.884.037,00)	99,53
31	KECAMATAN DENDANG	1.537.825.613,96	1.514.393.623,00	(23.431.990,96)	98,48
	Belanja Pegawai	588.170.000,00	588.166.000,00	(4.000,00)	99,99
	Belanja Barang dan Jasa	684.480.613,96	671.133.841,00	(13.346.772,96)	98,05
	Belanja Modal	265.175.000,00	255.093.782,00	(10.081.218,00)	96,20
32	KECAMATAN BERBAK	1.884.589.077,00	1.818.204.860,00	(66.384.217,00)	96,48
	Belanja Pegawai	466.080.000,00	445.280.000,00	(20.800.000,00)	95,54
	Belanja Barang dan Jasa	913.719.077,00	871.415.860,00	(42.303.217,00)	95,37
	Belanja Modal	504.790.000,00	501.509.000,00	(3.281.000,00)	99,35
33	KECAMATAN RANTAU RASAU	1.678.959.225,33	1.668.257.224,00	(10.702.001,33)	99,36
	Belanja Pegawai	525.490.000,00	525.490.000,00	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	808.269.225,33	797.756.724,00	(10.512.501,33)	98,70
	Belanja Modal	345.200.000,00	345.010.500,00	(189.500,00)	99,95
34	KECAMATAN NIPAH PANJANG	2.355.111.173,38	2.347.644.729,00	(7.466.444,38)	99,68
	Belanja Pegawai	826.725.000,00	826.665.000,00	(60.000,00)	99,99
	Belanja Barang dan Jasa	821.729.000,00	815.909.729,00	(5.819.271,00)	99,29
	Belanja Modal	706.657.173,38	705.070.000,00	(1.587.173,38)	99,78
35	KECAMATAN SADU	1.625.010.435,00	1.618.822.560,00	(6.187.875,00)	99,62
	Belanja Pegawai	470.060.000,00	470.060.000,00	-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	717.150.435,00	712.324.860,00	(4.825.575,00)	99,33
	Belanja Modal	437.800.000,00	436.437.700,00	(1.362.300,00)	99,69
36	DINAS KETAHANAN PANGAN	3.263.903.700,00	3.172.441.857,00	(91.461.843,00)	97,20
	Belanja Pegawai	717.975.000,00	711.135.000,00	(6.840.000,00)	99,05
	Belanja Barang dan Jasa	2.477.778.700,00	2.393.703.157,00	(84.075.543,00)	96,61
	Belanja Modal	68.150.000,00	67.603.700,00	(546.300,00)	99,20
37	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.016.899.440,00	3.938.323.660,00	(78.575.780,00)	98,04
	Belanja Pegawai	488.210.000,00	474.048.000,00	(14.162.000,00)	97,10
	Belanja Barang dan Jasa	3.200.032.940,00	3.136.399.860,00	(63.633.080,00)	98,01
	Belanja Modal	328.656.500,00	327.875.800,00	(780.700,00)	99,76
38	DINAS PERPUSTAKAAN, DAN KEARSIPAN	1.889.950.429,00	1.857.409.727,00	(32.540.702,00)	98,28
	Belanja Pegawai	406.525.000,00	398.825.000,00	(7.700.000,00)	98,11

No.	Uraian	Tahun 2018 (Rp)		Bertambah (Berkurang)	
		Target	Realisasi	(Rp)	%
	Belanja Barang dan Jasa	1.256.411.429,00	1.232.284.027,00	(24.127.402,00)	98,08
	Belanja Modal	227.014.000,00	226.300.700,00	(713.300,00)	99,69
39	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	15.773.443.750,00	14.897.183.652,00	(876.260.098,00)	94,44
	Belanja Pegawai	2.513.055.000,00	2.377.884.000,00	(135.171.000,00)	94,62
	Belanja Barang dan Jasa	12.554.488.750,00	11.825.063.137,00	(729.425.613,00)	94,19
	Belanja Modal	705.900.000,00	694.236.515,00	(11.663.485,00)	98,35
40	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	7.354.924.000,00	7.169.000.111,00	(185.923.889,00)	97,47
	Belanja Pegawai	1.530.799.500,00	1.511.146.000,00	(19.653.500,00)	98,72
	Belanja Barang dan Jasa	5.157.701.800,00	5.019.091.820,00	(138.609.980,00)	97,31
	Belanja Modal	666.422.700,00	638.762.291,00	(27.660.409,00)	95,85
41	DINAS PENGENDAIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.533.935.648,00	7.219.860.665,00	(314.074.983,00)	95,83
	Belanja Pegawai	890.600.000,00	840.278.000,00	(50.322.000,00)	94,35
	Belanja Barang dan Jasa	5.278.335.500,00	5.201.236.165,00	(77.099.335,00)	98,54
	Belanja Modal	1.365.000.148,00	1.178.346.500,00	(186.653.648,00)	86,33
42	DINAS PERIKANAN	6.147.675.400,00	5.925.242.412,00	(222.432.988,00)	96,38
	Belanja Pegawai	991.330.000,00	948.420.000,00	(42.910.000,00)	95,67
	Belanja Barang dan Jasa	5.063.175.400,00	4.885.072.412,00	(178.102.988,00)	96,48
	Belanja Modal	93.170.000,00	91.750.000,00	(1.420.000,00)	98,48
43	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	13.168.053.310,00	12.833.475.909,00	(334.577.401,00)	97,46
	Belanja Pegawai	590.375.000,00	546.900.000,00	(43.475.000,00)	92,64
	Belanja Barang dan Jasa	3.616.784.560,00	3.513.396.589,00	(103.387.971,00)	97,14
	Belanja Modal	8.960.893.750,00	8.773.179.320,00	(187.714.430,00)	97,91
	JUMLAH	662.421.561.307,94	616.482.085.076,00	(45.939.476.231,94)	93,06

* Data Sementara (unaudit) per tanggal 07 Maret 2019

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018. Laporan bab ini memberikan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan realisasinya, serta permasalahan solusi penyelesaian masalah. Secara umum bab ini terdiri dari :

1. Urusan pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2. Urusan pemerintahan Wajib Yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
4. Urusan Penunjang Pemerintahan
5. Urusan Pendukung Staf Kepala Daerah, Pendukung Staf DPRD;
6. Urusan Pemerintahan Umum, Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administrator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Program dan kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang Pemerintahan.

4.1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
2. Penyelenggaraan pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pembinaan pendidikan dasar dan menengah pertama;
4. Penyelenggaraan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pendidikan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Pendidikan. Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pada Tahun 2018 Dinas Pendidikan melaksanakan 11 (sebelas) program dan 101 (seratus satu) kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.068.813.372,00	2.035.455.997,00	(33.357.375,00)	98,38
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	702.000.000,00	609.689.450,00	(92.310.550,00)	86,85
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.750.000,00	15.750.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	210.200.000,00	209.200.000,00	(1.000.000,00)	99,52
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.000.000,00	13.000.000,00	-	100,00
7	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	3.234.750.000,00	3.233.212.000,00	(1.538.000,00)	99,95
8	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	56.865.662.000,00	56.936.642.900,00	70.980.900,00	100,12
9	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	3.497.345.500,00	3.466.379.405,00	(30.966.095,00)	99,11
10	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.480.443.900,00	5.405.613.900,00	(74.830.000,00)	98,63
11	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	342.181.758,00	342.181.758,00	-	100,00
JUMLAH		72.450.146.530,00	72.287.125.410,00	(163.021.120,00)	99,77

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang meliputi :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak 0-6 tahun tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi dan tahap perkembangannya serta sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya Pembangunan Sanitasi dan Air Bersih;

Rehabiltasi Sedang Berat Ruang Kelas; Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik; Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini; Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini; Pembangunan Gedung Baru; Bantuan Operasional Paud (BOP); Diklat Guru PAUD Berjenjang Tingkat Dasar; Pengadaan Alat Peraga Pendidikan; Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan dari Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain : Penambahan Ruang Kelas Sekolah; Pembangunan Taman Lapangan Upacara Dan Fasilitas Parkir; Pembangunan Perpustakaan; Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Sekolah; Pengadaan Meubelair Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah; Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru, Dan Penjaga Sekolah; Pelatihan Penyusunan Kurikulum; Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS SD/SMP); Penyelenggaraan Paket A; Penyelenggaraan Paket B; Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa; Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan; Pembinaan Sekolah Sehat/Berwawasan; Pengadaan Buku Kepustakaan; Penyelenggaraan Ujian Nasional /UN (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar; Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembangunan Taman Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembangunan Ruang UKS (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembangunan Perpustakaan (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembangunan Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pengadaan Meubelair Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP); Rehabilitas Sedang/Berat Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP); Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala, Guru dan Penjaga Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP); Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Pembinaan SD/SMP); Penyelenggaraan Ujian Sekolah/US (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pembinaan Sekolah Sehat/berwawasan (Bidang Pembinaan SD/SMP), KKG (Bidang Pembinaan SD); Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pengadaan Buku Kepustakaan (Bidang Pembinaan SD/SMP); Pengadaan Peralatan Pendidikan (Bidang

Pembinaan SD/SMP); Pengadaan Media Pendidikan (Bidang Pembinaan SD/SMP); Penabuhan Ruang Kelas Sekolah (Bidang Pembinaan SD/SMP).

c. Program Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan atau sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai keterampilan yang dimiliki. Adapun untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal; Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal; Pembinaan Pendidikan Kursus Dan Kelembagaan; Pengembangan Pendidikan Keaksaraan; Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup; Pengembangan kurikulum Bahan Ajar dan Model; Pembelajaran PAUD dan Dikmas; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; Penyelenggaraan Paket C; Penyelenggaraan Paket B; Penyelenggaraan Paket A; Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); Pengadaan Buku Perpustakaan.

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kualitas atau Mutu Pendidik sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dilaksanakanlah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik; Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan; Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG); Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi PTK; Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (BOS); Pembinaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pembinaan Kelompok Guru Pembelajar; BOS Pengganti Komite (APBD).

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan melalui kegiatan Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan; Penyelenggaran Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang berbagai isu Pendidikan; Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; Penyusunan Perencanaan Dan Program; Pegelolaan dan Pengembangan Dapodik; Penyusunan Profil Pendidikan.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
 Capaian Program Dinas Pendidikan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	60%	64,08
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka rata-rata lama sekolah	6,64 Tahun	6,38 Tahun*
		Harapan Lama Sekolah	11,34 Tahun	11,80
		APM SD /Sederajat	97,11%	97,51%
		APM SMP /Sederajat	84,26%	84,32%
		APK SD /Sederajat	112,95%	111,76%
		APK SMP /Sederajat	92,31%	98,46%
		Angka Partisipasi Sekolah SD	104,44%	98,00%
		Angka Partisipasi Sekolah SMP	84,92%	105%
		Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SD tidak melebihi 32 siswa	89,25%	90,25%
		Persentase peserta didik dalam tiap rombel untuk SMP tidak melebihi 36 siswa	98,11%	100%
		Disetiap SMP Tersedia Ruang Labor IPA yang dilengkapi dengan meja kursi untuk 36 siswa dan minimal 1 set peralatan IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	19,99%	80%
		Disetiap SD tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	22,55%	21,22%
		Di setiap SMP tersedia satu ruang guru dan ruang kepala sekolah yang terpisah	46,66%	71,11%
		Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SD	72,47%	72,98%
		Meningkatnya kondisi baik ruang kelas SMP	63,30%	65,51%
		Sekolah Rujukan SD	4 Sekolah	1 Sekolah
		Sekolah Rujukan SMP	2 Sekolah	1 Sekolah
		Persentase penjaringan siswa SD setingkat	100%	100%
		Persentase sekolah yang telah menerapkan kurikulum	75%	100%
		Persentase Sekolah Dasar yang ber Akreditasi minimal B	35,92%	57,00%
		Persentase Sekolah Menengah Pertama yang ber Akreditasi minimal B	44,44%	60%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
3	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	97,38%	98,49%
		Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket A setara SD	84 orang	113 orang
		Menyelenggarakan Program Pendidikan Paket B setara SMP	100 orang	474 orang
		Menfasilitasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Paket C setara SMA	360 orang	835 orang
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,85%	91%
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rasio guru/murid SD sederajat	61,21%	85%
		Rasio guru/murid SMP sederajat	59,47%	67,97%

*Angka sementara

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Angka Melek Huruf mencapai 98,49% yang artinya bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk usia diatas 15 tahun keatas sebagian besar telah dapat membaca dan menulis, ini merupakan modal dasar bagi daerah untuk mentransformasi pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Masyarakat akan dapat membaca informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya masyarakat mampu menjadi subjek pembangunan dan memiliki peran untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan. Angka melek huruf di 11 kecamatan sebesar 98,49%, angka melek huruf terendah di kecamatan Mendahara Ulu yaitu 97,47% sedang tertinggi di kecamatan Rantau Rasau dan Muara Sabak Timur yaitu 99,96%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3.
Angka Melek Huruf Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Usia 15 Th yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 th Keatas	Angka Melek Huruf (%)	Angka Melek Huruf
1	Muara Sabak Barat	11.442	11.592	98,71	11.442
2	Muara Sabak Timur	23.056	23.066	99,96	23.056
3	Mendahara	18.326	19.032	96,29	18.326
4	Mendahara Ulu	11.232	11.524	97,47	11.232
5	Geragai	15.826	16.131	98,11	15.826
6	Dendang	10.628	10.829	98,14	10.628
7	Kuala Jambi	10.125	10.310	98,21	10.125
8	Sadu	8.985	8.998	99,86	8.985
9	Nipah Panjang	18.162	18.619	97,55	18.162
10	Berbak	7.014	7.018	99,94	7.014
11	Rantau Rasau	17.150	17.157	99,96	17.150

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Pembebasan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar di kabupaten yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 memberi dampak yang cukup bermakna, hal ini ditunjukkan dengan persentase penduduk yang mengikuti dan menamatkan SD, SMP selalu diatas 95%.

Tabel 4.4.
Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018

NO	Uraian	2018		
		Peserta	Siswa Lulus	%
1	SD/M1	4.017	4.017	100
2	SMP/MTs	3.485	3.485	100

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel 4.5.
Persentase Siswa yang Melanjutkan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2018

NO	Uraian	Siswa Lulus	Siswa Melanjutkan	%
1	SD ke SMP	4.017	3.938	98,03
2	SMP Ke SMA	3.376	3.242	93,03

Sumber : LKPJ Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari berbagai kombinasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2018, tergambar capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6.
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi
1	Rasio ketersediaan sekolah SD/penduduk usia sekolah	94,27%
2	Rasio ketersediaan sekolah SMP/penduduk usia sekolah	65,87%
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,19%
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,59%
5	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
6	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98,03%
8	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93,03%
9	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	91%
10	Persentase Rasio Ideal rombel SD	90,25%
11	Persentase Rasio Ideal rombel SMP	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai

strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Perluasan Jangkauan pelayanan dan daya tampung semua jalur dan jenjang pendidikan;
2. Peningkatan Mutu Pendidikan;
3. Penuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun;
4. Peningkatan prestasi siswa SD dan SMP;
5. Pelaksana kerjasama kelembagaan dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan.

4.2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kapbupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Kesehatan. Pada Tahun 2018 Dinas Kesehatan melaksanakan 21 (dua puluh satu) program dan 114 (seratus empat belas) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kesehatan tertera dalam tabel 4.7 dibawah ini.

Tabel 4.7.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2018

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.054.033.650,00	1.982.538.854,00	(71.494.796,00)	96,52
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	418.600.000,00	352.392.620,00	(66.207.380,00)	84,18
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	37.800.000,00	37.500.000,00	(300.000,00)	99,21
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	208.204.000,00	205.557.269,00	(2.646.731,00)	98,73
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	7.386.000,00	7.386.000,00	-	100,00
6	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.520.158.000,00	2.449.511.375,00	(70.646.625,00)	97,20
7	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.659.436.500,00	7.492.981.282,00	(1.166.455.218,00)	86,53

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
8	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	206.158.500,00	184.420.500,00	(21.738.000,00)	89,46
9	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	88.495.500,00	84.740.500,00	(3.755.000,00)	95,76
10	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	288.515.000,00	257.114.800,00	(31.400.200,00)	89,12
11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	554.157.000,00	500.301.950,00	(53.855.050,00)	90,28
12	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN	152.060.000,00	152.060.000,00	-	100,00
13	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	5.345.755.000,00	2.963.451.207,00	(4.009.074.167,00)	55,44
14	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN	13.800.000,00	13.300.000,00	(500.000,00)	96,38
15	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN ANAK	165.421.000,00	156.451.000,00	(8.970.000,00)	94,58
16	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	799.856.500,00	785.897.401,00	(13.959.099,00)	98,25
17	PROGRAM PENGEMBANGAN KESEHATAN	554.277.500,00	531.108.749,00	(23.168.751,00)	95,82
18	PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL	6.060.688.960,00	5.262.917.644,00	(797.771.316,00)	86,84
19	PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)	11.051.781.000,00	10.503.879.975,00	(547.901.025,00)	95,04
20	PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)	2.425.340.000,00	560.374.700,00	(1.864.965.300,00)	23,10
21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	254.488.500,00	238.300.855,00	(16.187.645,00)	93,64
JUMLAH		41.866.412.610,00	34.722.206.701,00	(7.144.205.909,00)	82,94

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 16 (enam belas) program teknis yang meliputi :

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Obat-Obatan; Sosialisasi, Pembinaan Dan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya; Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik; Penyediaan

Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Lambur; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Dendang; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Mendahara; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Berbak; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut; Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah; Penyediaan Biaya Operasional Dan Pemeliharaan Instalasi Farmasi; Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan.

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat; Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat; Pembinaan Desa Siaga; Pemutakhiran data program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga (PIS-PK); Peningkatan Penjaringan Kesehatan Siswa SD/MI.

d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin; Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi; Koordinasi dan Konsolidasi pelaksanaan Posyandu.

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat (P2WKSS); Pengawasan Kwalitas Air Minum; Sosialisasi Kebijakan Kesehatan Lingkungan.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta,

TB, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan neoplasma. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah; Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular; Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik; Peningkatan Surveillance Epidemiologi; Penanggulangan Wabah.

g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat penduduk miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Katarak; Pelayanan Kesehatan Masyarakat Daerah Terpencil (DPTK).

h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Puskesmas; Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas.

i. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Program ini bertujuan untuk menjamin kesehatan makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga serta obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan, Pembinaan Dan Pengawasan Keamanan Makanan Hasil Industri Rumah Tangga.

j. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP); Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja; Pelatihan Manajemen PWS KIA Bagi Bidan Desa.

k. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Manajemen Dan Kebijakan Kesehatan; Peningkatan Perencanaan

Puskesmas; Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten; Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Kesehatan Terpadu.

I. Program Pengembangan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk lebih memperluas jangkauan pola hidup sehat yang ada di masyarakat, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Yang Terkena Gangguan Jiwa; Peningkatan Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Puskesmas; Penggalangan Palang Merah Indonesia.

m. Program Jaminan Kesehatan Nasional

Program ini merupakan upaya pemerintah dalam menjamin seluruh lapisan masyarakat untuk mendapat kepastian dalam fasilitas kesehatan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Barat; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Pandan; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simpang Tuan; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Muara Sabak Timur; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Simbur Naik; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lambur; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kampung Laut; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Dendang; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Rantau Rasau; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Tering; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nipah Panjang; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mendahara; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pangkal Duri; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Berbak; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Lokan; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sungai Jambat; Penyediaan Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Air Hitam Laut.

n. Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Barat; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Pandan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Simpang Tuan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muara Sabak Timur; Penyediaan Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas Simbur Naik; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lambur; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Laut; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dendang; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rantau Rasau; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Tering; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Nipah Panjang; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mendahara; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkal Duri; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Berbak; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Lokan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Jambat; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Air Hitam Laut; Penyediaan Biaya Operasional Pengelola BOK Kabupaten.

o. Program Jaminan Persalinan (Jampersal)

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Jaminan Persalinan Kesehatan Kabupaten.

p. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Pencegahan dan Pengendalian Penyalahgunaan NAPZA; Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Posbindu

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8.
Capaian Program Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	96%	93,01%
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penerima JAMKESDA yang terintegrasi dengan BPJS	2.000 orang	5.201 orang
3	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga PHBS	55%	60%
		Jumlah Desa Siaga Aktif	51 desa	37 desa
		Jumlah posyandu	282 unit	286 Unit
		Indeks kepuasan masyarakat	72,09	83,33
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	0,56	0,63
		Pervelensi kurus dan sangat kurus pada anak balita	12	4,44
		Persentase gizi balita buruk yang mendapat perawatan	100%	100%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	67%	100%
		Persentase ASI Eksklusif	57%	65,29%
		Pervelensi pendek dan sangat pendek	33	23
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	57%	72%
		Cakupan desa terhadap sanitasi layak	30%	11,82%
6	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan TB BTA+	80%	58,3%
		Cakupan penemuan dan penanganan DBD	100%	100%
		Cakupan desa/kelurahan UCI	96%	92,5%
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	97,5%	95,4%
		Cakupan desa/kelurahanyang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%
7	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	40%	55%
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien masyarakat Miskin	23%	12,41%
8	Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas	18 unit	17 unit
		Jumlah Puskesmas Rawat Inap	9 unit	10 unit
		Jumlah Pustu	60 unit	59 unit
		Jumlah Polindes	29 unit	30 unit
9	Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan	Persentase Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	55%	42,52%
10	Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan Anak	Jumlah Kematian Ibu	5 orang	4 Orang
		Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21 orang	21,92 Orang
11	Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase ketersediaan profil kesehatan	100%	100%
		Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	85%
12	Program Pengembangan Kesehatan	Persentase kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi	47%	100%
13	Program Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase kepesertaan jaminan kesehatan (JKN)	78,5%	57,9%
14	Program Bantuan Operasional Kesehatan (Bok)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK	17 Puskesmas	17 Puskesmas

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
15	Program Jaminan Persalinan (Jampsersal)	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,5%	45,96%
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR)	10%	21,08%
		Prevalensi tekanan darah tinggi	23,90%	24,96%
		Prevalensi obesitas pada penduduk 18+ tahun	11,3%	32,29%
		Prevalensi merokok penduduk usia < 18 tahun	20%	49%

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada indikator sasaran yaitu :

Tabel 4.9.
Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Daerah	Target	Capaian
1	Angka Usia Harapan Hidup	65,55 Tahun	65,69 Tahun
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (KH)	21/1000 KH	21.92/ 1000 KH
3	Angka kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup (KH)	21,5/1000 KH	21.65/ 1000 KH
4	Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	83%	91,09%
5	Cakupan kunjungan balita	75%	90,51%
6	Cakupan Kunjungan bayi	85%	94,17%
7	Cakupan pelayanan nifas	96%	91,08%
8	Prevalensi Penyakit Kusta/10.000 penduduk	2,5/10.000 Penduduk	2.0/ 10.000 Penduduk
9	Angka Kesembuhan TB Paru BTA+	94%	91,5%
10	Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan	9	10
11	Jumlah Apoteker	-	15
12	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (K4)	95%	91,01%
13	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan persalinan di fasilitas kesehatan sesuai standar	60%	45,96%
14	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	98,7%	98,3%
15	Persentase anak usia 0-59 bln yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	90%	90,51%
16	Persentase ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan	60%	98%
17	Persentase penderita TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	70%	100%
18	Cakupan Peserta KB Aktif	-	109,84%
19	Persentase penderita hipertensi mendapat pengobatan secara teratur	60%	49,9%

No	Indikator Kinerja Daerah	Target	Capaian
20	Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih	72%	72%
21	Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	96%	97,17%
22	Persentase WNI usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	60%	12,17%
23	Persentase WNI usia 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	86%	9,42%
24	Persentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	60%	20,6%
25	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar	30%	60,5%

Sumber : LKPJ Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

1. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya karena masih terbatasnya kualitas SDM kesehatan untuk menjalankan program – program yang telah di rencanakan;
2. Jumlah tenaga medis dan tenaga farmasi serta gizi di puskesmas masih kurang;
3. Kondisi geografis yang mengakibatkan masih tingginya berbagai mobilitas penyakit seperti filariasis, malaria dan DBD;
4. Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan di puskesmas sehingga untuk mendapatkan data masih sulit;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan;
2. Mengusulkan penerimaan CPNSD dan PTT tenaga kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian Kesehatan, penempatan dokter dan tenaga farmasi serta gizi di puskesmas;
3. Mencegah mata rantai penularan penyakit melalui nyamuk dengan fogging, abatesasi dan penyuluhan, sedangkan yang sudah terkena dilakukan pengobatan sesuai dengan program;
4. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada puskesmas tentang sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas;
5. Melakukan sosialisasi untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang PHBS.

4.3. RSUD Nurdin Hamzah

RSUD Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RSUD Nurdin Hamzah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;
2. Penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis;
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan ;
4. Penyelenggaraan layanan rujukan;
5. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah;
7. Pelaksanaan administrasi Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Kesehatan. Pada Tahun 2018, RSUD Nurdin Hamzah melaksanakan 13 (tiga belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja RSUD Nurdin Hamzah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.10.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	8.274.165.777,00	8.050.504.814,00	(223.660.963,00)	97,30
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.676.429.521,32	1.648.918.346,00	(27.511.175,32)	98,36
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	268.400.000,00	255.960.031,00	(12.439.969,00)	95,37
4	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	9.940.000,00	9.305.000,00	(635.000,00)	93,61
5	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT	48.700.000,00	48.700.000,00	-	100,00
6	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	182.926.000,00	182.495.619,00	(430.381,00)	99,76
7	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	15.822.924.968,00	13.486.583.588,00	(2.336.341.380,00)	85,23
8	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	160.000.000,00	159.768.037,00	(231.963,00)	99,86
9	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	579.071.000,00	572.830.322,00	(6.240.678,00)	98,92

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
10	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	251.421.000,00	250.324.855,00	(1.096.145,00)	99,56
11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI RUMAH SAKIT	27.285.000,00	21.550.000,00	(5.735.000,00)	78,98
12	PROGRAM RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI (RSIB)	18.659.000,00	18.656.500,00	(2.500,00)	99,99
13	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44.325.000,00	44.190.483,00	(134.517,00)	99,70
JUMLAH		27.364.247.266,32	24.749.787.595,00	(2.614.459.671,32)	90,45

Sumber : LKPJ RSUD NH Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 3 (tiga) program rutin dan 10 (sepuluh) program teknis yang meliputi :

a. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program ini ditujukan untuk mencapai penggunaan obat yang rasional. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan.

b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mengembangkan media promosi kesehatan di RSU Nurdin Hamzah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.

c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan.

d. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Tujuan dari program ini adalah Pengembangan Tipe Rumah Sakit dengan penambahan peralatan kesehatan serta pemenuhan bahan medis pakai habis dan Obat-obatan dan sarana rujukan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit, Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit; Pengadaan Obat-Obatan; Pengadaan Bahan-Bahan Logistik; Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit; Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah; Pengembangan Tipe Rumah Sakit.

e. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk menjaga atau memelihara aset rumah sakit, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.

f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan.

g. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Program ini bertujuan untuk melaksanakan strategi manajemen guna upaya peningkatan manajerial pelayanan rumah sakit, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Manajemen Dan Kebijakan Kesehatan; Pemutakhiran Data Kesehatan Kabupaten; Peningkatan Monitoring Dan Evaluasi Kesehatan Terpadu; Peningkatan Perencanaan Rumah Sakit; Penyusunan PPK BLUD.

h. Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit melalui pertemuan sehingga dihasilkan rekomendasi penanganannya. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit.

i. Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSIB)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan Bayi. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Upaya Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi.

j. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.11.
Capaian Program RSUD Nurdin Hamzah
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemberian informasi obat (PIO)	100%	93,61%
2	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	72,07	72,08
3	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana	100%	100%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		kesehatan (RS) di kab/kota		
		BOR (Bed Occupancy Rate)	30,24	30,95
		ALOS (Average Length Of Stay)	2,76 Hari	3 Hari
		BTO (Bed Turn Over)	38,67 Kali	46 kali
		TOI (Turn Over Interval)	7,45 hari	6 hari
		NDR (Net Death Rate)	0,0012	0,01155
		GDR (Gross Death Rate)	0,0007	0,04022
4	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit kategori Kelas "C"	93%	90%
5	Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana RSUD	73%	75%
6	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan	100%	100%
7	Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan	100%	100%
8	Program Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi	Persentase pelaksanaan PPI	100%	100%
9	Program Rumah Sakit Sayang Ibu Dan Bayi	Persentase pelaksanaan RSIB	100%	100%
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Komite Rumah Sakit	3	3

Sumber : LKPJ RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Jumlah data pasien yang mendapatkan pelayanan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.12.
Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan
RSU Nurdin Hamzah Tahun 2017-2018

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien (orang)	
		2017	2018
1	Instalasi Gawat Darurat	4.583	4.368
2	Poliklinik Penyakit Dalam	2.069	2776
3	Poliklinik Anak	846	903
4	Poliklinik Kebidanan	2.117	2.852
5	Poliklinik Umum	74	49
6	Poliklinik gigi	438	188
7	Poliklinik Bedah	1.159	1.078
8	Poliklinik THT	646	597
9	Poliklinik Mata	1.033	1063
10	Poliklinik Paru	772	756

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pasien (orang)	
		2017	2018
11	Poliklinik Syaraf	836	911
12	Rawat Inap Penyakit Dalam	466	460
13	Rawat Inap Kebidanan	431	519
14	Rawat Inap Anak	272	236
15	Rawat Inap Bedah	836	591
16	Rawat Inap VIP	292	252
17	Perinatologi	154	252
18	ICU	116	126
19	Paru	-	75
Jumlah		17.142	18.052

Sumber : LKPJ RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Tabel 4.13.
Jumlah Pasien Perbulan RSU Nurdin Hamzah
Tahun 2017-2018

No.	Bulan	Jumlah Pasien (orang)	
		2017	2018
1	Januari	1.249	1.827
2	Februari	1.213	1.518
3	Maret	1.277	1.611
4	April	1.217	1.542
5	Mei	1.331	1.516
6	Juni	962	1.037
7	Juli	1.552	1.575
8	Agustus	1.581	1.405
9	September	1.478	1.369
10	Oktober	1.737	1.652
11	November	1.918	1.501
12	Desember	1.627	1.499
Jumlah		17.142	18.052

Sumber : LKPJ RSU Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel 4.14.
Jumlah Pasien Menurut Jenis Pelayanan
RSU Nurdin Hamzah Tahun 2017-2018

No.	Jenis Pelayanan	2017	2018
1	Rawat Jalan	14.575	15.541
2	Rawat Inap	2.567	2.511
	Jumlah	17.142	18.052

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Berikut kinerja pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 4.15 dibawah ini :

Tabel 4.15.
Data Efisiensi Pelayanan RSU Nurdin Hamzah Tahun 2018

Indikator Pelayanan	Capaian	Angka Ideal
Bor (Bed Occupancy Rate)	30,95%	60-85%
ALOS (Average Length Of Stay)	3 Hari	6-9 Hari
BTO (Bed Turn Over)	46 kali	50 Kali
TOI (Turn Over Interval)	6 hari	1-3 hari
NDR (Net Death Rate)	0,01155	Tidak Lebih dari 55/1000
GDR (Gross Death Rate)	0,04022	< 25/1000

Sumber : LKPJ RSUD Nurdin Hamzah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

8.4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan;
3. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air;
4. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan 15 (lima belas) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pekerjaan Umum tertera dalam tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.307.124.550,00	1.885.274.022,00	(421.850.528,00)	81,72
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3.372.375.450,00	3.212.701.058,00	(159.674.392,00)	95,27
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	57.000.000,00	48.700.000,00	(8.300.000,00)	85,44
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	166.500.000,00	162.250.000,00	(4.250.000,00)	97,45
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.800.000,00	30.386.000,00	(414.000,00)	98,66
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.800.000,00	11.800.000,00	(1.000.000,00)	92,19
7	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	199.527.643.000,00	179.115.169.129,00	(20.412.473.871,00)	89,77
8	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	7.778.930.000,00	7.665.954.000,00	(112.976.000,00)	98,55
9	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	8.299.727.000,00	7.441.276.686,00	(858.450.314,00)	89,66
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	28.918.000.000,00	27.144.512.500,00	(1.773.487.500,00)	93,87
11	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	2.018.200.000,00	1.791.635.619,00	(226.564.381,00)	88,77
12	PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG	72.000.000,00	59.510.000,00	(12.490.000,00)	82,65
13	PRORAM PEMANFAATAN TATA RUANG	204.850.000,00	162.615.954,00	(42.234.046,00)	79,38
14	PRORAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI	195.550.000,00	176.150.000,00	(19.400.000,00)	90,08
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	216.250.000,00	200.923.000,00	(15.327.000,00)	92,91
JUMLAH		253.177.750.000,00	229.108.857.968,00	(24.068.892.032,00)	90,49

Sumber : LKPJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis yang meliputi :

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan; Pembangunan Jembatan; Perencanaan Jalan; Perencanaan Jembatan; Pengawasan Jalan; Pengawasan Jembatan.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program ini dimaksudkan untuk membangun saluran drainase dan gorong-gorong guna meningkatkan daya tampung limpahan air permukaan dan mengurangi kawasan genangan air. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong; Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong; Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan alat berat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat berupa Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-Alat Berat.

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur irigasi dan pengairan dalam kondisi baik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.

e. Program Pemanfaatan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk pemanfaatan dokumen perencanaan tata ruang dalam pengembangan infrastruktur wiayah dan kawasan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi penataan ruang kabupaten Tanjung Jabung Timur.

f. Program Pengendalian Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian kesesuaian kegiatan pembangunan di daerah dengan RTRW Kabupaten. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi tata ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

g. Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap angkatan kerja bidang jasa konstruksi. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Bintek dan Pelatihan jalan dan jembatan, Sistem informasi pembinaan jasa konstruksi.

h. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Master Plan ruang terbuka hijau Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Finalisasi dan Legislasi revisi perda RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penyusunan dokumen perencanaan dan pengembangan kawasan permukiman dan perumahan (RP3KP), Penyusunan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan, finalisasi materi teknis dan draft ranperda rencana detail tata ruang perkotaan kecamatan kabupaten Tanjung Jabung Timur.

i. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja di bidang jasa konstruksi. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan

Bintek CCO jasa teknis dalam pelaksanaan konstruksi, sosialisasi jasa konstruksi standar manajemen mutu, bintek dan pelatihan ke PU-an.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.17.
Capaian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten (Km)	997,88 Km	1.177,77 Km
		Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap	80,07%	72,71 %
		Persentase jalan Kabupaten menuju Sentra produksi kondisi mantap	62,64%	72,71%
		persentase jembatan dalam kondisi baik (%)	29,58%	30,29 %
		Panjang ruas jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD balai peralatan dan perbekalan (Km)	100 Km	104,6 Km
2	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	luas kawasan banjir yang tertangani (drainase)	12 Km	16 Km
		Panjang saluran draenase perkotaan	7 Km	1,4 Km
3	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Pengadaan Alat Berat	3 unit	0 Unit
		Persentase Alat Berat dalam kondisi baik	100%	100 %
4	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	Peningkatan jumlah infrastruktur Irigasi	135 Km	138,75 Km
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	74,45%	77,56 %
5	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang tertangani	100%	100%
6	Program Pemanfaatan Tata Ruang	Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%	100%
7	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian kegiatan pembangunan terhadap tata ruang	100%	100%
8	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase angkatan kerja bidang konstruksi yang disertifikasi profesi	80%	80%
9	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kecamatan yang dibina	2 Kec	2 Kec

Sumber : LKPJ Dinas PUPR Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2018 dalam aspek Belanja Langsung adalah :

1. Terbatasnya alokasi anggaran untuk kegiatan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi, sehingga capaian yang telah ditetapkan mengalami hambatan dalam pencapaian target;
2. Terbatasnya alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat (DAK) sehingga beberapa kegiatan fisik infrastruktur mengalami penundaan;
3. Kurangnya sumberdaya manusia, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal.

Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2018 dalam aspek Belanja Langsung adalah :

1. Menganggarkan program prioritas yang diutamakan untuk dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia;
2. Mengupayakan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan;
3. Mengusulkan penambahan sumberdaya manusia baik dari tenaga Aparatur Sipil Negara yang besertifikasi maupun tenaga honorer yang berkualitas.

8.5. Dinas Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
3. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
4. penyelenggaraan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
5. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;

6. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Tahun 2018, Dinas Perumahan dan Permukiman melaksanakan 12 (dua belas) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perumahan dan Permukiman tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.18.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perumahan dan Permukiman
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.287.580.100,00	2.123.084.643,00	(164.495.457,00)	92,81
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	7.998.101.497,00	7.569.279.750,00	(428.821.747,00)	94,64
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	54.050.000,00	52.534.000,00	(1.516.000,00)	97,20
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	94,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	92.800.000,00	75.880.000,00	(16.920.000,00)	81,77
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.700.000,00	6.490.000,00	(7.210.000,00)	47,37
7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	549.350.000,00	543.262.000,00	(6.088.000,00)	98,89
8	PROGRAM PEMBANGUNAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	8.622.650.000,30	8.444.341.418,00	(178.308.582,00)	97,93
9	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	12.413.866.976,00	12.316.479.494,00	(97.387.482,00)	99,22
10	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH	1.615.800.000,00	1.587.684.700,00	(28.115.300,00)	98,26
11	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	2.982.842.800,00	2.857.815.000,00	(125.027.800,00)	95,81
12	PROGRAM PENERANGAN LAMPU KOTA	3.290.725.800,00	3.469.578.000,00	(424.147.800,00)	105,44
	JUMLAH	40.601.467.173,00	39.120.429.005,00	(1.481.038.168,00)	96,35

Sumber : LKPJ Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 6 (enam) program teknis yang meliputi :

a. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah.

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Operasional UPTD Sistem Penyediaan Air Minum

c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan; Pembangunan perumahan dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk menata lingkunga permukiman yang mempunyai sanitasi yang layak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan; Percepatan Sanitasi Pemukiman Daerah.

e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program ini dimaksudkan dalam upaya pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga lebih asri, sejuk dan berestetika. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Pemeliharaan dan Pengawasan Hutan Kota dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan.

f. Program Penerangan Lampu Kota

Program ini bertujuan untuk menata dan memelihara lingkungan permukiman yang mempunyai penerangan kota teraliri listrik yang merata. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemasangan Lampu Taman dan Hutan Kota, Pemeliharaan rutin/berkala lampu taman.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19.
Capaian Program Dinas Perumahan dan Permukiman
Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih	57%	72,40%
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Persentase Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik	32%	22,86%
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Taman yang terbangun	67%	67%
5	Program Penerangan Lampu Kota	Persentase titik lampu yang terpasang	30,58%	0,36%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
6	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	65,09%	44,19%

Sumber : LKPJ Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20.
Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian Indikator Kinerja	Capaian
1	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat	60,80%
2	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	350 Unit
3	Panjang Jalan Lingkungan (Jerambah beton)	7,23 Km
4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan	44,19%

Sumber : LKPJ Dinas Perumahan dan Perukiman Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Penyebaran penduduk yang tidak merata, hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan jaringan pipanisasi air minum karena untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari ibukota kecamatan dan desa maka diperlukan pipa yang sangat panjang, hal ini kurang memungkinkan karena akan menambah biaya operasional dan juga akan mengurangi debit dari suplay air minum itu sendiri yang berakibat pada kuantitas dan kualitas air minum yang diterima oleh masyarakat kurang baik dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
2. Terbatasnya anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya
Kurang SDM yang memiliki kemampuan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.

8.6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Daerah;
4. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. penyelenggaraan pemandaman kebakaran dan penyelamatan masyarakat;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
7. pelaksanaaadministras Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Bupati

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat*. Pada Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tertera dalam tabel 4.21 dibawah ini.

Tabel 4.21.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.589.505.415,00	2,386,022,594,00	(203.482.821,00)	92,14
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	773.083.191,28	688,839,025,00	(84.244.166,28)	89,10
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	273.505.000,00	253,442,000,00	(20.063.000,00)	92,66
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	255.158.000,00	206,724,880,00	(48.433.120,00)	81,02
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	10.800.000,00	3,245,000,00	(7.555.000,00)	30,05
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27.955.000,00	25,780,000,00	(2.175.000,00)	92,22
7	PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	164.320.000,00	149,195,000,00	(15.125.000,00)	90,80
8	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	698.449.000,00	686.276.964,00	(11.839.536,00)	98,26
9	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN UMUM, SERTA PENEGAKAN PERDA DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	207.557.000,00	171.783.500,00	(35.773.000,00)	82,76
	JUMLAH	5.000.332.606,28	4.571.308.963,00	(428.023.643,28)	91,42

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di seluruh wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran; Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/Kecamatan; Patroli Lingkungan.

c. Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah

Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah merupakan program sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Tujuan dari program ini adalah menciptakan keadaan lingkungan yang kondusif dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengamanan Dan Pengawalan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-Orang Penting Dan Penjagaan Aset-Aset Daerah; Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah; Pengendalian Keamanan Lingkungan; Penataan Peraturan dan Perundang-undangan daerah.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.22.
Pencapaian Program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya jumlah RW yang melaksanakan siskamling menjadi 50 %	25%	20%
		Cakupan Rasio linmas untuk menunjang kegiatan siskamling (1 orang per RT)	50%	30%
		Mengintensifkan kegiatan patroli	3x1 hari	3x1 hari

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
2	Program Pemeliharaan Dan Penyelenggaraan Ketentraman Umum, Serta Penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah.	50%	50%
3	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	persentase cakupan WMK yang memiliki peralatan damkar	95%	93%
		persentase cakupan layanan kebakaran	90%	85%
		pesentase tanggap bencana/response time rate	65%	55%
		persentase satgas pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	70%	60%

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.23.
Kegiatan Penertiban Tahun 2018

No	K E G I A T A N		
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Pengisian Tabung Apar	1. Tabung apar 6 kilo	
	Perlengkapan rescue	1. 6 item	
	Peralatan rescue gedung	1. 3 item	
Pencegahan Pengendalian Kebakaran	Dan Bahaya	Pengecekan Inventarisasi sarana dan prasarana di pos pemadam kebakaran kecamatan	1. Mendaraha 2. Geragai 3. Mendaraha Ulu 4. Dendang 5. Rantau Rasau 6. Nipah Panjang 7. Berbak 8. Muara Sabak Timur 9. Kuala Jambi
		Pendaatan dan Pengecekan Penggunaan Apar	1. Kuala Jambi
		Pengecekan Apar ke setiap organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya serta pelaku usaha	1. Sadu 2. Mendaraha 3. Geragai 4. Dendang 5. Muara Sabak Timur
		Pemadaman Kebakaran	1. Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang 2. Ds. Lagan Tengah Kec. Geragai 3. Nipah Panjang

No	K E G I A T A N		
			4. Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang 5. Ds. Telago Limo Kec. Berbak 6. Ds. Bhakti Idaman Kec. Mendahara 7. Ds. Sungai Toman Kec. Mendahara Ulu 8. Rantau Rasau 9. Desa Simbur Naik Kec. Muara Sabak Timur
Peningkatan Kapasitas Linmas Desa/Kelurahan/ Kecamatan	Pelatihan Linmas Desa/Kelurahan		1. Kec. Nipah Panjang
	Penyerahan Kartu Anggota Satlinmas dan Piagam Pelatihan Satlinmas Desa/ Kelurahan		1. Kec. Geragai
	Pembinaan peningkatan kesiapsiagaan Anggota Satlinmas Desa/ Kelurahan Kec. Dendang dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada Bulan Suci Ramadhan 1439 H		1. Kec. Dendang 2. Kec. Rantau Rasau 3. Kec. Geragai
	Koordinasi Mengenai data Satlinmas Desa/ Kelurahan Untuk Pengamanan Kotak Suara pada Pileg dan Pilpres Tahun 2019		1. Kec. Geragai 2. Kec. Muara Sabak Timur 3. Kec. Mendahara Ilir 4. Kec. Nipah Panjang
Patroli Lingkungan	Patroli roda 2 dan roda 4		Wilayah Kab. Tanjung Jabung Timur.
Operasi Penyakit Masyarakat dan Gangguan Keamanan Kenyamanan Lingkungan.	Razia Penyakit Masyarakat dan Gangguan Keamanan Kenyamanan Lingkungan.		Kec. Muara Sabak Barat s/d Kec. Geragai
Pengamanan Dan Pengawalan Kegiatan Pemerintah Daerah, Pejabat/Orang-Orang Penting Dan Penjagaan Aset-Aset Daerah	Pengamanan dan Pengawalan		1. Pengamanan Acara Tabligh Akbar / Safari Dakwah Ustadz Abdul Somad LC., M.A di Mesjid Agung Nur Addarojad Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2. Pengamanan Acara Kunjungan Kerja Gubernur Jambi ke Kab. Tanjung Jabung Timur dalam rangka Penyerahan Alat Berat Bantuan Gubernur Jambi Kepada Kecamatan Muara Sabak dan Geragai di Depan Mesjid Baiturrahman RT.06 Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur. 3. Pengamanan Acara Jambore Kader PKK Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 di Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. 4. Melaksanakan Pengamanan Bapak Bupati Tanjung Jabung

No	K E G I A T A N
	<p>Timur dalam rangka pengecekan lokasi acara peringatan HARGANAS, BBGRM, dan HKG Tingkat Provinsi Jambi di Kec. Geragai.</p> <p>5. Melaksanakan Pengamanan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka Pengukuhan Ketua HMM Kec. Dendang di Kec. Dendang</p> <p>6. Pengamanan Acara Sabak Bersepeda Tanjung Jabung Timur.</p> <p>7. Pengamanan Acara ADVENTURE Jelajah Alam Bukit Menderang Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>8. Pengamanan Acara Sosialisasi Pemilu di GOR oleh KPU Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>9. Pengamanan Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur beserta dalam rangka Kunjungan kerja kepala daerah dan Forkompinda pada Acara Safari Ramadhan 1439 H Tahun 2018 di Desa Majelis Hidayah Kec. Kuala Jambi</p> <p>10. Pengamanan Acara Pasar Tani di Gendung Bersama Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>11. Pengawalan Gerakan Pemuda Ansor Kab. Tanjung Jabung Timur Ke Kota Jambi dalam Rangka mengikuti kegiatan Apel Banser, Pawai Damai dan Istighosah di Kota Jambi</p> <p>12. Pengamanan Acara Pengecekan harga barang dan sembako di Pasar Tradisional Kec. Muara Sabak Barat oleh Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur.</p> <p>13. Pengamanan Acara Pasar Tani di Gendung Bersama Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>14. Pengamanan Acara Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka kunjung Bapak Bupati dan Pemerintah Provinsi Jambi ke Kec. Berbak.</p> <p>15. Pengamanan masalah lahan antara kelompok tani</p>

No	K E G I A T A N
	<p>suka maju dengan PT. Kaswari.</p> <p>16. Pengamanan Pada Acara Lancing Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan BUMDes Plus Bank Jambi Tingkat Kab. Tanjung Jabung Timur di BUMDes MUKTITAMA Desa Lambur II Kec. Muara Sabak Timur.</p> <p>17. Pengamanan Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka Panen Kedelai di Kec. Berbak Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>18. Pengawalan dan Pengamanan Ibu Bupati Tanjung Jabung Timur beserta rombongan dalam rangka kunjungan kerja ke Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>19. Pengamanan dalam Rangka pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Jambi</p> <p>20. Pengamanan acara lomba mancing dalam rangka peringatan HUT RI ke-73 Tahun 2018 Kab. Tanjung Jabung Timur di Taman PKK.</p> <p>21. Pengawalan dan Pengamanan Dalam Rangka Pelepasan Road Show Mobil Penerangan KB dari Kabupaten dan Kendaraan Roda dua Petugas KB di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Kecamatan Geragai menuju Kecamatan Nipah Panjang.</p> <p>22. Pengamanan acara launching pembangunan hutan kota muara sabak lokasi hutan kota muara sabak kel. Rano kec. Ma. Sabak barat.</p> <p>23. Pengamanan acara BBRGM tingkat provinsi jambi.</p> <p>24. Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Desa Sungai Toman Kec. Muara Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>25. Pengamanan Acara MTQ Tingkat Kab. Tanjung Jabung Timur di Kec. Dendang Kab. Tanjung Jabung Timur.</p>

No	K E G I A T A N
	<p>26. Pengamanan Acara Sabak Bersepeda Tour Berhala.</p> <p>27. Pengamanan Offroad yang dilaksanakan di Wilayah Sekitar Perkantoran.</p> <p>28. Pengamanan Jalan Santai yang dilaksanakan di KTM Geragai.</p> <p>29. Pengamanan Lomba Mancing dan finish Offroad di Taman PKK dan Kolam Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>30. Pengamanan Pembukaan Acara Bujang Gadis di Gedung PKK Kab. Tanjung Jabung Timur .</p> <p>31. Pengamanan Tabligh Akbar di Mesjid AGUNG NUR ADDAROJAD Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>32. Pengamanan Penutupan Acara Bujang Gadis di Gedung Bersama Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>33. Pengamanan Sidang Istimiwa dan Sabak Karnaval di Kantor Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>34. Pengamanan FASI di Mesjid AGUNG NUR ADDAROJAD Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>35. Pengamanan Malam Palu Donggala di Gedung Bersama .</p> <p>36. Pengamanan dan Pengawalan Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur Beserta Rombongan dalam rangka Panen Raya Jagung di Kec. Rantau Rasau Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>37. Pengamanan dan Pengawalan Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur Beserta Rombongan dalam rangka mandi Syafar di Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur.</p> <p>38. Pengamanan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kec. Dendang</p> <p>39. Pengamanan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Agung Nur Adarajat Dendang</p>

No	K E G I A T A N		
Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan dan Penertiban Kabupaten Tanjung Jabung Timur		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Geragai (2 kali) 2. Pasar Muara Sabak Barat 3. Pasar Desa Teluk Majelis Kuala Jambi 4. Pasar Kecamatan Dendang 5. Pasar Kecamatan Nipah Panjang 6. Pasar Dadakan Harganas Geragai 7. Pasar kelurahan Rano Muaara Sabak Barat 8. Penertiban PKL Pasar Muara Sabak Timur 9. Penertiban PKL Pasar Nipah Panjang 10. Penertiban lahan parkir Kecamatan Dendang 11. Pengawasan dan Pernertiban Galian C, penambang pasir illegal Kecamatan Berbak 12. Pengawasan Galian C Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu
	Penertiban Baliho, Papan Iklan, Banner dan Izin Reklame		<ol style="list-style-type: none"> 1. Muara Sabak Timur 2. Muara Sabak Barat 3. Nipah Panjang 4. Rantau Rasau 5. Dendang 6. Geragai 7. Mendahara 8. Mendahara Ulu 9. Kuala Jambi
	Razia Penegakan Disiplin Pegawai	1. Razia PNS Muara Sabak Barat (3 kali) 2. Razia PNS Geragai (3 Kali)	
	Razia Ternak	RSU Nurdin Hamzah Parit Culum I	

Sumber : LKPJ Satpol PP dan Damkar Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Adapun keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018 antara lain :

- a. Keadaan lingkungan yang relatif aman dari gangguan keramaian dan kebisingan
- b. Tingkat pelanggaran perda yang relative rendah.

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan Perda serta aset–aset Pemda yang ada di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan-pelatihan dan Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan Dasar (Diksar) dan pendidikan dan latihan (Diklat) serta Mensosialisasikan pentingnya penegakan Perda;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam usaha penegakan Peraturan Daerah;
4. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

8.7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
2. Penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan pengembangan wawasan kebangsaan;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan hubungan antar organisasi kemasyarakatan dan antar lembaga swadaya masyarakat;
4. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan demokrasi dan hubungan antar partai politik;
5. Penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan stabilitas politik serta kerukunan umat beragama dan masyarakat
6. Penyelenggaraan penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan politik;
8. Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *ketenteraman, ketertiban umum,*

dan pelindungan masyarakat. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, selama tahun 2018 telah dilaksanakan total 11 (sebelas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan.

Tabel 4.24.

Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	847.222.500,00	818.682.273,00	(28.540.227,00)	96,63
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	160.465.000,00	159.112.400,00	(1.352.600,00)	99,16
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	18.400.000,00	18.400.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	60.310.000,00	60.074.000,00	(236.000,00)	99,61
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	47.988.000,00	47.984.000,00	(4.000,00)	99,99
7	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	212.242.000,00	206.190.000,00	(6.052.000,00)	97,15
8	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	179.969.500,00	177.874.000,00	(2.095.500,00)	98,84
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	190.643.000,00	189.976.880,00	(666.120,00)	99,65
10	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	138.959.000,00	131.865.000,00	(7.094.000,00)	94,89
11	PROGRAM PERWUJUDAN PENGUATAN DEMOKRASI YANG MAKIN KOKOH	143.880.000,00	143.685.000,00	(195.000,00)	99,86
JUMLAH		2.030.079.000,00	1.983.843.553,00	(46.235.447,00)	97,72

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang meliputi :

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan meningkatkan pengamalan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang saat ini mulai menurun, hal ini ditandai dengan menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air, tergerusnya karakter/jati diri bangsa dan kearifan lokal, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dan menyebarnya ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa; Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan; Penguatan dan Pembinaan Revolusi Mental.

b. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan meningkatkan pengamalan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang saat ini mulai menurun, hal ini ditandai dengan menyebarnya ideologi/faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, meningkatnya radikalisme, terorisme dan konflik SARA. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB);

Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; Pendataan Ormas dan Rumah Ibadah.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggalnya. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Penanganan Konsflik Sosial; Pemetaan Potesi Konflik; Pemutakhiran data kepengurusan partai politik.

d. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota Partai Politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marginal dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Undang-Undang Bidang Politik; Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Situasi Politik Daerah; Pengembangan Kualitas Proses Politik bagi Pengurus Parpol.

e. Program Perwujudan Penguatan Demokrasi yang makin kokoh

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Pemilu No 7 Tahun 2017.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.25.
Pencapaian Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Aspek Kebebasan Sipil	90,55	97,15%
		Indeks Demokrasi Indonesia	76	-
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Indeks Kebebasan Berkeyakinan	93,85	98,51%
		Indeks Kebebasan dari Diskriminasi	83,89	99,32%
		Nilai RAD	65,15	-

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
4	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	Presentase Konflik yang difasilitasi	-	99,65%
5	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Indeks Aspek Hak-hak Politik	63,25	-
		Indeks aspek Lembaga Demokrasi	82,55	-
6	Program Perwujudan Penguatan Demokrasi yang makin kokoh	Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang ikut pemilu	-	99,86%

Sumber : LKPJ Badan Kesbangpol Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cendrung dinamis, beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya Personil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini dan juga sebagian personil yang kurang menguasai bidang tugasnya;
2. Kondisi ORMAS, LSM, PARPOL dan Organisasi lainnya keberadaan yang terpencar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaannya maupun untuk menghubungi yang berakibat belum tercapainya salah satu kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Masih terdapat rumah ibadah yang belum memiliki izin pendirian sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik antar umat beragama;
4. Masih terdapat tapal batas antar wilayah, hak guna lahan antara warga dan perusahaan yang belum terselesaikan sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik;

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang di hadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir masalah antara lain :

1. Menata dan Menginventarisir kembali keberadaan ORMAS/LSM/PARPOL dan organisasi lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi terhadap para tokoh agama dan tokoh masyarakat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala daerah dan

- Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama dan Pembangunan rumah Ibadat;
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyelesaian tapal batas antar wiiayah dan hak guna lahan antar warga dan perusahaan.

8.8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan pelatihan, penempatan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
3. Penyelenggaraan pembinaan hubungan industrial;
4. Penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pengembangan ketransmigrasian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraa urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Tenaga Kerja* dan Urusan Pilihan dengan Bidang Urusan *Transmigrasi*. Selama Tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 11 (sebelas) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.26.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.367.979.890,97	1.353.567.244,00	(14.412.646,97)	98,95
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.039.499.500,00	1.030.083.830,00	9.415.670,00)	99,09
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	55.950.000,00	55.950.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	44.000.000,00	43.950.000,00	(50.000,00)	99,89

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
	APARATUR				
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	111.925.000,00	111.134.950,00	(790.050,00)	99,29
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	30.100.000,00	30.020.000,00	(80.000,00)	99,73
7	PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	304.424.000,00	162.314.000,00	(142.110,00)	53,32
8	PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	223.125.000,00	221.162.540,00	(1.962.460,00)	99,12
9	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	105.917.500,00	99.167.700,00	(6.749.800,00)	93,63
10	PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	85.800.000,00	79.750.000,00	(6.050.000,00)	92,95
11	PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	2.082.537.750,00	1.541.531.450,00	(541.006.300,00)	74,02
	JUMLAH	5.451.258.640,97	4.728.631.714,00	(722.626.926,97)	86,74

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pelaksanaan kegiatan ini yaitu melaksanakan Pelatihan dari dana APBD Kabupaten dan Pelatihan dari dana APBD Provinsi, bertujuan memberikan pelatihan bagi pencari kerja dengan mengembangkan keahlian yang dimiliki.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

1.) Penyebarluasan Informasi bursa Tenaga Kerja

Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi bursa tenaga kerja kepada pencari kerja dengan memberikan informasi secara on line dan membuat spanduk atau leaflet.

2.) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan yang dimiliki. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melatih 50 orang (2 paket) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Dasawisma berupa Pelatihan Teknologi Tepat Guna dan Kewirausahaan.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu :

1.) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan dan masyarakat mengenai berbagai peraturan dalam pelaksanaan ketenagakerjaan.

2.) Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Kegiatan ini bertujuan memberikan fasilitas atau memberikan solusi pada perusahaan-perusahaan yang mengalami masalah dengan pemerintah, dengan perusahaan lain dan tenaga kerja.

d. Program Pembinaan Hubungan Industrial

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu Pembentukan/Pembinaan LKS BI, Tripartit; Survey Kebutuhan Hidup Layak.

e. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini yaitu:

- 1.) Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi;

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada kawasan transmigrasi, serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi pada kawasan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah membangun kawasan kebun buah skala setaraf Asia.

- 2.) Sosialisasi Sertifikasi Lahan Transmigrasi;
- 3.) Pemeliharaan kebun buah skala orchard/KTM;
- 4.) Pembinaan Mental spiritual KTM;
- 5.) Identifikasi lahan/lokasi transmigrasi.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.27.
Pencapaian Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	85%	100%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	75%	100%
2	Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	75%	100%
3	Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	UMR (IDR)	Rp. 2.200.000,00	Rp. 2.243.719,00
		Besaran Pencari Kerja yang terdaftar dan ditempatkan	80%	100%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
4	Pembinaan Hubungan Industrial	Jumlah Pertemuan	4 kali	2 Kali
		Jumlah Perusahaan yang telah membentuk Lembaga Bipartit	9 perusahaan	2 Perusahaan
		Jumlah Lembaga Tripartit yang dibentuk	1 Lembaga	0 Lembaga
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10 Kasus	2 Kasus
5	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Kawasan Eks Transmigrasi yang di Revitalisasi	2 Kawasan	2 Kawasan

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2017, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.28.

Capaian Kinerja Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian Indikator Kinerja	Capaian
1	Jumlah Penduduk Usia Kerja (15-58 th)	162.982 orang
2	Tingkat Pengangguran	1,85%

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan Program Kegiatan pada Tahun 2018, antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan infrastruktur/ tenaga ahli di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Kurangnya data pendukung guna sertifikasi lahan transmigrasi;
3. Minimnya sarana dan prasarana pendukung pada fasilitas umum yang telah dibangun pada pusat KTM Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seperti: jalan utama kawasan KTM dan jalan ke kebun buah yang belum diaspal, dan pemeliharaan gedung pusat bisnis dan gedung UPTD KTM.

Solusi yang bisa membantu dalam permasalahan yang terdapat Program Kegiatan Tahun 2018, antara Lain :

1. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis untuk instruktur di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Melaksanakan Kegiatan pengumpulan data - data guna sertifikasi atau ex. Trans yang telah memiliki sertifikat;
3. Terlibatnya instansi terkait dalam pembangunan fisik dan infrastruktur dalam pengembangan KTM Geragai.

8.9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
3. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan bencana yang diberikan oleh Bupati.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Sosial*. Pada Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 9 (sembilan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.29.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	507.220.334,00	489.274.294,00	(17.946.040,00)	96,46
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	282.565.000,00	274.932.113,00	(7.632.887,00)	97,30
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	27.200.000,00	26.000.000,00	(1.200.000,00)	95,59
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	41.400.000,00	40.364.300,00	(1.035.700,00)	97,50
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	68.545.000,00	68.517.500,00	(27.500,00)	99,96
6	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT	36.268.000,00	33.916.400,00	(2.351.600,00)	93,52
7	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA	192.153.000,00	187.612.780,00	(4.540.220,00)	97,64
8	PROGRAM TANGGAP DARURAT	655.011.000,00	619.807.009,00	(35.203.991,00)	94,63
9	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	77.000.000,00	58.685.000,00	(18.315.000,00)	76,21
	JUMLAH	1.887.362.334,00	1.799.109.396,00	(88.252.938,00)	95,32

Sumber : LKPJ BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga teknis Masyarakat

Tujuan program ini untuk memperkuat kesiapsiagaan tenaga dalam penanggulangan bencana khususnya tenaga yang berasal dari relawan masyarakat, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana.

b. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Tujuan program ini sebagai upaya pemerintah dalam mencegah maupun mengurangi resiko bencana yang terjadi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Bencana; Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapan Menghadapi Bencana; Fasilitasi Dan Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana.

c. Program Tanggap Darurat

Tujuan program ini sebagai upaya penanganan bencana pada saat terjadi, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Dan Koordinasi Tanggap Darurat Bencana; Penguatan/Pengembangan Kelembagaan Penanggulangan Bencana; Latihan Bersama Penanggulangan Bencana; Mobilisasi Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana.

d. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tujuan program ini sebagai upaya penanganan pasca bencana, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penilaian Kerusakan, Kerugian Akibat Bencana; Fasilitasi dan Koordinasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.30.
Pencapaian Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat dan Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 desa	3 Desa
2	Program Tanggap Darurat	Persentase masyarakat yang ditolong terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	100%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
3	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	Persentase jumlah masyarakat yang diberikan bantuan terhadap jumlah total masyarakat yang mengalami bencana	100%	100%

Sumber : LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Beberapa hasil capaian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Ikut Sertanya Pegawai BPBD Kab. Tanjung Jabung Timur dalam mengikuti Bintek Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jambi maupun BASARNAS Provinsi Jambi;
- 2) Terbentuknya Satgas Team Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 27 orang yang siap membantu Pemerintah Daerah dalam penanganan penanggulangan bencana;
- 3) Ikut berperan aktif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penanganan penanggulangan bencana dan bekerja sama dengan OPD terkait untuk penanganan bencana;
- 4) Terbentuknya Desa Tangguh Bencana sebanyak 3 (tiga) Desa yaitu :
 - a. Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang
 - b. Desa Remau Bako Tuo Kecamatan Sadu
 - c. Desa Sungai Cemara Kecamatan Sadu
- 5) Melakukan pendataan korban bencana dan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bantuan uang dari Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur kepada korban bencana;
- 6) Menginformasikan kepada masyarakat untuk waspada terhadap bencana melalui pemasangan baliho Penanggulangan bencana sebanyak 5 buah dan poster penanggulangan bencana yang disebarluaskan kepada semua kecamatan;
- 7) Pembentukan Tim Pembina Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Bupati Tanjung Jabung Timur dan Unsur Forkopimda Kab. Tanjung Jabung Timur;
- 8) Pembentukan Tim Komando Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur yang terdiri Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum serta Kepala Perangkat Daerah terkait dalam penanggulangan bencana.

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018 lebih banyak diakibatkan karena kelalaian dari manusia dari pada faktor alam, untuk lebih lengkapnya akan diuraikan pada Bab VI dalam dokumen LKPJ ini.

Dalam menjalankan program/kegiatan pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif;
2. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan;
3. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana;
4. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, PUSDATIN;
5. Belum terciptanya singkronisasi program penanganan kebencanaan antar OPD terkait;
6. Belum tersedianya pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah kebencanaan, antara lain penanganan kondisi tanggap darurat serta pasca bencana;
7. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasannya lain, tidak ada perkecualian;
8. Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang belum tercipta secara baik;
9. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsif sehingga menimbulkan dampak penggunaan biaya dan personil yang besar;
10. Belum terdapatnya Standar Penilaian Pasca Bencana dalam upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi;
11. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana dan personil.

Permasalahan yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dicari solusi pemecahannya, adapun upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya :

1. Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Menata dan menginventarisir potensi bencana yang bias terjadi diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan penanggulangan bencana;

3. Mengajukan permohonan peralatan dasar dalam penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur;
4. Mengajukan penambahan anggaran untuk penanggulangan bencana, karena dana dari APBD sangat kurang untuk penanggulangan bencana ini;
5. Mengajukan permintaan pertambahan personil Kepada Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama strukturan esolan IV;
6. Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) serta relawan penanggulangan bencana sehingga TRC dan relawan ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur;
7. Penyebarluasan informasi potensi bencana yang bisa terjadi ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi, pembuatan baliho penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui Camat dan kepala desa setempat.

8.10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
3. Penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan;
4. Penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Sosial* dan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Bidang urusan *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*. Pada Tahun 2018, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 16 (enam belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertera dalam tabel 4.31 dibawah ini.

Tabel 4.31.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	537.668.600,00	525.140.195,00	(12.528.405,00)	97,67
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	231.850.000,00	230.249.000,00	(1.601.000,00)	99,31
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.200.000,00	20.200.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	59.639.439,00	59.630.000,00	(9.439,00)	99,98
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	15.000.000,00	14.930.000,00	(70.000,00)	99,53
6	PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH	81.535.000,00	81.535.000,00	-	100,00
7	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	556.212.000,00	556.113.736,00	(98.264,00)	99,98
8	PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	125.777.500,00	125.777.500,00	-	100,00
9	KESERASIAN PENINGKATAN KEBIJAKAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	55.000.000,00	55.000.000,00	-	100,00
10	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	127.909.500,00	127.444.400,00	(465.100,00)	99,64
11	PEMBINAAN EKS PENYAKIT SOSIAL/EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN LAINNYA	47.597.500,00	47.597.500,00	-	100,00
12	PENGUATAN KELEMBAGAAN PANGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK	309.505.461,00	309.397.982,00	(107.479,00)	99,97
13	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	142.250.000,00	134.965.200,00	(7.284.800,00)	94,88
14	PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	686.505.000,00	686.505.000,00	-	100,00
15	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	71.000.000,00	70.975.100,00	(24.900,00)	99,96
	JUMLAH	3.067.650.000,00	3.045.460.613,00	(22.189.387,00)	99,28

Sumber : LKPJ Dinas Sosial PPPA Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 10 (sepuluh) program teknis yang meliputi :

a. **Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah**

Tujuan Program ini untuk meningkatkan penghasilan usaha keluarga miskin, terpenuhinya kehidupan layak secara ekonomi dan social bagi keluarga miskin dan

meningkatkan pengetahuan usaha ekonomi produktif. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

b. **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Tujuan program ini untuk meningkatkan fungsi social lansia produktif, peran aktif masyarakat dalam pemberdayaan lansia. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian Bantuan PUEP bagi Lansia Produktif dan Komda Lansia; Penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; Pelaksanaan peringatan hari besar nasional (Hari Pahlawan); Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelayanan upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesejahteraan.

c. **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi fisik psikologis penyandang cacat dan trauma. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian bantuan dana jaminan sosial dan alat bantu penyandang cacat dan trauma.

d. **Program Keserasian Peningkatan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan**

Program ini bertujuan untuk kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi yang terkait dengan keselarasan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

e. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Program ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat agar terlatih dalam menghadapi bencana dan meningkatkan kapasitas pengurus organisasi sosial dan karang taruna. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan kualitas SDM masyarakat pada pembentukan lokasi Kampung Siaga Bencana (KSB) Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu; Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan social masyarakat (Pekerja Sosial) masyarakat Organisasi Sosial/Yayasan/LKS.

f. **Program Pembinaan Eks Penyakit Sosial, Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pembinaan Eks penyakit Sosial, Narapidana, PSK, Narkoba dan Lainnya. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Eks Napi, PSK, Narkoba dan lainnya.

g. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak**

Program ini bertujuan untuk membentuk Forum Anak Daerah yang merupakan wadah bagi anak-anak yang memiliki kreatifitas untuk mengembangkan bakatnya. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Advokasi dan fasilitas

- PUG bagi perempuan dan anak; Pengembangan sistem informasi gender dan anak; fasilitasi pengembangan P2TP2A.
- h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan Daerah; Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendamping.
 - i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan**
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (P2WKSS); Gerakan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita Persatuan (DWP).
 - j. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Kordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Kota Layak Anak.
Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.32.
Pencapaian Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya	Percentase (%) Fakir Miskin yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial	39%	0,95%
2	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial	15 orang	59 orang
		Jumlah Penerima Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam	250 orang	15 orang
		Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk	1 Kampung	1 kampung
		Jumlah Penyandang Cacat Fisik dan Mental	373 orang	9 orang
		Jumlah Lanjut Usia Tidak potensial	250 orang	5 orang
3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	Jumlah Penyandang cacat yang mengikuti pembinaan	10 orang	40 orang

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah TKSK yang dibina	11 orang	11 orang
		Jumlah PSM yang dibina	15 orang	14 orang
		Jumlah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3) yang di bina	1 lembaga	1 lembaga
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dibina	49 orang	49 orang
		Pendamping PKH yang dibina	-	40 orang
		Jumlah Operator dan Korkap PKH yang dibina	-	3 orang
		Percentase Karang Taruna yang dibina	11 Kelompok	25 kelompok
		Percentase ORSOS yang dibina	65 organisasi	5 organisasi
5	Program Pembinaan Eks Penyan.Penyakit Sosil/Eks Narapidan,Psk,Narkoba Dan Lainnya	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang dibina	10 orang	40 orang
6	Program Penguanan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	61,31	61,31
7	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Percentase perempuan yang mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan usaha ekonomi	60%	60%
		persentase Partisipasi perempuan dalam bidang pekerjaan	60%	60%
		cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	58%	58%
8	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Percentase Peranserta Perempuan dalam Kegiatan Pembangunan	21%	-
9	Program Keserasian Peningkatan Kebijakan Kualitas Anak Dan Perempuan	Jumlah penyuluhan PUG yang telah dilakukan	5 orang	105 orang
10	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%	58%	58%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Cakupan Korban Tindak Kekerasan Anak yang telah mendapat Konseling dan Pendampingan	63%	63%
		cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih	58%	58%
		cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan	29%	29%
		Jumlah Forum Anak Daerah yang telah dibentuk	5	1

Sumber : LKPJ Dinas Sosial, PPPA Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.33.
Capaian Kinerja Dinas Sosial PPPA Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian Indikator Kinerja	Capaian
1	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki	1 orang
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan	3 orang

Sumber : Dinas Sosial, PPPA Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan pertimbangan dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dilakukan lebih akurat dan cermat untuk dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan;
2. Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus disempurkan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
3. Peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah dalam bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan secara berkesinambungan;
4. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4.11. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Penyelenggaraan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang ketahanan pangan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Pangan*. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan ketahanan pangan dalam pembangunan daerah, selama tahun 2018 telah dilaksanakan total 5 (lima) program yang terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 1 (satu) program pembangunan serta 31 (tiga puluh satu) kegiatan yang terdiri dari 18 (delapan belas) kegiatan rutin dan 13 (tiga belas) kegiatan pembangunan.

Tabel 4.34.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.013.327.700,00	1.006.779.156,00	(6.548.544,00)	99,35
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	128.100.000,00	124.575.900,00	(3.524.100,00)	97,25
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.950.000,00	20.950.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	14.250.000,00	(750.000,00)	95,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	2.086.526.000,00	2.005.886.801,00	(80.639.199,00)	96,14
	JUMLAH	3.263.903.700,00	3.172.441.857,00	(91.461.843,00)	97,20

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 4 (empat) program rutin dan 1 (satu) program teknis yaitu :

a. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan.**

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberkelanjutan ketahanan pangan sampai ketingkat rumah tangga. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan; Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan; Pengembangan Cadangan Pangan Daerah; Pengembangan Desa Mandiri Pangan; Pengembangan Lumbung Pangan Desa; Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan; Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional & Propinsi; Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan; Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat; Penilaian Lomba-Lomba Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat dalam Diversifikasi Pangan; Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan; Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat, Harga Pangan Masyarakat dan Distribusi Pangan.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.35.
Pencapaian Program Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84	94,8
		Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari)	2.161 Kkal/Kapita/Hari	2.380,9 Kkal/Kapita/Hari
		Konsumsi Protein (Gram/Kapita/Hari)	54,50 Gram/Kapita/Hari	85,27 Gram/Kapita/Hari
		Stabilitas Harga Pangan (Gabah) Tingkat Produsen	Sesuai dengan HPP	Sesuai dengan HPP
		Stabilitas Harga Pangan (Beras) Tingkat Konsumen	CV < 10%	CV < 10%
		Jumlah Desa Mandiri Pangan yang diberdayakan	11 desa	8 Desa
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	80	94,8
		Jumlah Lembaga Keuangan Desa (LKD) Desa Mandiri Pangan menjadi Koperasi Unit Desa	2 unit	0 Unit
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan	2 Kawasan	1 Kawasan

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen
		Pengembangan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat	4 Gapoktan	2 Gapoktan
		Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	7 Unit	11 Unit

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Keragaman dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH) tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.36.
Keragaman dan Ketersediaan Pangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (SKOR PPH)

No	Kelompok Pangan	Gram / Kap/Hari	Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap skor AKE dan Skor Maks	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Padi-padian	270,3	1154,3	53,4	65,4	0,5	26,7	32,7	25	0	25
2	Umbi-umbian	88,0	93,2	2,7	3,3	0,5	1,4	1,7	2,5	-0,8	1,7
3	Pangan Hewani	167,9	242,6	10,0	12,3	2	20,0	24,5	24	0	24
4	Minyak dan Lemak	257,8	291,9	15,7	19,2	0,5	7,8	9,6	5	0	5
5	Buah/Biji Berminyak	35,9	72,5	3,5	4,2	0,5	1,7	2,1	1		1
6	Kacang-kacangan	54,0	78,3	2,3	2,8	2	4,6	5,7	10	-4,3	5,7
7	Gula	29,1	127	6,3	7,7	0,5	3,1	3,9	2,5	0	2,5
8	Sayur dan Buah	214,3	124	5,2	6,4	5	26,1	32,0	30	0	30,0
9	Lain-lain	177,1	41,6	0,9	1,2	0	0	0	0	0	0
Total		2.225,4	100	122,5			91,5	112,1	100		94,8

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

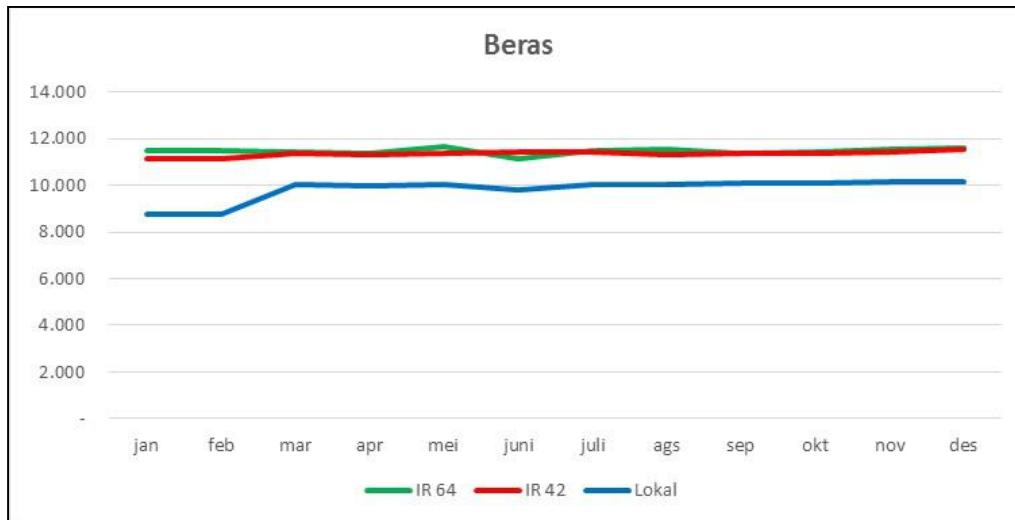
Tabel 4.37.
Jumlah Alokasi Bantuan Beras Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(keadaan s/d Desember 2018)

No	KECAMATAN/ DESA	Kk Yang Mengajukan Bantuan						Rulisasi Kk Yang Menerima Bantuan Hasil Verifikasi					
		Bencana Alam			Kk Miskin Non Raskin			Bencana Alam			Kk Miskin Non Raskin		
		Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)
		KK	JIWA		KK	JIWA		KK	JIWA		KK	JIWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kecamatan Rantau Rasau												
	Desa Harapan Makmur	22	68					22	68	591,6			
	Kelurahan Bandar Jaya	46	165					46	165	1.435,5			
	Desa Marga Mulya	34	139					34	139	1.209,3			
	Jumlah	102	372					102	372	3.226,4			
2	Kecamatan Berbak												
	Desa Rantau Makmur	114	394					114	394	3.427,8			
	Desa Rawasari	64	215					64	215	1.870,5			
	Kelurahan Simpang	195	694					195	694	6.037,8			
	Desa Telago Limo	20	84					20	84	730,8			
	Jumlah	393	1.387					393	1.397	12.068,9			

No	KECAMATAN/ DESA	Kk Yang Mengajukan Bantuan						Rulisasi Kk Yang Menerima Bantuan Hasil Verifikasi					
		Bencana Alam			Kk Miskin Non Raskin			Bencana Alam			Kk Miskin Non Raskin		
		Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)	Jumlah		Jumlah Beras (Kg)
		KK	JIWA		KK	JIWA		KK	JIWA		KK	JIWA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Jumlah Total		495	1.759					495	1.759	15.303			

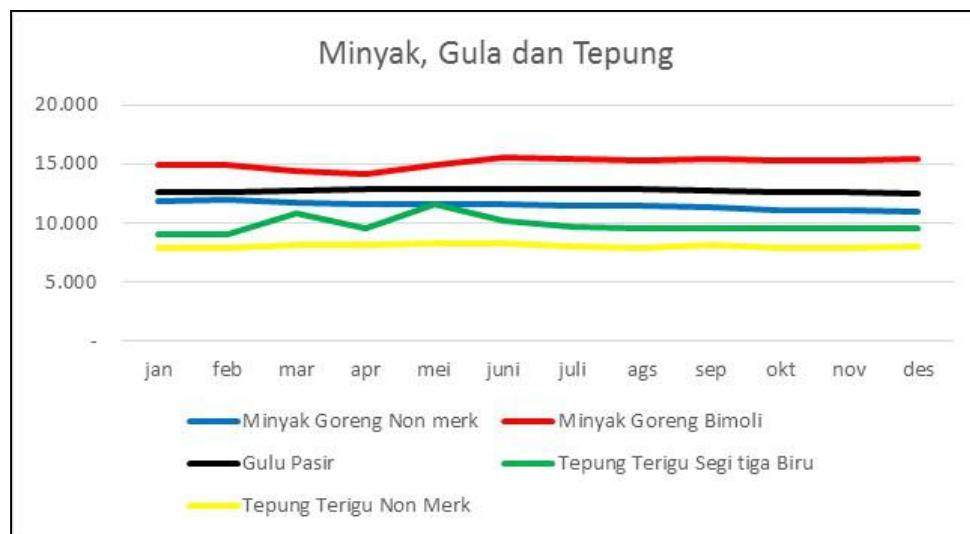
Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar 4.1.
Perkembangan Harga Beras
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018



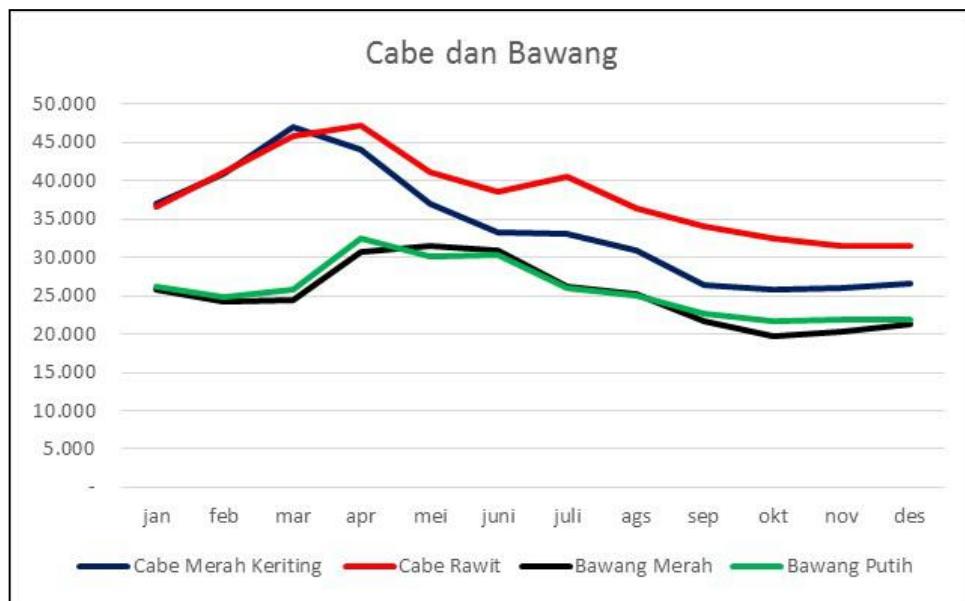
Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar 4.2.
Perkembangan Harga Bahan Pangan Pabrikan
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018



Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Gambar 4.3.
 Perkembangan Harga Cabe dan Bawang
 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018



Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2018 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal antara lain :

A. Faktor internal antara lain :

1. Sumber daya manusia yang masih kurang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kuantitas;
2. Kurangnya Sarana dan prasarana serta kelengkapan organisasi yang masih perlu penambahan dan pembiayaan;
3. Sistem kerja yang belum sepenuhnya berjalan optimal;
4. Administrasi yang belum sepenuhnya tertib dan taat aturan;
5. Masih kurangnya ketersediaan dana langsung untuk pemberdayaan masyarakat berupa modal usaha kelompok di desa rawan pangan.

B. Faktor eksternal antara lain :

1. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan atar golongan maupun tingkat pendidikan;
2. Percepatan diversifikasi berjalan lambat hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sesuai dengan pola pangan harapan masih rendah demikian juga dengan konsumsi pangan beragam, bergizi dana berimbang belum terlaksana dengan baik;

3. Masih adanya produk rumah tangga yang menggunakan bahan pangan yang tidak boleh digunakan;
4. Masih lemahnya koordinasi lembaga yang terkait dengan Ketahanan Pangan dan stake holder Ketahanan Pangan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan;
5. Belum termanfaatkan secara optimal Pangan Lokal yang ada bagi usaha promosi komoditas unggulan daerah;
6. Masih kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan solusi sebagai berikut.

A. Solusi Faktor internal antara lain ;

1. Mengusulkan penambahan pegawai serta mengikutsertakan aparatur Kantor Ketahanan Pangan dalam pendidikan dan pelatihan;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana serta kelengkapan organisasi;
3. Mengoptimalkan kinerja pegawai dengan menerapkan disiplin dan ketataan terhadap peraturan yang berlaku;
4. Memperbaiki administrasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

B. Solusi Faktor Eksternal antara lain ;

1. Perlunya pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sesuai dengan pola pangan harapan dan peningkatan ketahanan pangan dengan mengedepankan aspek ketersediaan distribusi/ konsumsi serta keamanan pangan;
2. Meningkatkan jumlah dukungan kegiatan untuk peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengedepankan aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Meningkatkan intensitas pengambilan bahan sampel jajanan maupun makanan untuk diuji di Balai POM dan peningkatan kegiatan sosialisasi mutu dan keamanan pangan;
4. Mendorong dan memfasilitasi kecukupan, ketersediaan pangan tingkat Kabupaten/Kota;
5. Meningkatkan antisipasi dini terjadinya kerawanan pangan melalui pelatihan, mekanisme aliran data rawan pangan dan memberikan bantuan pangan;
6. Melaksanakan secara intensif koordinasi lintas pelaku dan sektoral yang terkait dengan ketahanan pangan terhadap penyelesaian masalah-masalah ketahanan

- pangan yang terjadi di masyarakat serta memfasilitasi peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan stakeholder dalam mewujudkan ketahanan pangan;
7. Mengoptimalkan dukungan anggaran maupun sarana untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah rawan pangan.

4.12. Dinas Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. penyelenggaraan penataan lingkungan hidup;
3. penyelenggaraan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang lingkungan hidup yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Lingkungan melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Bidang urusan *Lingkungan Hidup*. Pada Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 10 (sepuluh)program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Lingkungan Hidup tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.38.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Lingkungan Tahun Anggaran 2018

NO.	PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.166.127.691,67	2.141.834.152,00	(24.293.539,67)	98,88
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	904.610.000,00	860.904.050,00	(43.705.950,00)	95,17
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	42.550.000,00	41.850.000,00	(700.000,00)	98,35
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	44.000.000,00	38.150.000,00	(5.850.000,00)	86,70
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	12.700.000,00	12.659.000,00	(41.000,00)	99,68

NO.	PENDAPATAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.700.000,00	11.132.000,00	(568.000,00)	95,15
7	PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	240.300.000,00	239.660.795,00	(639.205,00)	99,73
8	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.034.610.000,00	1.016.067.831,00	(18.542.169,00)	98,21
9	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.405.570.000,00	1.351.251.860,00	(54.318.140,00)	96,14
10	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	285.175.000,00	284.560.000,00	(615.000,00)	99,78
JUMLAH		6.147.342.691,67	5.998.069.688,00	(149.273.003,67)	97,57

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana persampahan dan Monitoring dan Evaluasi.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Lingkungan Hidup Daerah; Gerakan Peduli Lingkungan Hidup.

c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan; Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH; Pengelolaan B3 dan Limbah B3; Koordinasi Pemeriksaan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; Peningkatan Kinerja Laboratorium Lingkungan Hidup, Hutan Kota.

d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyadartahanan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.39.
Pencapaian Program Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi SDA Dan LH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,9	69,08
		Pemulihan terhadap kerusakan lahan dan/atau tanah	25 Ha	-
		pemulihan wilayah pesisir	5 Kecamatan	-
		status lingkungan hidup	98	-
2	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	45	
		Dokumen lingkungan yang diterbitkan sesuai SOP	65 Dokumen	48 Dokumen
		Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (UKP-UPL)	30 Hari Kerja	30 Hari Kerja
		Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (SPPL)	6 Hari	6 Hari

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.40.
Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian Indikator Kinerja	Capaian
1	kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	2 Kelompok
2	Percentase tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung TPA	70%
3	percentase usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pengelolaan limbah cair dan B3	42%
4	Jumlah cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen kajian lingkungan	47 Usaha/Keg
5	tindaklanjut dari pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup	100%
6	Penanganan Timbunan Sampah Perhari (M3)	40,02 M3

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Pemantauan Kualitas Lingkungan tahun 2018 berjumlah 8 titik pantau, 2 titik pantau pada Daerah Aliran Sungai dan 6 titik pantau pada 8 Kecamatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.41.
Rekapitulasi Kualifikasi Mutu Air Sungai
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Nama		Gol	Kualifikasi Mutu Air
	Desa	Kecamatan		
1	DAS LAGAN - Blok A (Lagan Ulu) - Lagan Tengah - Lagan Ilir - Muara Sungai Lagan	Geragai Geragai Geragai Geragai	B	Ringan Ringan Ringan Ringan
2	DAS Mendahara - Pematang Rahim - Mendahara Tengah - Mendahara Ilir	Mendahara Ulu Mendahara Mendahara	B	Ringan Ringan Ringan
3	SUNGAI SADU - Kel. Sungai Lokan - Simpang Jelita - Simpang Datuk	Sadu Sadu Sadu	B	Ringan Ringan Ringan
4	Kecamatan Muara Sabak Barat - Kelurahan Rano - Kelurahan Nibung Putih - Kelurahan Kampung Singkep	Ma Saak Barat Ma Sabak Barat Ma Sabak Barat	B	Ringan Ringan Ringan
5	Kecamatan Dendang - Desa Catur Rahayu - Desa Kuala Dendang - Desa Sido Mukti	Dendang Dendang Dendang	B	Ringan Ringan Ringan
6	Kecamatan Rantau Rasau - Kel. Bandar Jaya - Desa Bangun Karya - Desa Marga Mulya	Rantau Rasau Rantau Rasau Rantay Rasau	B	Ringan Ringan Ringan
7	Sungai Ma Sabak Timur - Lambur 1 - Lambur 2 - Simbur Naik - Lambur Luar - Sungai Ular - Alang-Alang	Ma Sabak Timur Ma Sabak Timur Ma Sabak Timur Ma Sabak Timur Ma Sabak Timur Ma Sabak Timur	B	Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan Ringan
8	Sungai Pemusiram - Kuala Pemusiran - Sungai Raya - Teluk Keladi	Nipah Panjang Nipah Panjang Nipah Panjang	B	Ringan Ringan Ringan

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Pada Tahun 2018 jumlah industri atau kegiatan usaha yang diawasi berjumlah 47 sektor meliputi 24 sektor Perkebunan, 5 sektor Minyak dan Gas Bumi, 2 sektor Pelayanan Kesehatan, 10 sektor industry, 1 sektor Peternakan, 1 Sektor listrik, 3 Sektor Pemerintahan

dan 1 sektor pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri. Ketaatan sektor tersebut terhadap dokumen lingkungan sudah mencapai 50%.

Pengelolaan limbah B3 dan IPAL oleh perusahaan pada tahun 2018 terdiri dari 5 Perusahaan yang mempunyai izin TPS Limbah dan 5 Perusahaan yang mempunyai izin IPAL. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.42.
Izin Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Identitas Perusahaan/instansi	Jenis Industri	Lokasi
1	PT Abdila Kesuma	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Pandan Lagan Kec. Geragai
2	PT Muara Jambi Sawit Lestari	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai
3	PT Mendahara Agrojaya Industri	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Lagan Tengah Kecamatan Geragai
4	PT Palma Gembang Kencana	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	Desa Bukit Tempurung Kecamatan Mendahar Ulu
5	PT Metro Yakin Jaya	Perkebunan Kelapa Sawit	Desa Simpang Datuk kecamatan Nipah Panjang

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel 4.43.
Izin Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Identitas Perusahaan/instansi	Jenis Industri	Lokasi
1	PT Muara Jambi Sawit Lestari	Pabrik Kelapa Sawit	Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018 telah menerbitkan 48 jenis dokumen yang terdiri dari 1 dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), 18 Dokumen UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan 30 Dokumen SPPL (Surat Pernyataan kesanggupan Pegelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan dokumen DED dan Maket Pengembangan Hutan Kota. Hutan Kota adalah sekelompok pohon yang tumbuh didalam kota atau pinggiran kota berupa jenis tanaman keras atau pohon yang tumbuh disekeliling pemukiman yang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan kota.

Keberhasilan yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018 antara lain :

1. Penghargaan Nirwasita Tantra Award (Juara 2 Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) tingkat Provinsi Jambi;

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Penguatan data dan informasi antar sektor sebagai media informasi dan up dating data;
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang lingkungan untuk melakukan diklat fungsional khususnya PPLH dan PPNS;
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah, pelaku usaha kegiatan dan skala rumah tangga tentang pemahaman produksi yang ramah lingkungan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat;
6. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Pembentukan pos pengaduan masyarakat sebagai salah satu wadah masyarakat/setiap orang untuk memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat;
8. Terakreditasinya laboratorium pada Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.

4.13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
2. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan Bidang urusan *administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*. Pada Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan 8 (delapan) program dan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.44.

Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.076.213.552,00	1.065.653.089,00	(10.560.463,00)	99,02
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	319.100.000,00	317.657.224,00	(1.442.776,00)	99,55
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	26.775.000,00	26.250.000,00	(525.000,00)	98,04
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	148.050.000,00	148.039.976,00	(10.024,00)	99,99
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.400.000,00	7.725.000,00	(3.675.000,00)	67,76
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	975.488.000,00	960.466.602,00	(15.021.398,00)	98,46
8	PROGRAM PENATAAN, PEMANFAATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.150.064.000,00	1.132.186.620,00	(17.877.380,00)	98,45
	JUMLAH	3.727.090.552,00	3.677.978.511,00	(49.112.041,00)	98,68

Sumber : LKPJ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 2 (dua) program teknis yang meliputi :

a. **Program Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Administrasi SIAK; Sosialisasi Kebijakan Kependudukan; Peningkatan Pelayanan Publik; Pemeliharaan Perangkat SIAK; Penyusunan Profil Kependudukan; Pengembangan Sistem Administrasi Pencatatan Sipil.

b. Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan; Rapat Monitoring dan Evaluasi Pencatatan Sipil; Peningkatan Pelayanan Publik Akta Kelahiran; Penyediaan Informasi dan Akses Masyarakat; Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan; Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi WNA; Pelayanan KIA Keliling; Pembinaan Berkala Petugas Pelaksana Pelayanan Adminduk di Desa dan Kelurahan; Konektifitas Data Warehouse; Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; Sosialisasi Penertiban Penyelenggaraan Penerbitan Identitas Penduduk.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.45.
Pencapaian Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Penataan, Pemanfaatan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	B
		Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan sesuai dengan SOP	82%	96,4%
		Banyak dokumen Administrasi Kependudukan yang diterbitkan tidak sesuai dengan SOP	18%	3,6
		Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (KK, KTP, Akta)	12 hari kerja	7 Hari Kerja
		Lama rata-rata pelayanan dokumen sesuai dengan SOP (Surat Pindah dan Datang)	4 hari kerja	5 Hari Kerja

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	89,55 %
		Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	100 %
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	72,54%	99,92 %
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100%	100 %
		Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	100%	4,27 %
		Presentase Penerbitan Kutipan Akta Perceraian	100%	0,15 %

Sumber : LKPJ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Realisasi capaian hasil pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.46.
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Capaian
1	Hasil Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga	65.135 KK
2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	154.329 WK/Orang
3	Hasil Pelayanan Penerbitan Surat Pindah	1.712 Orang
4	Hasil Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Datang	1.054 Orang
5	Kepemilikan Akta Kelahiran/1.000 Penduduk	68.392 Orang
6	Kepemilikan Akta Perkawinan	228 Pasangan
7	Hasil Pelayanan Akta Perceraian	0 Pasangan
8	Hasil Pelayanan Akta Kematian	224 orang
9	Hasil Pelayanan Akta Pengakuan Anak	0 orang
10	Hasil Pelayanan Pengangkatan Anak	0 orang
11	Hasil Pelayanan Akta Kelahiran diatas usia 1 tahun	0 orang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

4.14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
2. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi Desa;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan Desa;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
5. pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang diberikan oleh Bupati

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *pemberdayaan masyarakat dan Desa*. Pada Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 12 (dua belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.47.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	634.097.440,00	622.558.694,00	(11.538.746,00)	98,18
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	367.080.500,00	365.992.200,00	(1.088.300,00)	99,70
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.150.000,00	15.150.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	13.976.000,00	(24.000,00)	99,83
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.400.000,00	11.318.000,00	(82.000,00)	99,28
7	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	86.885.000,00	86.010.000,00	(875.000,00)	98,99
8	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	438.787.500,00	434.574.283,00	(4.213.217,00)	99,04
9	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	746.365.000,00	730.231.492,00	(16.133.508,00)	97,84
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	200.510.000,00	192.910.000,00	(7.600.000,00)	96,21
11	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	1.155.000.000,00	1.125.372.391,00	(29.627.609,00)	97,43

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
12	PROGRAM PENGUATAN OTONOMI DESA	322.624.000,00	315.230.600,00	(7.393.400,00)	97,71
	JUMLAH	4.016.899.440,00	3.938.323.660,00	(78.575.780,00)	98,04

Sumber : LKPJ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 6 (enam) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Posyantek; Pekan Inovasi Perkembangan.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna; Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa; Pembentukan, Pembinaan dan Monitoring Badan Usaha Milik Desa.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangunan Desa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan; Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.

d. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolan Keuangan Desa.

e. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Keluarga.

f. Program Penguatan Otonomi Desa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBdesa.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.48.
 Pencapaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah posyantek yang berfungsi secara maksimal	4 posyantek	2 Posyantek
2	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDesa terbentuk	40 Bumdes	65 Bumdes
		Jumlah BUMDesa yang berfungsi	15 Bumdes	26 Bumdes
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat	3 kali	3 kali
		Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kecamatan	11 kecamatan	11 Kecamatan
4	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang telah mengikuti bintek Keuangan desa	-	83 Aparatur
5	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Persentase Peran serta Perempuan dalam Pembangunan Desa	100%	100%

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa permasalahan internal antara lain terbatasnya personil seperti petugas teknis di bidang-bidang.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan memaksimalkan personil di sekretariat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dengan bimbingan dan pengawasan dari Kepala Dinas maupun Kepala Bidang bersangkutan.

Permasalahan selanjutnya adalah terbatasnya Kendaraan Dinas Operasional dalam menjalankan tugas kedinasan ke 73 desa sehingga upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan itu maka kendaraan Pribadi ikut dimanfaatkan.

4.15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan *pengendalian penduduk dan keluarga berencana*. Pada Tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 15 (lima belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.49.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.096.118.000,00	1.051.408.152,00	(44.709.848,00)	95,92
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	501.925.148,00	461.158.400,00	(40.766.748,00)	91,88
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19.100.000,00	19.100.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.500.000,00	23.500.000,00	(2.000.000,00)	92,16
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.150.000,00	6.150.000,00	-	100,00
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00
7	KELUARGA BERENCANA	4.373.485.000,00	4.149.849.400,00	(223.635.600,00)	94,89
8	KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	91.075.000,00	90.500.000,00	(575.000,00)	99,37
9	PELAYANAN KONTRASEPSI	158.387.500,00	158.004.000,00	(383.500,00)	99,76
10	PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	896.470.000,00	895.831.213,00	(638.787,00)	99,93
11	PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK)	51.375.000,00	51.295.000,00	(80.000,00)	99,84
12	PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS DAN HIV AIDS	64.250.000,00	64.120.000,00	(130.000,00)	99,80
13	PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK	64.860.000,00	64.005.000,00	(855.000,00)	98,68
14	PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	76.750.000,00	76.599.500,00	(150.500,00)	99,80
15	PENGENDALIAN PENDUDUK	99.490.000,00	99.340.000,00	(150.000,00)	99,85
	JUMLAH	7.533.935.648,00	7.219.860.665,00	(314.074.983,00)	95,83

Sumber : LKPJ DPPKB Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis yang meliputi :

a. **Program Keluarga Berencana**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin; Pelayanan Kie (Konsumsi, Informasi & Edukasi; Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu; Pembinaan Keluarga Berencana; Peningkatan Partisipasi Pria Dalam KB Dan KR; Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling; Penyediaan biaya operasional Balai Penyuluhan KB, Penguatan Peran Keluarga dalam Pembangunan Nasional.

b. **Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Advokasi Dan Kie Tentang KRR Dan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan); Memperkuat Dukungan Dan Partisipasi Masyarakat.

c. **Program Pelayanan Kontrasepsi**

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan keluarga berencana kesehatan manunggal dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi metode operasi wanita dan metode operasi pria. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan KB Metode Operasi; Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon).

d. **Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembentukan Masyarakat Peduli KB; Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB; Koordinasi Pengelola Program; Pengelola Data Dan Informasi Program KB.

e. **Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR**

Program ini ditujukan untuk memberi pelayanan kepada remaja dalam kesehatan reproduksi remaja. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pendirian Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling.

f. **Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Dan HIV/AIDs.

g. **Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak.

h. **Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di kecamatan.

i. **Program Pengendalian Penduduk**

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kependudukan dan Informasi Keluarga dan Workshop Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kader KB, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.50.
Pencapaian Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Keluarga Berencana	Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,78%	0,78%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	4,2%	4%
		Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	66,5%	67%
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	11%	10%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	82%	83%
		Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87%	88%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluhan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	1/desa-Kelurahan	1/desa-Kelurahan
		Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	30%	30%
2	Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Jumlah Remaja yang mendapatkan penyuluhan KRR	20%	25%
3	Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Jumlah Peserta KB baru yang dilayani menggunakan kontrasepsi	100%	100%
4	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri	Persentase Jumlah peserta KB mandiri	45%	50%
5	Pengembangan Pusat-Pusat Informasi Dan Konseling	Jumlah PIK-R	40 unit	45 unit
6	Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase jumlah kelompok BKB yang mendapatkan bahan informasi	40%	45%
7	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase jumlah kader bina keluarga terlatih	25%	35%
8	Program Pengendalian Penduduk	Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	1 desa/kelurahan	1 desa/kelurahan
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%

Sumber : LKPJ Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

Hasil kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 dapat dilihat selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.51.
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Sampai dengan Tahun 2018

No	Uraian	Capaian Tahun 2018
1	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif	6.466 Akseptor
2	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efesien/alat kontrasepsi	34.510 Akseptor
3	Peserta KB baru	6.338 Akseptor
4	Peserta KB Aktif	40.976 Akseptor

Sumber : LKPJ Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2018

Adapun Keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 adalah :

- 1) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif (CPR/Contrasepsi Prevalensi Rate) sebesar 67,1%
- 2) Jumlah Rata-rata anak yang dimiliki keluarga (TFR/Total Fertility Rate) sebesar 2,4

Secara Umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi yang perlu dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana sebagai media penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi akan terus ditingkatkan dan disempurnakan demi menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
2. Peningkatan sumberdaya aparatur pemerintah dalam bidang kesehatan dilakukan secara berkesinabungan;
3. Tetap Konsisten melakukan koordinasi dengan unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

1.16. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. penyelenggaraan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkretapian, pelayaran dan penerbangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perhubungan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang urusan *Perhubungan*. Pada Tahun 2018, Dinas Perhubungan melaksanakan 12 (dua belas) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan.

Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perhubungan tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.52.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.835.030.311,00	1.761.754.991,00	(73.275.320,00)	96,01
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	878.111.000,00	799.138.500,00	(78.972.500,00)	91,01
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	86.250.000,00	78.800.000,00	(7.450.000,00)	91,36
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	60.000.000,00	36.770.000,00	(23.230.000,00)	61,28
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	30.000.000,00	25.837.000,00	(4.163.000,00)	86,12
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.150.000,00	4.150.000,00	-	100,00
7	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	874.069.000,00	739.956.000,00	(134.113.000,00)	84,66
8	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	717.051.800,00	699.841.000,00	(17.210.800,00)	97,60
9	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	572.365.000,00	505.793.000,00	(66.572.000,00)	88,37
10	PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	46.125.000,00	46.125.000,00	-	100,00
11	PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	136.600.000,00	124.140.000,00	(12.460.000,00)	90,88
12	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
JUMLAH		5.259.752.111,00	4.842.305.491,00	(417.446.620,00)	92,06

Sumber : LKPJ Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 7 (tujuh) program rutin dan 5 (program) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pengguna angkutan dalam berlalulintas, mengumpulkan data, updating data, pengaturan arus lalulintas pada hari besar keagamaan, penertiban surat-surat kendaraan baik didarat maupun diperairan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan; Pengumpulan Dan Analisis Database Pelayanan Angkutan; Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan; Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Natal Dan Tahun Baru; Penyelenggaran Forum Lalu Lintas Kab. Tanjung Jabung Timur; Pengawasan Dan Penertiban Angkutan Perairan; Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Layanan Pemanduan dan Penundaan Kapal.

b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jasa perhubungan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Dermaga.

c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas; Pengawalan/Pemanduan Rute, Pengawasan, Inventarisasi /Survey Pengamanan Dan Pengaturan LL AJ, Pengendalian dan Pengaturan Kawasan Tertib Lalu Lintas.

d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Inti dari program ini ialah pengujian kelayakan kendaraan bermotor. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.

e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Persiapan Pembangunan Terminal; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.53.
Pencapaian Program Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	100 unit	79 Unit
		Jumlah Halte	0 unit	0 Unit
		jumlah Cermin Tikung	4 unit	4 Unit
		Jumlah Penerangan Jalan Umum	30 titik	50 Titik
		Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	2 APILL	5 APILL (Pemeliharaan)
		Panjang pita gaduh (satuan M)	0 M	0 M
2	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Persentase Dermaga dalam kondisi baik	43%	44,62%
		Panjang Pagar pengaman Jalan (satuan M)	124 M	0 M
		Kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	2 Kegiatan	4 Kegiatan
		Persentase Terlaksanannya kegiatan pengujian Kendaraan	100%	100%
3	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Kapal Pengawasan Perairan	2 Unit	0 Unit
4	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor	100%	100%

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
5	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	100%

Sumber : LKPJ Dinas Perubungan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.54.
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2018

No.	Indikator Kinerja	Capaian
1	Jumlah Kecelakaan Darat	31kasus
2	Jumlah Kecelakaan Air	1 kasus
3	Jumlah barang yang terangkut melalui dermaga dan terminal	12.484Ton
4	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	28.956 orang

Sumber : Dinas Perubungan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi dan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indicator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas;
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kelancaran mobilitas dalam rangka kesejahteraan rakyat;
4. Konsisten melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam lingkup pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun lingkungan kementerian

4.17 Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
2. penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah pelayanan informasi publik di Kabupaten;
3. penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten;
4. penyelenggaraan layanan hubungan media, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City di kabupaten;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika;
6. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang urusan *Komunikasi dan Informatika*. Pada Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 9 (Sembilan) program dan 32 (Tiga puluh dua) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Komunikasi dan Informatika tertera dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.55.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.014.104.750,00	988.688.638,00	(25.416.112,00)	97,49
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	519.625.000,00	499.026.538,00	(20.598.462,00)	96,04
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	13.500.000,00	(1.500.000,00)	90,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	20.358.250,00	20.277.250,00	(81.000,00)	99,60
6	PENATAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
7	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	242.585.250,00	239.988.250,00	(2.597.000,00)	98,93
8	PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	54.043.750,00	53.890.650,00	(153.100,00)	99,72
9	PENGEMBANGAN E-GOVERMENT	1.979.280.000,00	1.974.329.250,00	(4.950.750,00)	99,75
	JUMLAH	3.877.997.000,00	3.822.700.576,00	(55.296.424,00)	98,57

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa

Program ini bertujuan meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antar lembaga politik dengan rakyat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembentukan, Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat; Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi dan Pengembangan Informasi; Peningkatan dan Pengelolaan Data Informasi.

b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

Program ini bertujuan mengetahui perkembangan komunikasi informasi khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Telekomunikasi Dan Informatika.

c. Program Pengembangan E-Goverment

Sebagai sarana melaksanakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang mekanisme pelelangan dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan e-Government; Pengembangan Sistem Informasi dan Aplikasi; Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Interkoneksi; Koordinasi dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.56.
Pencapaian Program Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Jaringan Internet Hotspot/Wifi	2 Unit	2 Unit
		Pengembangan Website	1 Website	1 Website

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Pembentukan KIM	4	9
2	Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi	Pengelolaan Data Elektronik	7	4
3	Pengembangan E-Government	persentase OPD yang terkoneksi jaringan E-gov	100%	100%

Sumber : LKPJ Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018, tergambar capaian indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.57.
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Area Tidak Kosong (Blank Spot)	8	4
2	Cakupan desa/kelurahan terhadap akses internet	75%	74,1%
3	Jumlah Bandwidth	100 Mbps	150 Mbps
4	Persentase Server terhadap Aplikasi	100%	100%
5	Jumlah Aplikasi	2	3
6	Pengembangan Website	1	1
7	Jumlah Kerjasama dan Kemitraan	1	2

Sumber : LKPJ Dinas Kominfo Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018

Keberhasilan yang dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018 adalah Peringkat 1 (satu) dalam penghargaan Top IT dan Telco pada kategori Top IT Improvement tahun 2018.

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi dan bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update;
2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di tempat umum;
3. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di Perangkat Daerah dan masyarakat umum guna meminimalisir masyarakat yang gagap teknologi (Gaptek);
4. Menfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
5. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan;

- Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik;

4.18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan pengawasan usaha koperasi;
- Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- Penyelenggaraan pengembangan dan perlindungan usaha mikro;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah melaksanakan urusan pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *koperasi, usaha kecil, dan menengah*. Pada Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.58.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	512,253,100,00	509,334,536,00	(2.918.564,00)	99,43
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	105,053,000,00	101,416,900,00	(3.636.100,00)	96,54
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	19,825,000,00	19,200,000,00	(625.000,00)	96,85
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	14,450,000,00	12,000,000,00	(2.450.000,00)	83,04
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	123,546,000,00	123,014,000,00	(532.000,00)	99,57
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10,014,000,00	9,266,000,00	(748.000,00)	92,53

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
7	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF	48,098,500,00	47,772,500,00	(326.000,00)	99,32
8	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	214,308,500,00	210,829,609,00	(3.478.891,00)	98,38
9	PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	383,207,500,00	377,561,616,00	(5.645.884,00)	98,53
10	PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	348,775,000,00	343,109,255,00	(5.665.745,00)	98,38
JUMLAH		1.779.530.600,00	1.753.504.416,00	(26.026.184,00)	98,54

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi UKM Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 4 (empat) program teknis yang meliputi :

a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, non diskriminasitif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha, kecil dan menengah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Dan Menengah.

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan koperasi/KUD. Dengan manajemen yang profesional diharapkan koperasi dapat berkembang dengan pesat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan; Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD; Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM; Peningkatan Kerjasama dibidang HAKI.

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi faktor pendukung usaha UKM. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan; Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk UKM Dan Koperasi; Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Untuk UKM; Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UKM Dan Koperasi; Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga; Penyelenggara Promosi Produk UKM; Pengembangan Kebijakan Dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal; Pengembangan Sistem Informasi UMKM.

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sebagai wadah kepentingan bersama untuk

memperoleh efisiensi kolektif. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Koperasi; Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian; Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Koperasi; Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.59.
Pencapaian Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Sertifikat kesehatan	5 Produk	4 Produk
		Sertifikat halal	5 Produk	1 Produk
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi	4 kali	4 kali
		Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis	2 kali	2 kali
		Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UMKM melalui pembinaan	4 kali	2 kali
2	Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan koperasi dan UKM	20 Koperasi	20 Koperasi
		Jumlah pendampingan pengelola koperasi dan pelaku UKM melalui pembinaan	4 kali	2 Kali
3	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Koperasi yang dapat bantuan permodalan	5 Koperasi	0
		Revitalisasi pasar tradisional	1 Koperasi	0
		SHAT bagi pelaku UKM	100 Persil	100 Persil
		Koperasi yang Mendapatkan Hibah	2	0
		Jumlah proposal bantuan permodalan yang diusulkan bagi koperasi dan UKM	20 Proposal	25 Proposal
		Sosialisasi Skim Kredit	4 kali	3 Kali
		Verifikasi pelaksanaan Skim Kredit	20 Proposal	25 Proposal
		Pembangunan dan pengembangan Sistem Aplikasi Informasi Koperasi dan UKM	10 koperasi	0
		Promosi produk unggulan Koperasi dan UKM	3 kali	2 Kali

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Penyusunan database UKM melalui sistem informasi kredit program	20.250 UMKM	20.250 UMKM
		Kerjasama UKM dengan Badan Usaha	1 Mitra Usaha	1 Mitra Usaha
		Kerjasama kemitraan antar lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
4	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Penghargaan bagi Koperasi dan UKM berprestasi	6 Koperasi	9 Koperasi
		Jumlah koperasi yang Memiliki NIK	20 Koperasi	36 Koperasi
		Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi	5 Koperasi	5 Koperasi

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi dan UKM Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Selama Tahun 2018, hasil yang telah dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah :

1. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Terlaksananya Pelatihan, sosialisasi dan bimtek bagi pengawas, pengurus dan anggota tentang arti pentingnya koperasi dan manfaat serta guna koperasi dan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan ekonomi masyarakat;
3. Terwujudnya peningkatan kinerja koperasi untuk menuju kepredikat koperasi berprestasi;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana produksi maupun usaha bagi koperasi dan UMKM dalam peningkatan kualitas secara kuantitas maupun jaringan usaha kerjasama dalam memasarkan produk (baik tingkat provinsi, pemerintah pusat antar kabupaten/kota maupun swasta);
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara stimulan guna mempercepat pengembangan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah;
6. Membina dan menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat guna mempromosikan hasil produksi usaha koperasi dan UMKM yang merupakan produk-produk unggulan daerah.

Pada tahun 2018, koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik KUD maupun non KUD berjumlah 311 unit, sebanyak 95 unit diantaranya termasuk koperasi aktif, selebihnya merupakan koperasi tidak aktif. Jumlah anggota sebanyak 26.378 orang yang terdiri dari 9.252 orang merupakan anggota KUD dan 17.126 orang merupakan anggota Non KUD.

Tabel 4.60.
Jumlah KUD dan Non KUD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2018

NO	Kecamatan	Koperasi		Aktif		Tidak Aktif		Anggota (orang)	
		KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD	KUD	Non KUD
1	Muara Sabak Barat	2	32	-	19	2	13	97	1.796
2	Muara Sabak Timur	5	42	-	7	5	35	3.277	1.949
3	Kuala Jambi	1	20	-	10	1	10	39	649
4	Dendang	6	30	-	12	6	18	675	4.710
5	Mendahara	3	40	-	5	3	4,61	182	2.002
6	Mendahara Ulu	1	17	1	2	-	15	2.160	1.376
7	Geragai	5	30	-	19	5	11	400	1.547
8	Rantau Rasau	8	11	1	6	7	5	1.166	482
9	Berbak	3	5	-	3	3	2	831	251
10	Nipah Panjang	4	28	-	7	4	21	254	1.489
11	Sadu	3	15	-	3	3	12	171	875
	Jumlah	41	270	2	93	39	146,61	9.252	17.126

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

KUD dan Non KUD di kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai penyerapan modal baik bersumber dari sendiri sebesar Rp. 416.365.200,00 maupun pihak luar sebesar Rp. 6.762.365.639,00 volume usaha sebesar Rp. 4.715.007.745,00 dan sisa hasil usaha sebesar Rp. 132.814.369,00.

Tabel 4.61.

Perkembangan KUD dan Non KUD Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2018

NO	KECAMATAN	KUD & Non KUD	MODAL		VOLUME USAHA	SHU
			SENDIRI	LUAR		
1	Muara Sabak Barat	2	-	-	-	-
2	Muara Sabak Timur	5	101.029.000	2.234.244.176	3.250.322.670	11.927.160
3	Kuala Jambi	1	4.613.750	10.978.725	15.436.755	6.364.975
4	Dendang	6	56.992.000	1.292.739.706	680.990.450	22.424.565
5	Mendahara	3	14.830.000	81.980.213	101.782.676	17.965.700
6	Mendahara Ulu	1	89.810.000	912.422.479	364.401.479	(8.387.521)
7	Geragai	5	66.181.500	240.774.031	68.030.725	23.292.000
8	Rantau Rasau	8	33.305.025	568.544.759	87.377.950	18.201.525
9	Berbak	3	18.622.300	709.026.234	57.956.070	8.467.600
10	Nipah Panjang	4	14.668.350	627.579.941	39.063.230	18.555.785
11	Sadu	3	16.313.275	84.075.375	49.645.740	14.002.580
	JUMLAH	41	416.365.200	6.762.365.639	4.715.007.745	132.814.369

Sumber : LKPJ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kendala antara lain:

1. Kondisi alam yang sulit dijangkau secara cepat dan mahalnya biaya transportasi;
2. Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UKM;
3. Masih lemahnya kesadaran berkoperasi dan arti pentingnya koperasi oleh anggota;
4. Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM;
5. Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan masyarakat;
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan;
7. Masih terbatasnya alokasi dana yang tersedia untuk menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan masalah adalah:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana transportasi yang memadai dengan biaya murah disetiap anatar Desa/Kelurahan/Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor melalui DIKLAT;
3. Peningkatan kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Perlu peningkatan koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan Koperasi dan UKM;
5. Peningkatan alokasi dana yang memadai dalam menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan;

4.19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan data dan informasi, promosi dan kerja sama serta pengendalian penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *penanaman modal*. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana tersebut diatas, telah dilaksanakan 9 (sembilan) program 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Berikut target dan realisasi keuangan sebagai berikut:

Tabel 4.62.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	814.656.500,00	789.564.336,00	(25.092.164,00)	96,92
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	183.855.000,00	182.478.100,00	(1.376.900,00)	99,25
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	46.122.000,00	46.122.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	138.913.000,00	138.413.500,00	(499.500,00)	99,64
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.275.000,00	6.239.000,00	(36.000,00)	99,43
7	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	253.210.500,00	253.089.128,00	(121.372,00)	99,95
8	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	309.022.500,00	305.461.670,00	(3.560.830,00)	98,85
9	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	66.047.500,00	66.047.500,00	-	100,00
	JUMLAH	1.833.102.000,00	1.802.415.234,00	(30.686.766,00)	98,33

Sumber : LKPJ DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Daerah.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Profil Peluang Investasi; Bimbingan Teknis Penanaman Modal kepada Dunia Usaha; Pemantauan dan pengawasan kegiatan Penanaman Modal.

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Pelayanan Perizinan Satu Pintu; Sosialisasi Penanaman Modal dan Perizinan; Pelayanan Perizinan di tempat.

c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparasi dan keterjangkauan pelayanan perizinan melalui kegiatan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.63.

Pencapaian Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Buku laporan perizinan bulanan dan tahunan	13 buku	13 Buku
		Dokumen pendataan perizinan lingkup Kabupaten	11 Dokumen	11 Dokumen
		Nilai mutu kepuasan masyarakat	79,1 (Baik)	85,08 (Baik)
2	Program Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi	Jumlah Informasi Peluang Usaha Sektor/bidang Usaha Unggulan (Sektor)	1 sektor	1 Sektor
		Jumlah Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal Kepada Masyarakat Dunia Usaha	1 Bimtek	1 Bimtek
		Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Penanaman Modal	12 Kegiatan	12 Kegiatan
3	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Percentase (%) terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSPdi bidang Penanaman Modal Meliputi : Izin Prinsip PMDN, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Perpanjangan IMTA	80%	80%
		Nilai Investasi (dalam Juta rupiah)	Rp. 33.075,-	Rp. 760.848,-

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Jumlah sosialisasi penanaman modal dan perizinan (kali)	7 kali	5 kali
		Jumlah Pelayanan Perizinan di Tempat yang dilaksanakan (kali)	6 kali	6 kali
4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase (%) Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%

Sumber : LKPJ DMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur Th 2018

Dalam Tahun 2018 diterbitkan 417 izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 2.067 izin oleh 11 kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam tabel berikut :

Tabel 4.64.
Jumlah Izin yang diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

Nomor	Jenis Izin	Jumlah
1	Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri	-
2	Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri	-
3	Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri	1
4	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
5	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
6	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
7	Izin Usaha Perluasan (Khusus untuk sektor industri) Penanaman Modal Dalam Negeri	-
8	Izin Usaha Pembagunan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
9	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri	-
10	Izin Mendirikan Bangunan Rumah Dengan Luas Lebih dari 150m ² dan Bangunan Bukan Rumah	62
11	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi	5
12	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-
13	Surat Izin Tempat Usaha Dengan Luas Lebih Dari 150M2	23
14	Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Menengah dan Besar	78
15	Tanda Daftar Perusahaan Untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan luas lebih dari 150m ²	90
16	Tanda Daftar Gudang Untuk Usaha Kecil, Menengah dan Besar dan/atau Tempat Usaha dengan luas lebih dari 150m ²	2
17	Surat Tanda Daftar Waralaba	-
18	Izin Usaha Industri	-
19	Izin Usaha Industri Menengah	-
20	Izin Perluasan Industri	-
21	Tanda Daftar Industri	-
22	Izin Gangguan Non Mikro	1
23	Izin Reklame Non Mikro	5
24	Izin Penelitian	-
25	Izin Usaha Jasa Konstruksi	32
26	Tanda Daftar Usaha Perorangan Jasa Konstruksi	-

Nomor	Jenis Izin	Jumlah
27	Persetujuan Amdal Lalil Untuk Jalan Kabupaten	-
28	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	-
29	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek	-
30	Izin Usaha Angkutan Sungai	-
31	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya	-
32	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan	-
33	Izin Usaha Perkebunan	-
34	Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi	-
35	Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Produksi	-
36	Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan	-
37	Izin Usaha Budidaya Holtikutura	-
38	Izin Usaha Peternakan	-
39	Izin Usaha Depo/Petshop Obat Hewan	-
40	Izin Usaha Toko Obat Hewan	-
41	Izin Dokter Hewan Praktik	1
42	Izin Tenaga Kesehatan Hewan	-
43	Izin Payanan Jasa Medik Veteriner	-
44	Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya	-
45	Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten	-
46	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	-
47	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	-
48	Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-
49	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	-
50	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	-
51	Izin Operasional Puskesmas	-
52	Izin Mendirikan Klinik	-
53	Izin Operasional Klinik	-
54	Izin Toko Obat	1
55	Surat Izin Apotik (SIA)	2
56	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	5
57	Izin Laboratorium	-
58	Izin Penyelenggaraan Optikal	-
59	Izin Toko Alat Kesehatan	-
60	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	-
61	Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi	4
62	Surat Izin Praktik Dokter	17
63	Surat Izin Praktik Dokter Intersip	12
64	Surat Izin Praktik Apoteker	-
65	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	6
66	Surat Izin Praktik Perawat	53
67	Surat Izin Kerja Peraawat	-
68	Surat Izin Praktik Bidan	-
69	Surat Izin Kerja Reflaksionis	-
70	Surat Izin Kerja Optometris	-
71	Surat Izin Praktik Fisioterapis	-
72	Surat Izin Praktik Terais Gigi dan Mulut	11
73	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional	-
74	Surat Izin Pengobat Tradisional	-

Nomor	Jenis Izin	Jumlah
75	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	3
76	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	2
77	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal	-
78	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	-
79	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata	-
80	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata	-
81	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata	-
82	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Makan dan Minuman	-
83	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi	-
84	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	-
85	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata	-
86	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata	-
87	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Wisata Tirta	-
88	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi/Unit Simpan Pinjam Koperasi	1
89	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	-
Jumlah		417

Sumber : LKPJ DMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel 4.65.
Data Realisasi Izin per Kecamatan yang diterbitkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018

NO	KECAMATAN	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN
1.	Ma. Sabak Barat	Izin Mendirikan Bangunan	20
		Surat Izin Tempat Usaha	
		Surat Izin Usaha Perdagangan	88
		Tanda Dafta Perusahaan	87
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	
		Izin Reklame	103
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		Jumlah	298
2.	Ma. Sabak Timur	Izin Mendirikan Bangunan	2
		Surat Izin Tempat Usaha	88
		Surat Izin Usaha Perdagangan	79
		Tanda Dafta Perusahaan	79
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	48
		Izin Reklame	24
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		Jumlah	320
3.	Mendahara	Izin Mendirikan Bangunan	
		Surat Izin Tempat Usaha	41
		Surat Izin Usaha Perdagangan	40

NO	KECAMATAN	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN
		Tanda Dafta Perusahaan	35
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	2
		Izin Gangguan/Ho	20
		Izin Reklame	40
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	178
4.	Mendahara Ulu	Izin Mendirikan Bangunan	2
		Surat Izin Tempat Usaha	87
		Surat Izin Usaha Perdagangan	78
		Tanda Dafta Perusahaan	78
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	48
		Izin Reklame	23
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	216
5.	Geragai	Izin Mendirikan Bangunan	
		Surat Izin Tempat Usaha	80
		Surat Izin Usaha Perdagangan	64
		Tanda Dafta Perusahaan	66
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	13
		Izin Reklame	35
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	248
6.	Dendang	Izin Mendirikan Bangunan	1
		Surat Izin Tempat Usaha	86
		Surat Izin Usaha Perdagangan	84
		Tanda Dafta Perusahaan	84
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	
		Izin Reklame	84
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	341
7.	Kuala Jambi	Izin Mendirikan Bangunan	
		Surat Izin Tempat Usaha	36
		Surat Izin Usaha Perdagangan	26
		Tanda Dafta Perusahaan	33
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	1
		Izin Gangguan/Ho	37
		Izin Reklame	26
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	

NO	KECAMATAN	JENIS IZIN	JUMLAH IZIN
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	159
8.	Rantau Rasau	Izin Mendirikan Bangunan	
		Surat Izin Tempat Usaha	9
		Surat Izin Usaha Perdagangan	8
		Tanda Dafta Perusahaan	8
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	9
		Izin Reklame	8
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	42
9.	Berbak	Izin Mendirikan Bangunan	
		Surat Izin Tempat Usaha	4
		Surat Izin Usaha Perdagangan	4
		Tanda Dafta Perusahaan	4
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	2
		Izin Gangguan/Ho	
		Izin Reklame	4
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	18
10.	Sadu	Izin Mendirikan Bangunan	10
		Surat Izin Tempat Usaha	19
		Surat Izin Usaha Perdagangan	1
		Tanda Dafta Perusahaan	
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	
		Izin Reklame	16
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	62
11.	Nipah Panjang	Izin Mendirikan Bangunan	
		Surat Izin Tempat Usaha	18
		Surat Izin Usaha Perdagangan	19
		Tanda Dafta Perusahaan	14
		Tanda Daftar Gudang	
		Tanda Daftar Industri	
		Izin Gangguan/Ho	14
		Izin Reklame	10
		Izin Penelitian Mahasiswa	
		STD-PB	
		STD-P	
		<i>Jumlah</i>	75
<i>Total izin yang diterbitkan oleh kecamatan</i>			2.067

Tahun 2018, survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2018 sebagai berikut :

- Semester I (pertama) : 81,53 atau kategori B (baik)
- Semester II (kedua) : 85.08 atau kategori B (baik)

Dengan uraian sebagaimana termuat pada tabel berikut :

Tabel 4.66.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Publik Tahun 2018

No.	Unsur Penilaian	Semester I Tahun 2018			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3,140	0,349	8,725	B
U2	Prosedur	3,040	0,337	8,425	B
U3	Waktu Pelayanan	3,040	0,337	8,425	B
U4	Biaya/Tarif	3,760	0,417	10,425	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis	3,120	0,346	8,650	B
U6	Pelayanan	3,260	0,362	9,050	A
U7	Kompetensi Pelaksana	3,240	0,360	9,000	A
U8	Prilaku Pelaksana	2,980	0,331	10,550	A
U9	Maklumat Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,980	0,422	8,275	B
				81,530	B
No.	Unsur Penilaian	Semester II Tahun 2018			
		Nilai Rata-Rata	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi	Mutu Pelayanan
U1	Persyaratan	3.480	0.386	9.650	A
U2	Prosedur	3.280	0.364	9.102	A
U3	Waktu Pelayanan	3.400	0.377	9.435	A
U4	Biaya/Tarif	3.320	0.369	9.213	A
U5	Produk Spesifikasi Jenis	3.500	0.389	9.713	A
U6	Pelayanan	3.400	0.377	9.435	A
U7	Kompetensi Pelaksana	3.540	0.393	9.824	A
U8	Prilaku Pelaksana	3.280	0.364	9.102	A
U9	Maklumat Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.460	0.384	9.602	A
				85.082	B

Sumber : LKPJ DMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Capaian Nilai Investasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 sebesar Rp. 760.847.999.010,24, nilai tersebut diperoleh dari data Laporan kegiatan Penanaman Modal

(LKPM) sebesar Rp. 709.090.699.010,24 dan nilai Surat Izin Usaha (SIUP) sebesar Rp. . 51.757.300.000,00. Nilai SIUP terbagi menjadi dua yaitu SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 40.308.500.000,00 dan SIUP yang diterbitkan oleh Kecamatan sebesar Rp. 11.448.800.000,00.

Dari Total Investasi Tahun 2018 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp. 299.355.517.465,24 dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 461.492.481.545 atau \$ 32.957.627,98 dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp. 14.002,6,-.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan maupun tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung antara lain adalah :

1. Kemampuan dan kompetensi pegawai yang masih perlu ditingkatkan;
2. Persyaratan dan prosedur perizinan belum sepenuhnya tersosialisasikan dan dipahami oleh sebagian masyarakat; dan
3. Adanya kendala jarak bagi sebagian masyarakat yang jauh dan pusat pemerintahan kabupaten untuk mengurus izin.

Terhadap permasalahan di atas, maka alternatif pemecahan masalah yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai melalui Diklat Penanaman Modal yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan secara langsung kepada para pemilik usaha dan bangunan dengan narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan perangkat daerah terkait si beberapa wilayah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
3. Penyampaian hibauan kepada masyarakat pemilik bangunan/pelaku usaha melalui pihak Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk melakukan pengurusan perizinan;
4. Memasang baleho perizinan ditempat strategis disetiap wilayah Kecamatan;
5. Menyebarluaskan informasi perizinan melalui media massa (koran), website Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Lebih mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan kepada Camat dan pelayanan perizinan ditempat dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.

4.20 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
2. penyelenggaraan pengelolaan, pemasaran dan pengembangan sumber daya pariwisata serta dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
3. penyelenggaraan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
4. penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan organisasi kepramukaan;
5. penyelenggaraan pembudayaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu : 1). Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar dengan bidang urusan *kepemudaan dan olah raga* dan Bidang Urusan *Kebudayaan*, 2). Urusan Pilihan dengan bidang Urusan Pariwisata. Pada Tahun 2018, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga melaksanakan 14 (empat belas) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.67.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.246.321.800,00	1.220.477.331,00	(25.844.469,00)	97,93
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	549.567.500,00	545.888.500,00	(3.679.000,00)	99,33
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8.500.000,00	8.489.000,00	(11.000,00)	99,87
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	207.200.000,00	205.229.400,00	(1.970.600,00)	99,05
7	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1.987.772.500,00	1.941.240.764,00	(46.531.736,00)	97,66
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	1.207.280.000,00	1.197.811.000,00	(9.469.000,00)	99,22
9	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA	111.250.000,00	103.874.000,00	(7.376.000,00)	93,37
10	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAH RAGA	6.859.661.500,00	6.047.509.150,00	(812.152.350,00)	88,16
11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	3.225.388.500,00	3.166.671.350,00	(58.717.150,00)	98,18
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.334.981.200,00	1.322.973.700,00	(12.007.500,00)	99,10
13	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	432.168.800,00	427.310.000,00	(4.858.800,00)	98,88
14	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	145.000.000,00	144.900.000,00	(100.000,00)	99,93
JUMLAH		17.366.891.800,00	16.384.174.195,00	(982.717.605,00)	94,34

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis yang meliputi :

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*). Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air; serta pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik di daerah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah; serta fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran lembaga kepemudaan dalam pengembangan pemuda. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan seleksi dan pelatihan paskibraka; Pembinaan Kepemudaan; Komite Nasional Pemuda Indonesia; Peningkatan Wawasan Nasionalisme bagi Generasi Muda.

d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bantuan kegiatan usaha pemuda melalui kegiatan seleksi kegiatan kepemudaan.

e. Program Pembinaan dan Permasarakatan Olahraga

Program pembinaan dan permasarakatan olah raga bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan olah raga kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah; Pengembangan Kompetisi Olahraga (Porprov); Pembinaan olahraga tradisional; serta Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat; dan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (POPDA).

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; UPTD Pengelola Fasilitas Olahraga Dan Tempat Rekreasi;

g. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik didalam maupun diluar negeri. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri; Pengembangan Tehnologi Informasi Pemasaran Pariwisata.

h. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Obyek Wisata Unggulan; Pengembangan Sarana dan Prasarana di ODTW.

i. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan kepariwisataan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.68.
 Pencapaian Program Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang diberdayakan dan difasilitasi	28 organisasi	5 Organisasi
		Jumlah Paskibraka yang berkompeten	38 Orang	36 Orang
		Jumlah Pemuda kader Terbaik	30 Orang	0 Orang
		Jumlah Pemuda yang difasilitasi melalui kegiatan pekan kreatifitas pemuda	36 Orang	0 Orang
2	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Pelatihan pengelolaan usaha	40 kali	0 kali
		Jumlah Usaha Pemuda yang dibina dan difasilitasi	32 KWP	0 KWP
3	Program Pembinaan Dan Permasarakatan Olah Raga	Peringkat POPDA	Peringkat 4	Peringkat 7
		Jumlah Atlet yang berprestasi yang mengikuti even ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	25 orang	0 Orang
		Jumlah Atlet Penyandang Cacat berprestasi yang mengikuti even Olah Raga ditingkat Provinsi dan Nasional	15 Orang	4 Orang
		Prestasi Atlit Sepakbola di tingkat Porprov	Peringkat 1	-
		Peringkat Porprov yang dicapai	Peringkat 1	Peringkat 4
		Jumlah Atlet Festival Olah Raga Tradisional yang di fasilitasi dalam rangka pembudayaan olah raga	15 Orang	5 Orang
		Jumlah Atlet invitational olah raga tradisional	10 Orang	0 Orang
		Peringkat Atlet Olah Raga Tradisional tingkat Provinsi	Peringkat 1	Peringkat 3
		Even Olah raga Tradisional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 kali	0 kali
		Jumlah CABOR Yang dibina dan dilatih	4 Cabor	0 Cabor
4	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Atlet yang dibina dan dilatih	25 orang	15 Orang
		Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	22 unit	8 Unit

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
	Olah Raga	Sarana dan Prasarana olah raga dalam kondisi baik	22 Unit	17 Unit
		Jumlah peralatan dan perlengkapan Cabor		1 set
5	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah situs dan cagar budaya	23 situs	22 Situs
		Jumlah kawasan konservasi dan peninggalan sejarah yang dilindungi	22 Kawasan	22 Kawasan
		Jumlah museum peninggalan sejarah dan cagar budaya	1 unit	1 Unit
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan fungsi sanggar seni	10 Sanggar seni	10 Sanggar Seni
		Pembinaan budaya tradisional di masyarakat	15 kali	0 kali
		Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7 kali	7 kali
		Jumlah Pelatihan seni	7 kali	0 Kali
7	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan Domestik	10.400 orang	11.547 orang
		Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	80 orang	70 Orang
		Jumlah even Pariwisata	6 kali	5 kali
		Jumlah Promosi Pariwisata	4 kali	5 kali
8	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah KSPD yang telah terbentuk	2 KSPD	1 KSPD
		Pemberdayaan Masyarakat pada objek dan daya tarik wisata	30 orang	0 Orang
9	Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah Kemitraan dengan stakeholder pariwisata	3 mitra	2 Mitra
		Masyarakat yang mempunyai kapabilitas dibidang pariwisata	35 orang	0 Orang

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.69.
Capaian Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
Tahun Anggaran 2018

No.	Indikator Kinerja	Capaian
1	Jumlah Even Promosi Pariwisata	5 even
2	Jumlah Penginapan dan Home Stay	7 Buah
3	Jumlah Kawasan Wisata dengan Sarana Prasarana yang Memadai	11 Buah

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel 4.70.
Situs dan Cagar Budaya yang ada dikabupaten tanjung Jabung Timur
sampai dengan tahun 2018

NO	NAMA	LOKASI	KETERANGAN
1	Situs Syah Arfin	Desa Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi	Belum Dilestarikan
2	Situs Benteng Pertahanan Indonesia	Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi	Belum Dilestarikan
3	Situs Perahu kuno	Desa Kuala Lagan Kecamatan Kuala Jambi	Belum Dilestarikan
4	Situs Perahu Kuno	Desa Iambur I Kecamatan Sabak Timur	Sudah Dilestarikan
5	Situs Lambur II (Artefak, Keramik)	Desa Lambur II Kecamatan Sabak Timur	Belum Dilestarikan
6	Situs Kota Harapan	Desa Kota Harapan Kecamatan Sabak Timur	Belum Dilestarikan
7	Situs Siti Hawa	Desa Tri Mulyo Kecamatan Rantau rasau	Sudah Dilestarikan
8	Situs Koto Kandis	Desa Koto Kandis Kecamatan Dendang	Sudah Dilestarikan
9	Situs Orang Kayo hitam	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Sudah Dilestarikan
10	Situs Orang Kayo Pingai	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Sudah Dilestarikan
11	Situs putri Julian	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Sudah Dilestarikan
12	Kompleks Percandian Orang Kayo Hitam	Kel . Simpang Kecamatan Berbak	Belum Dilestarikan
13	Situs Sungai Rambut	Desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak	Belum Dilestarikan
14	Kompleks Air Panas	Desa Pandan Sejahtera Kec. Geragai	Belum Dilestarikan
15	Situs Sungai Raya	Desa Sungai raya Kec.Nipah Panjang	Belum Dilestarikan
16	Situs Sungai Jeruk	Desa Sungai Jeruk Kecamatan Nipah Panjang	Belum Dilestarikan
17	Situs Mendahara	Kecamatan Mendahara	Belum Dilestarikan
18	Situs Syah Ahmad Salim	Kampung Singkep Kecamatan Sabak Barat	Belum Dilestarikan
19	Situs Naga Ukir	Kel . Rano Kecamatan Sabak Barat	Belum Dilestarikan
20	Situs Makam Datuk Paduka Berhala	Desa Sungai Itik Kecamatan Sadu	Belum Dilestarikan
21	Surau 1893	Rasau Desa Kecamatan Berbak	Belum Dilestarikan
22	Situs Lambur I (perahu kuno, batu pipisan, wadah kaca kuno)	Desa Lambur I Kecamatan Ma. Sabak Timur	Sudah Dilestarikan

Sumber : LKPJ Dinas Parbudpora kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan antara lain:

1. Masih kurangnya kapasitas dan kualitas pegawai dibidang kebudayaan;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang sejarah dan BCB;
3. Belum Maksimalnya pemberdayaan kelompok seni dan budaya;
4. Belum terdatanya benda peninggalan sejarah;

Solusi dari permasalahan tersebut adalah:

1. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kecakapan SDM di bidang kebudayaan;
2. Memperbanyak pagelaran kesenian untuk menumbuhkan kreativitas seniman dan kelompok kesenian;
3. Melakukan pendataan dan inventarisasi peninggalan sejarah;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan;

4.21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan urusan perpustakaan dan karsipan;
2. penyelenggaraan pengelolaan dan pembinaan kepustakaan dan karsipan;
3. pelaksanaan evaluasi pelaporan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan karsipan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Perpustakaan dan Karsipan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain terkait bidang perpustakaan dan karsipan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perpustakaan dan Karsipan melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan bidang urusan *Perpustakaan* dan Bidang Urusan *Karsipan*. Dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peranan perpustakaan dalam pembangunan daerah, selama Tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Karsipan melaksanakan 11 (sebelas) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perpustakaan dan Karsipan tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.71.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perpustakaan dan Karsipan Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	697.011.866,00	683.082.190,00	(13.929.676,00)	98,00
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	211.800.000,00	208.668.200,00	(3.131.800,00)	98,52
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	14.800.000,00	13.600.000,00	(1.200.000,00)	91,89
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.700.000,00	7.700.000,00	-	100,00
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.550.000,00	3.550.000,00	-	100,00
7	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA	53.524.000,00	53.444.000,00	(80.000,00)	99,85
8	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN	209.674.000,00	195.902.567,00	(13.771.443,00)	93,43
9	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN	471.708.043,00	471.280.250,00	(427.793,00)	99,91
10	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI ARSIP	188.905.000,00	188.905.000,00	-	100,00
11	PENYELEMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	21.277.520,00	21.277.520,00	-	100,00
	JUMLAH	1.889.950.429,00	1.857.409.727,00	(32.540.702,00)	98,28

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang meliputi :

a. Program pengembangan budaya baca

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat dengan memperluas pengetahuan melalui buku. Program ini didukung oleh kegiatan Lomba bercerita tingkat SD/sederajat; Apresiasi Pengunjung Terbaik.

b. Program pembinaan perpustakaan dan pengembangan Perpustakaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan perpustakaan. *Outcome* dari program ini adalah perpustakaan yang kaya akan koleksi buku. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Lomba perpustakaan sekolah; Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan; Standarisasi Akreditas Kelembagaan dan Evaluasi Tenaga Pengelolaan Perpustakaan; Penyediaan dan Pengolahan Bahan Pustaka Umum Daerah; Pengembangan Perpustakaan Minat dan Penyedian Bantuan Perpustakaan.

c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Perpustakaan

Program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Otomasi Perpustakaan, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Layanan Pepustakaan Keliling.

d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Arsip.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah Penyediaan Layanan Informasi Kearsipan; Bintek Pengelolaan Kearsipan dilingkup OPD; Penyusunan Peraturan Bupati tentang karsipan; Pengelolaan Karsipan di Lingkup OPD; Sosialisasi/Penyuluhan Karsipan di Lingkup Instansi Pemerintah/Swasta.

e. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah Penelusuran arsip dan pengolahan literatur arsip daerah yang bernilai sejarah.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.72.
Pencapaian Program Dinas Perpustakaan dan Karsipan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capain
1	Pengembangan Budaya Baca	Jumlah Pengunjung	17.160 orang	14.299 orang
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan	Terkelolanya Perpustakaan dengan Baik	20 Perpustakaan	20 Perpustakaan

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capain
	Perpustakaan	Jumlah Alat Peraga IPTEK	2 unit	-
3	Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Perpustakaan	IKM layanan perpustakaan	81,15	81,16
		Perpustakaan Desa	43 des	14 desa
		Perpustakaan Sekolah	50 sekolah	36 sekolah
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah pengelola arsip	2 OPD	2 OPD
5	Penyeleman Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip dinamis	180 Dokumen	180 Dokumen

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.73.
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2018

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Jumlah Perpustakaan Kabupaten	1 Unit	1 unit
2	Jumlah Koleksi buku Perpustakaan	11.505 Judul 34.515 Eks	9.654 Judul 33.872 Eks

Sumber : LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dimasa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola perpustakaan dan karsipan dengan mengikutsertakan Bintek dan Magang;
2. Melaksanakan promosi supaya masyarakat berkunjung ke perpustakaan melalui brosur, spanduk dan media cetak;
3. Menambah sarana dan prasarana terutama computer untuk pengembangan otomasi perpustakaan;
4. Mengoptimalkan layanan perpustakaan keliling dalam rangka pemerataan layanan perpustakaan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Membutuhkan tenaga fungsional perpustakaan dan arsiparis.

4.22 Dinas Perikanan

Dinas Perikanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan;
3. Penyelenggaraan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
4. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perikanan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Perikanan*. Selama tahun 2018, Dinas Perikanan telah melaksanakan 11 (sebelas) program yang terdiri dari 5 (*lima*) program rutin dan 6 (enam) program pembangunan serta 31 (*tiga puluh satu*) kegiatan yang terdiri dari 20 (*dua puluh*) kegiatan rutin dan 11 (*sebelas*) kegiatan pembangunan.

Tabel 4.74.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.204.451.885,00	1.083.480.865,00	(102.821.139,00)	89,96
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	110.687.000,00	98.416.765,00	(14.899.940,00)	88,91
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	42.320.000,00	42.233.000,00	(4.750.000,00)	99,79
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH	77.505.515,00	77.500.000,00	-	99,99
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	48.130.000,00	47.757.500,00	(70.000,00)	99,23
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	74.100.000,00	74.051.230,00	(48.770,00)	99,93
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN	198.520.000,00	198.257.050,00	(262.950,00)	99,87
8	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT	240.380.000,00	239.280.000,00	(1.100.000,00)	99,54
9	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	2.365.054.000,00	2.292.797.242,00	(72.256.758,00)	96,94

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	1.293.380.000,00	1.282.422.760,00	(10.957.240,00)	99,15
11	PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	493.147.000,00	489.046.000,00	(4.101.000,00)	99,17
	JUMLAH	6.147.675.400,00	5.925.242.412,00	(222.432.988,00)	96,38

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 6 (enam) program teknis yang meliputi :

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Program ini didukung oleh kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir berupa Restocking dan Mangrove.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program ini didukung oleh kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan.

c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.

Program ini didukung oleh kegiatan Penyuluhan Hukum Laut dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.

d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan budidaya. Program ini didukung oleh kegiatan Pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan; Pengembangan budidaya perikanan berupa kolam, keramba dan tambak; Biaya Operasional Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Dendang.

e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini tujuan sebagai upaya meningkatkan produktivitas perikanan tangkap yang optimal. Program ini didukung oleh kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap,

f. Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Program ini didukung oleh kegiatan Kajian optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan; Pengujian bahan kimia berbahaya terhadap mutu produksi perikanan; Peningkatan sarana pengolahan, pemasaran dan pengembangan distribusi pasar.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.75.
 Pencapaian Program Dinas Perikanan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Persentase Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100%	100%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100%	100%
3	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Persentase Masyarakat nelayan yang memiliki dokumen perijinan	100%	0
4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	2,04%	14,9 %
5	Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	8%	4,13%
6	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	0,3%	1,18%

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel 4.76.
 Jumlah Produksi perikanan
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Subsektor	2016	2017	2018
1	Perairan Laut (ton)	23.491,54	23.380,00	23.656,26
2	Perairan Umum	319,00	459,80	397,20
3	Kolam (ton)	107,50	108,30	129,54
4	Tambak (ton)	140,90	60,40	135,40
5	Keramba Jaring Apung /KJA (ton)	67,25	60,40	66,83
	JUMLAH	24.126,19	24.068,90	24.385,23
6	Jumlah Olahan Hasil Perikanan (Ton)	993,73	1.005,12	1.008,13
7	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kapita)	-	34,13	39,51
8	Benih Ikan/ Ekor	472,119	473,100	482.500

Sumber : LKPJ Dinas Perikanan kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari Tabel diatas produksi perikanan kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum mengalami peningkatan. Produksi Tahun 2018 meningkat 316,33 ton atau 1,31% dari tahun 2017. Perikanan tangkap (Perairan Laut dan Umum) mengalami peningkatan sebesar 213,66 ton atau 0,9% dan Perikanan Budidaya (Kolam, Tambak dan KJA) mengalami peningkatan 102,67 ton atau 44,81 % dari tahun 2017. Peningkatan juga terjadi pada

Produksi Olahan Hasil Perikanan sebesar 3,01 ton atau 0,3%. Untuk Produksi Benih mengalami peningkatan sebesar 9,400 ekor atau 1,99%.

Penurunan produksi antara tahun 2018 dan 2017 terjadi pada perairan umum sebesar 62,6 ton atau 13,61%, hal ini terjadi karena penurunan kualitas air sungai Batang Hari akibat aliran hulu sungai yang semakin tercemar oleh zat merkuri dan zat racun lainnya dari aktivitas illegal mining, selain itu fluktuasi perubahan iklim pada musim panaroba juga mempengaruhi produksi dimana mengurangi aktivitas nelayan menangkap ikan diperairan umum.

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh dinas Perikanan dan Kelautan saat ini adalah :

1. Masih Rendahnya tingkat kemandirian masyarakat penerima bantuan dimana pola pikir dan budaya yang selalu mengharapkan bantuan dari pemerintah;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan sehingga pemanfaatan wilayah pesisir kurang berwawasan lingkungan, masyarakat masih menggunakan bahan/alat tangkap yang merusak lingkungan (deskruktif).

Berdasarkan atas penyebab, kendala dan hambatan diatas, diusulkan untuk dapat dilakukan perbaikan pada periode mendatang antara lain adalah :

1. Meningkatkan kerjasama yang baik dan Sinergis antar nelayan, Melibatkan petugas terkait dilapangan (Tenaga Penyuluh Perikanan, Pokmaswas) dan koordinasikan sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. menyeleksi/inventarisir permintaan masyarakat dalam pengalokasian dana sesuai dengan kondisi lapangan dan kegiatan terkait bantuan kepada masyarakat.

Strategis pemecahan masalah pembangunan perikanan tahun 2018 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Memiliki Sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang perikanan
 - Peningkatan Sumberdaya Manusia yang memiliki kompetensi dalam pengalihan dan penerapan teknologi sesuai kebutuhan.
2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap:
 - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti PPI, BBM dan perbengkelan dan orientasi penangkapan lebih jauh.
3. Meningkatkan produksi perikanan budidaya
 - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti melengkapi fasilitas BBI, penyiapan Keramba Jaring Apung (KJA), kolam masyarakat sebagai upaya ketahanan pangan perikanan dan membentuk kawasan minapolitan yang mandiri.
4. Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk hasil perikanan.

- Peningkatan produk hasil olahan perikanan yang berkualitas, Perluasan distribusi pasar yang mampu memfasilitasi penjualan hasil perikanan.
- 5. Penataan ruang, pemberdayaan masyarakat dan pengendalian sumberdaya ikan.
 - Pemanfaatan dan Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal terhadap kawasan jenis biota perairan, Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomis tinggi dan penurunan tingkat pelanggaran dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan.

4.23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
2. Penyelenggaraan pengembangan dan pengawasan prasarana sarana pertanian;
3. Penyelenggaraan pembinaan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
4. Penyelenggaraan program penyuluhan pertanian;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan pertanian yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Pertanian*. Pada Tahun 2018, Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan 12 (dua belas) program dan 58 (lima puluh delapan) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.77.
 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.166.274.556,00	2.056.603.983,00	(109.670.573,00)	94,94
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	700.230.000,00	657.195.515,00	(43.034.485,00)	93,85
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	101.650.000,00	82.190.000,00	(19.460.000,00)	80,86
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	124.581.100,00	122.595.250,00	(1.985.850,00)	98,41
6	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.608.039.500,00	1.475.364.849,00	(132.674.651,00)	91,75
7	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	8.262.776.539,00	7.766.474.541,00	(469.301.998,00)	93,99
8	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	91.898.000,00	90.755.576,00	(1.142.424,00)	98,76
9	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN	223.452.000,00	212.138.100,00	(11.313.900,00)	94,94
10	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	1.585.597.256,00	1.557.489.750,00	(28.107.506,00)	98,23
11	PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	582.307.525,00	565.353.400,00	(16.954.125,00)	97,09
12	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	306.637.274,00	291.022.688,00	(15.614.586,00)	94,91
JUMLAH		15.773.443.750,00	14.897.183.652,00	(876.260.098,00)	94,44

Sumber : LKPJ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 7 (tujuh) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan petani serta motivasi kelompok tani dalam budidaya usaha tani. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani; Operasional UPTD BPP Kecamatan Sadu; Operasional UPTD BPP Kecamatan Nipah Panjang; Operasional UPTD BPP Kecamatan Rantau Rasau; Operasional UPTD BPP Kecamatan Berbak; Operasional UPTD BPP Kecamatan Muara Sabak Timur; Operasional UPTD BPP Kecamatan Muara Sabak Barat; Operasional UPTD BPP Kecamatan Dendang; Operasional UPTD BPP Kecamatan Geragai; Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendaerah Ulu; Operasional UPTD BPP Kecamatan Mendaerah; Operasional UPTD BPP Kecamatan Kuala Jambi; Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan; Jambore Nasional dan HKP, PEDA.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan Ketahanan Pangan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk

- Pengembangan Pangan; Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi; Pengembangan Perbenihan/Pembibitan; Perbenihan/Pembibitan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura; Pembiayaan dan Investasi Pertanian; Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal; Pengembangan Intensifikasi Tanaman Palawija; Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Hortikultura; Pengembangan Sumber- Sumber Air (pendampingan pengawasan).
- c. **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan**
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Promosi Atas Hasil Produk Pertanian Tanaman Pangan; Promosi Atas Hasil Produk Hortikultura.
 - d. **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian**
Program ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian melalui intensifikasi, Dengan penerapan teknologi yang tepat sesuai dengan spesifik lokasi (daerah pasang surut) diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian.
 - e. **Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan**
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian; Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan; Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan; Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengolahan Lahan; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.
 - f. **Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian**
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan Pertanian/Perkebunan; Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan; Pemberdayaan Komisi Penyuluhan Kabupaten.
 - g. **Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarna Pertanian**
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan statistik, monitoring dan evaluasi pertanian.
Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.78.
Pencapaian Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Powertresher (unit)	9 unit	15 Unit
		Alat panen padi (unit)	6 unit	7 Unit
		Corn Seller (unit)	3 unit	16 Unit
		Terpal plastik (lembar)	350 Lembar	150 Lembar
		Produksi padi (Ton)	87.956 Ton	92.273 Ton

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Luas Tanam Padi (Hektar)	20.498 Hektar	26.582 Hektar
		Luas panen Padi (Hektar)	20.942 Hektar	21.354 Hektar
		Provitas Tanaman padi (Ton/Ha)	4 Ton/Ha	4,13 Ton/Ha
		Produksi benih padi (ton)	330 ton	418,3 ton
		Produksi benih kedelai (Kg)	37.500 Kg	22.000 Kg
		Perencanaan pra desain lahan cadangan (Hektar)	1.650 Ha	0 Hektar
		Produksi Tanaman Jagung (Ton)	10.535 Ton	14.456 Ton
		Luas Tanam jagung (Hektar)	1.750 Hektar	1.715 Hektar
		Luas panen jagung (Hektar)	1.505 Hektar	2.121 Hektar
		Provitas Tanaman jagung (Ton/ Ha)	7 Ton/Ha	6,82Ton/Ha
		Produksi Tanaman kedelai (ton)	1.004 Ton	332 Ton
		Luas Tanam kedelai (Hektar)	800 Hektar	73 Hektar
		Luas panen kedelai (Hektar)	712 Hektar	247 Hektar
		Provitas Tanaman kedelai (Ton /Ha)	1 Ton/Ha	1,32 Ton/Ha
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Petani yang terlatih (angkatan)	2 Angkatan	2 Angkatan
		Jumlah LKM yang dievaluasi (Kelompok)	66 Kelompok	7 Kelompok
		Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(Pratama ke madya)	1 Madya	11 Madya
		Jumlah meningkatnya kelas kemampuan UPTD BPP Kec.(madya ke aditama)	1 aditama	1 aditama
		Mendorong Motivasi Kelompok Peternak (Kelompok)	3 Kelompok	3 Kelompok
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya promosi/pameran luar daerah/luar provinsi	5 & 4 kali	5 & 4 kali
		Jumlah Komoditas Unggulan yang dipasarkan	6 Produk (Beras Merah, Beras Cap Buah Nipah, Pisang, Cabe, dodol nenas)	6 Produk (Beras Merah, Beras Cap Buah Nipah, Pisang, Cabe, dodol nenas)
4	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Mesin Pemotong Rumput (Unit)	15 unit	9 Unit
		Hand Sprayer Electrik (unit)	20 unit	128 Unit
5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Semangka (Ton)	2.420 ton	340,26 Ton
		Provitas Tanaman semangka (Ton /Ha)	7,8 Ton/Ha	3,18 Ton/ha
		Luas Panen Tanaman Semangka (Hektar)	365 Ha	107 Ha

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Luas Tanam Nanas (Hektar)	16 Ha	16 Ha
		Luas Panen Nanas (Hektar)	16 Ha	16 Ha
		Produktivitas Nanas (Kwintal/rumpun)	0,04 Kwintal/Rumpun	0,03 Kwintal/Rumpun
		Produksi Nanas (Ton)	416 Ton	483 Ton
		Produksi benih padi (ton)	330 Ton	418,3 Ton
		Produksi beras merah (Ton)	84,04 Ton	54,15 Ton
		Luas Panen Beras Merah(hektar)	22 Ha	15 Ha
		Provitas Beras Merah (Ton/Hektar)	3,82 Ton/Ha	3,61 Ton/Ha
		Jalan Usaha tani (Km)	4 Km	2,9 Km
		Dam Parit (unit)	30 Unit	25 Unit
		Pra/disain lahan cadangan pangan dan pemetaan lahan (Hektar)	700 Ha	0 Ha
6	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluhan yang handal & propesional	6 Paket	4 Paket
		Jumlah terlaksananya kegiatan pendampingan bagi petani	6 Paket	6 Paket
		Jumlah terlaksananya pemberdayaan kelembagaan penyuluhan	8 paket	7 Paket
7	Pengembangan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Pertanian	Percentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian Hand Traktor	31%	70%

Sumber : LKPJ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.79.
Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Anggaran 2018

No.	Indikator Kinerja	Capaian
1	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	104,73
2	Jumlah Handtraktor Rotari	3 Unit
3	Jumlah Rice Transplanter	12 Unit
4	Jumlah Sampel Ubinan	238 sampel
5	Indeks Pertanaman 2 kali setahun (IP 200)	1.700 Ha
6	Produksi tanaman cabe	761 ton
7	Produktivitas tanaman cabe	2,3 ton/ha

Sumber : LKPJ Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Tingkat kesuburan tanah menurun;
2. Petani belum melaksanakan anjuran budidaya yang baik dan benar dari penyuluhan pertanian sehingga minim inovasi;
3. Pengelolaan tata air belum optimal;
4. Kelembagaan petani belum berkembang;
5. Motivasi petani rendah/petani belum mandiri;
6. Tenaga kerja terbatas disbanding luas lahan yang dimiliki;
7. Infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan belum memadai;
8. Akses permodalan sulit /Petani kurang modal;
9. Harga gabah rendah ditingkat petani.

Beberapa langkah tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Pengelolaan tata air mikro/pembangunan jaringan irigasi, parit cacing, pembangunan dam parit serta pintu air dan optimalisasi lahan;
2. Dalam usaha budidaya petani hendaknya menggunakan pupukorganik dalam jumlah yang tepat untuk satuan luas usaha tani mereka dan mengurangi ketergantungan pupuk kimia;
3. Pemberdayaan kelembagaan petani dioptimalkan sehingga kenaikan kelas kelompoktani berimplikasi pada pengetahuan, sikap dan keterampilan petani;
4. Mengoptimalkan kiprah penyuluhan pertanian dalam usaha menumbuhkan motivasi petani dengan strategi learning by doing;
5. Mengoptimalkan penggunaan alsintan;
6. Berkoordinasi dengan PPL dan Babinsa dalam mengatasi masalah harga gabah petani.

4.24 Dinas Perkebunan dan Peternakan

Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi perkebunan, usaha dan sarana usaha perkebunan;

3. Penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan perlindungan lahan dan tanaman perkebunan;
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi ternak serta pengawasan terhadap mutu, peredaran dan pengendalian benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak;
5. Penyelenggaran perlindungan dan pelayanan umum kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Penyelenggaran evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian sub urusan perkebunan dan peternakan;
7. Pelaksanaan administrasi Dinas Perkebunan dan Peternakan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perkebunan dan peternakan yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perkebunan dan Peternakan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Pertanian*. Pada Tahun 2018, Dinas Perkebunan dan Peternakan melaksanakan 14 (empat belas) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perkebunan dan Peternakan tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.80.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perkebunan dan Peternakan
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.838.483.700,00	1.807.008.268,00	(31.475.432,00)	98,29
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	562.660.000,00	551.683.144,00	(10.976.856,00)	98,05
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	58.925.000,00	58.668.000,00	(257.000,00)	99,56
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	32.000.000,00	31.887.000,00	(113.000,00)	99,65
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	146.250.000,00	146.014.000,00	(236.000,00)	99,84
6	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	214.904.200,00	211.062.500,00	(3.841.700,00)	98,21
7	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	1.303.538.000,00	1.286.862.000,00	(16.676.000,00)	98,72
8	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	292.500.000,00	288.819.500,00	(3.680.500,00)	98,74
9	PENINGKATAN PRODUSKI HASIL PETERNAKAN/PERKEBUNAN	1.273.351.300,00	1.248.301.500,00	(25.049.800,00)	98,03
10	PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN/PERKEBUNAN	594.219.800,00	532.932.527,00	(61.287.273,00)	89,69
11	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	125.000.000,00	124.542.200,00	(457.800,00)	99,63
12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI LAHAN PERKEBUNAN	590.895.000,00	565.045.780,00	(25.849.220,00)	95,63
13	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	215.197.000,00	211.961.500,00	(3.235.500,00)	98,50
14	PROGRAM PENCiptaan TEKNOLOGI DAN INOVASI PERTANIAN BIDANG INDUSTRI BERKELANJUTAN	107.000.000,00	104.212.192,00	(2.787.808,00)	97,39
	JUMLAH	7.354.924.000,00	7.169.000.111,00	(185.923.889,00)	97,47

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 9 (sembilan) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis; Penilaian Lomba-Lomba Peternakan; Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan kawasan dan peningkatan usaha masyarakat dibidang perkebunan; Pengolahan Tata Air Mikro.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk mengetahui masalah peternakan, memelihara kesehatan dan mencegah penyakit menular ternak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak.

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/perkebunan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan menjaga kesehatan ternak, mendistribusikan bibit ternak kepada masyarakat, meningkatkan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat serta pengembangan bibit unggul Perkebunan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Balai Pembibitan Ternak (BPT); Pengembangan Inseminasi Buatan (IB); Pengembangan Hijau Pakan Ternak; Pembentukan Sentra Peternakan Rakyat (SPR); Pengembangan Budidaya Ternak; Pengembangan Bibit unggul Pertanian/Perkebunan.

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan/Perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan/perkebunan bertujuan untuk membantu/memfasilitasi kelompok peternak dalam meningkatkan usahanya. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan berupa Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah; Penguatan Fungsi Pasar Ternak; Pembinaan Pelaku Usaha Ternak; Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

f. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan ternak yang ada di masyarakat, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Sumber Daya Sarana, Prasarana Keswan Dan Kesmavet.

g. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Perlindungan Lahan dan Tanaman Perkebunan; Pengendalian Hama dan Penyakit Perkebunan.

h. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

i. Program Penciptaan Tekhnologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan inovasi pertanian dan program strategis nasional.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.81.
Pencapaian Program Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Mendorong Motivasi Kelompok Peternak (Kelompok)	3 Kelompok	5 Kelompok
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Percentase Peningkatan Ketahanan Pangan	100%	100%
3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Operasional Hari Pasar	2 kali	1 kali
		Jumlah Pelaku Usaha Ternak Lokal yang dibina (Kelompok)	1 Kelompok	3 Kelompok
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan Budidaya Ternak Potong (Kelompok)	1 Kelompok	1 Kelompok
		Pengembangan Budidaya Ternak Unggas (Ekor)	500 ekor	300 Ekor
		Jumlah Akseptor IB (akseptor)	2.100 Akseptor	2.294 Akseptor
		Jumlah peningkatan populasi ternak (ekor)	4.069.936 Ekor	4.123.519 Ekor
		Jumlah peningkatan produksi daging (Kg)	240.642 Kg	234.802,62 Kg

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
		Ruminansia		
		Jumlah peningkatan produksi daging (Kg) Unggas	1.436.242 Kg	942.458,30 Kg
		Pengembangan hijauan pakan ternak	0,5 Ha	0,56 Ha
		Jumlah Sentra usaha peternakan rakyat	1 SPR	0 SPR
		Jumlah Populasi ternak unggulan	113 ekor	113 Ekor
7	Pengembangan Sumber Daya Sarana Dan Prasarana Pertanian	Percentase tersedianya sarana prasarana pertanian	31%	29,5%
8	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel	100 sampel	151 Sampel
		Pembinaan Tempat Pemotongan Hewan (Kali)	3 kali	8 kali
9	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Lahan Perkebunan	Percentase Penurunan tingkat kebakaran dan hama Penyakit perkebunan	0,16%	0,05%
		Percentase Penurunan serangan Hama dan Penyakit Tanaman	2%	0,21%
10	Penciptaan Tekhnologi dan Inovasi Pertanian Bidang Industri Berkelanjutan	Percentase Teknologi dan Inovasi Pertanian Industri Berkelanjutan	1 Program	1 Program
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	Percentase Penurunan Angka Kematian Ternak (%)	2,6%	1,6%

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2018

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular bertujuan menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular hewan dan ternak. Pencegahan ini melalui Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak. Target pelayanan kesehatan hewan tahun 2018 sebanyak 31.260 Ekor dan terealisasi sebanyak 32.348 Ekor atau sebesar 103,48%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.82.
Pelayanan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
1	Vaksinasi Rabies	2.500	3.019
2	Vaksinasi SE	3.000	2.726

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi
3	Vaksinasi Jembrana	1.500	1.655
4	Vaksinasi ND	18.650	17.120
5	Desinfeksi	300	292
6	Eliminasi	30	20
7	Pengobatan Ternak	5.080	7.314
8	Pemeriksaan Gangguan Reproduksi	100	101
9	Pengobatan Gangguan Reproduksi	100	101
Jumlah		31.260	32.348

Peningkatan Produksi ternak diantaranya dilakukan melalui Pengembangan budidaya ternak potong yang dilaksanakan oleh balai pembibitan ternak (BPT) dengan target Jumlah populasi ternak unggul sebanyak 113 Ekor dan terealisasi sebanyak 113 Ekor atau sebesar 100%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.83.
Perkembangan Ternak Sapi UPTD-BPPT
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Uraian	Ternak			Keterangan
		Dewasa	Anak	Jumlah	
1	UPTD BPT Mendahara Ulu	26	24	50	Inti
2	KT. Agro Mandiri	3	4	7	Plasma
3	KT. Serasih II	4	4	8	Plasma
4	KT. Makmur Jaya	8	13	21	Plasma
5	Desa Merbau	10	3	13	Plasma
6	KT. Jati Mulya I	11	3	14	Plasma
Jumlah				113	

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pembibitan Ternak (BPT) Dinas Perkebunan dan Peternakan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2009 yang terletak di Desa Sinar Wajo Kecamatan Mendahara Ulu dengan luas areal yang telah dikelola sampai saat ini ±4,7 Ha dan tahun 2017 melakukan pengembangan dengan luas Lahan 12 Ha di lokasi Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat yang pada tahun 2018 dipergunakan sebagai hijauan pakan ternak.

Pengembangan inseminasi buatan (IB) Merupakan kegiatan yang sedang digalakkan dari Pemerintah Pusat yaitu sapi indukan wajib bunting (UPSUS SIWAB) meningkatkan populasi ternak melalui kawin suntik (IB) dalam mencapai swasembada daging. Target Tahun 2018 sebanyak 2.100 Akseptor dan terealisasi sebanyak 2.294 Akseptor atau sebesar 109,2%, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.84.
Pengembangan inseminasi buatan (IB)
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Iseminasi Buatan	2.750	2.138	2.750	2.610	2.800	2.807
2	Akseptor	2.000	1.887	2.050	2.327	2.100	2.294
3	Kelahiran / Anak	1.000	667	1.050	518	1.100	1.331

Jumlah peningkatan populasi ternak dan Produksi Daging tahun 2018 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.85.
Peningkatan Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Ternak	2016		2017		2018*	
		Target (ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (ekor)	Realisasi (Ekor)	Target (ekor)	Realisasi (Ekor)
1	Sapi	18.318	18.518	19.675	19.543	21.032	20.328
2	Kambing	40.298	40.198	42.217	41.930	44.136	42.987
3	Ayam Buras	3.578.885	3.629.402	3.749.308	3.797.366	3.919.731	3.976.841
4	Ayam Ras	62.396	22.990	65.367	36.131	68.338	43.476
5.	Itik	33.507	33.502	35.103	35.072	36.699	39.885

*Angka Sementara

Tabel 4.86.
Peningkatan Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Produksi	2016		2017		2018 *	
		Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Target (Kg)	Realisasi (Kg)	Target (Kg)	Realisasi (Kg)
1	Ruminansia	219.716	196.413,02	230.179	224.874,98	240.642	234.802,62
2	Unggas	1.311.352	796.368,18	1.373.797	895.872,25	1.436.242	942.458,30

*Angka Sementara

Pemberian bantuan bibit tanaman perkebunan yang dilakukan Dinas Perkebunan dan Peternakan, Luas Tanaman, produksi dan produktivitas hasil Perkebunan Rakyat, tahun 2018 target sebanyak 40.000 batang terealisasi sebanyak 37.980 batang atau sebesar 94,55%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.87.
Bantuan Bibit Perkebunan untuk Masyarakat

NO	KOMODITI	2018	
		Σ Bibit (batang)	Poktan Penerima
1	Bibit Pinang Unggul Betara	20,000	KT Berkat Rukun Kel. Simpang dan KT Sumber Makmur desa Rantau Rasau desa
2	Bibit Kakao	11,500	KT Mekar Sari dan KT Teluk Bahagia desa Telago Limo
3	Bibit Lada	6,480	KT Sumber Makmur desa Jati Mulyo
	Jumlah	37,980	

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2018

Tabel 4.88.
Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2018 (Ha)
1	Karet	7,768
2	Kelapa Sawit	33,872
3	Kelapa Dalam	58,521
4	Kelapa Hibrida	66
5	Lada	42
6	Kakao	400
7	Pinang	9,095
8	Kopi Rubusta	3,232
9	Kemiri	8

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2018

Tabel 4.89.
Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2018 (Ton)
1	Karet	3,647
2	Kelapa Sawit	47,806
3	Kelapa Dalam	51,398
4	Kelapa Hibrida	54
5	Lada	14
6	Kakao	212
7	Pinang	3,207
8	Kopi Rubusta	1,237
9	Kemiri	4

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2018

Tabel 4.90.
Produktifitas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Unggulan

No	Komoditi	ASEM 2018 (Ton/Ha)
1	Karet	945
2	Kelapa Sawit	2,039
3	Kelapa Dalam	1,156
4	Kelapa Hibrida	931
5	Lada	583
6	Kakao	895
7	Pinang	478
8	Kopi Rubusta	543
9	Kemiri	667

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada musim kemarau masih sering terjadi kebakaran lahan dan kebun yang mengakibatkan aktivitas masyarakat dan pemerintah

terganggu serta mengakibatkan kerugian fisik secara signifikan. Pencegahan dan Pengendalian kebakaran lahan dan kebun rakyat sangat dibutuhkan melalui pemadaman titik api. Luas kebakaran lahan dan kebun pada tahun 2018 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 59,43 Ha, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.91.
Kejadian Kebakaran lahan dan kebun tahun 2018 berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Muara Sabak Timur	0,25
2	Muara Sabak Barat	2,99
3	Kuala Jambi	0
4	Dendang	5,91
5	Berbak	0,50
6	Geragai	1,18
7	Mendahara	0
8	Mendahara Ulu	19
9	Nipah Panjang	0,25
10	Rantau Rasau	4
11	Sadu	25,33

Luas serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan pada tahun 2018 yaitu 240 Ha dari luas perkebunan masyarakat Kab. Tanjung Jabung Timur, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.92.
Kejadian serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Ma. Sabak Timur	80	Desa Lambur Luar / Kebun Masyarakat
2	Nipah Panjang	50	Kel. Nipah Panjang I / Kebun Masyarakat
3	Mendahara	110	Desa Pangkal Duri, Desa Mendahara Tengah / Kebun Masyarakat
	Jumlah	240	

Serangan hama dan penyakit yang menyerang pada Tanaman Kelapa Dalam Jenis Organisme Penganggu Tanaman (OPT) Kumbang Tanduk (*Oryctes Rhinoceros L*) dan Kumbang Janur (*Brontispa Longissima*) dengan metode pengendalian Pembersihan lahan, Injeksi pada batang dan akar kelapa dengan Insektisida Asefat 75%, Pemasangan alat perangkap kumbang dengan Fero-co dan Fero-rhino.

Dalam upaya pencapaian program/kegiatan Dinas Perkebunan dan Peternakan masih terkendala oleh beberapa permasalahan :

1. Kurang terbukanya pihak perusahaan terhadap instansi terkait mengenai permasalahan izin dan laporan perkembangan perkebunan;
2. Masih sering terjadi kebakaran kebun dan serangan hama penyakit perkebunan di kebun masyarakat yang mengakibatkan kerugian fisik tanaman;
3. Masih dijumpai instrusi air laut yang mengakibatkan tanaman kelapa dalam sangat terganggu pertumbuhannya dan menurunkan produksi buah kelapa;
4. Masih kurangnya sumber pakan ternak dan sarana parsarana pendukung;
5. Masih kurangnya bibit dan populasi ternak;
6. Perlunya peningkatan produksi daging dan telur;
7. Perlunya peningkatan mutu dan jaminan produksi ternak;
8. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit seperti Rabies, AI dan Jemberana;
9. Masih banyaknya masyarakat yang tekena gigitan anjing liar;
10. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengamanan ternak yang mengganggu ketertiban umum.

Sedangkan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Melakukan Sosialisasi kepada perusahaan agar melaporkan perkembangan perkebunan;
2. Melakukan pencegahan dan penanggulangan serta sosialisasi tentang kebakaran lahan kebun dan pengendalian dan pencegahan hama penyakit pada kebun masyarakat;
3. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM);
4. Penyediaan pakan ternak pada lokasi kawasan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung peternakan;
6. Penyediaan bibit ternak pada UPTD Pembibitan;
7. Menyediakan tenaga IB, PKB dan ATR serta sarana dan prasarana IB yang dibutuhkan;
8. Penempatan paramedis keswan pada setiap kecamatan;
9. Melaksanakan pencegahan melalui vaksinasi secara teratur dan melakukan pendeksiyan terhadap penyakit

4.25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan/perumusan dan menginformasikan kebijakan teknis dan administrasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Pelaksanaan Pengelolaan, pengendalian dan pengawasan pada bidang perindustrian da perdagangan;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pengaturan pelaksanaan kebijakan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Dinas Perindustrian dan perdagangan melaksanakan urusan Pilihan dengan bidang urusan *Perindustrian* dan bidang urusan *Perdagangan*. Pada Tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 14 (empat belas) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.93.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	907.242.300,00	878.228.580,00	(29.013.720,00)	96,80
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	281.328.000,00	257.133.500,00	(24.194.500,00)	91,40
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	22.700.000,00	22.000.000,00	(700.000,00)	96,92
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	54.000.000,00	43.160.000,00	(10.840.000,00)	79,93
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	83.095.044,00	80.532.000,00	(2.563.044,00)	96,92
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6.400.000,00	6.400.000,00	-	100,00
7	PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	27.870.000,00	27.460.000,00	(410.000,00)	98,53
8	PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	225.648.994,00	215.644.670,00	(10.004.324,00)	95,57
9	PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	243.100.252,00	241.442.829,00	(1.657.423,00)	99,32
10	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA- SENTRA INDUSTRI POTENSIAL	2.346.150.000,00	2.312.152.095,00	(33.997.905,00)	98,55
11	PEMANTAPAN, PENGEMBANGAN INOVASI DAN KREASI PRODUK KERAJINAN	323.300.000,00	320.090.916,00	(3.209.084,00)	99,01
12	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	230.919.739,00	199.272.900,00	(31.646.839,00)	86,30
13	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	8.046.773.000,00	7.865.951.419,00	(180.821.581,00)	97,75
14	PENINGKATAN PELAYANAN PENGELOLAAN PERPASARAN	369.525.981,00	364.007.000,00	(5.518.981,00)	98,51
	JUMLAH	13.168.053.310,00	12.833.475.909,00	(334.577.401,00)	97,46

Sumber : LKPJ Disperindag Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 8 (delapan) program teknis yang meliputi :

a. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri;

b. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri; Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah; Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Swasta.

c. Program Penataan Struktur Industri

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri; Pameran Bidang Perindustrian

d. Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Sentra- Sentra Potensial;

e. Program Pemantapan, Pengembangan Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemantapan dan Pengembangan Tata Kelola Dekranasda, Pelatihan dan Inovasi Kerajinan dan Pameran dan Promosi Produk Kerajinan Dekranasda

f. Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa; Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kmetrologian Daerah; Sosialisasi Perlindungan Konsumen.

g. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Temu Usaha Misi Dagang Dan Pasar Lelang Agro; Outlet Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Pembangunan Pasar Sehat Tradisional; Sosialisasi Distribusi Barang Bersubsidi; Informasi Harga Komoditi Pasar Harian dan Kalangan; Pameran dan Promosi Perdagangan; Pengembangan Database Pelaku Usaha Perdagangan Informal dan Formal; Bazar/Pasar Murah.

h. Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Perpasaran

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Operasional Perpasaran; Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Rehab Pasar Tradisional; dan Penertiban dan Pegawasan Perdagangan Pasar Daerah dan PKL di lingkungan Pasar Daerah

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.94.
Pencapaian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yg memanfaatkan TTG	9 KUB	5 KUB
2	Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah IKM yang produktif	1.000 UKM	668 IKM
3	Program Penataan Struktur Industri	Jumlah IKM Formal	100 IKM	150 IKM
4	Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Jumlah Sentra IKM	6 Sentra	12 Sentra
5	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Pelaku IKM yang Menerima Bantuan Mesin dan Peralatan IKM	9 IKM	5 IKM
		Jumlah Pelaku IKM yang Mendapatkan Pelatihan	9 IKM	72 IKM
6	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	4 kali	12 Kali
		Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar	2 kali	1 Kali
7	Pengembangan Sentra Inovasi dan Kreasi Produk Kerajinan	Persentase Peningkatan Produk Kerajinan	100%	50,00%
6	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah pasar yang direvitalisasi	1 unit	1 Unit

Sumber : LKPJ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Capaian lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 adalah Pengembangan Sarana Prasarana Perdagangan yaitu Pembangunan Fasilitas Pasar di Kecamatan Geragai Los Ikan Pasar Blok D, Pasar Rantau Indah Kecamatan Dendang, Pasar Lambur II Kecamatan Muara Sabak Timur dan Pasar Teluk Majelis Kecamatan Kuala Jambi, Sentra batik di Desa Lambur I Kecamatan Muara Sabak Timur.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan anta lain :

1. Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan Pelaku usaha;

2. Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan pelaku usaha;
3. Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan;
5. Masih terbatasnya alokasi dana yang tersedia untuk menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan untuk meminimalisir dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui diklat teknis dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha;
2. Peningkatan koordinasi antar dinas instansi yang baik dalam rangka pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha;
3. Terwujudnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga;
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan biaya yang murah disetiap dan antar Desa / Kelurahan / Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga biaya produksi dan harga jual produk dapat ditekan.

4.26 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perencanaan pembangunan Daerah;
2. koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran pemerintah Daerah;
3. penyusunan rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;

4. penyusunan program dan nota keuangan/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
5. pelaksanaan pemantuan, evaluasi rencana dan program serta dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
6. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan administrasi badan perencanaan pembangunan Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda menyelenggarakan urusan Penunjang pemerintahan Bidang urusan *Perencanaan*. Pada Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.95.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	867.817.200,00	829.336.070,00	(38.481.130,00)	95,57
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	628.632.495,44	588.998.807,00	(39.633.688,44)	93,70
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	22.025.000,00	22.025.000,00	-	100,00
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	29.370.000,00	29.284.000,00	(86.000,00)	99,71
6	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	298.533.500,00	286.294.000,00	(12.239.500,00)	95,90
7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.240.868.092,26	1.163.132.090,00	(77.736.002,26)	93,74
8	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	730.999.500,00	693.841.947,00	(37.157.553,00)	94,92
9	PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	940.837.500,00	708.914.033,00	(231.923.467,00)	75,35
10	PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH	622.011.000,00	613.383.532,00	(8.627.468,00)	98,61
JUMLAH		5.396.094.287,70	4.950.209.479,00	(445.884.808,70)	91,74

Sumber : LKPJ Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 5 (lima) program teknis yang meliputi :

a. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini bertujuan untuk pengumpulan data, dan updating data untuk dokumen perencanaan pembangunan, profile daerah, serta proyeksi analisa ekonomi makro dan analisa lainnya guna mendukung perencanaan pembangunan daerah serta stakeholder. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan berupa Penyusunan Dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

Perencanaan; Penyusunan Profile Daerah; Pengumpulan, Updating Dan Analisis Data Dan Informasi; Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan yang akan ditampung pemerintah daerah untuk masa yang akan datang, seperti : RPJP, RPJM, Renstra, RPKD, Renja, KUA, PPAS. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik; Penyelenggaraan Musrenbang RKPD; Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Penyusunan Rencana Kerja (RENJA); Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ); Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan; Perubahan RPJMD 2016-2021.

c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah; Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Ekonomi; Penyusunan Publikasi Susenas; Fasilitasi kerjasama pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi antar daerah; Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK).

d. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program ini bertujuan untuk pengendalian dan pengaturan kebijakan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar. Sasaran umum yang akan dicapai adalah meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total, menurunnya angka kematian kasar, meningkatnya ketahanan sosial dan budaya, meningkatnya kedudukan dan peranan perempuan, meningkatnya partisipasi aktif pemuda, serta meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya; Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya; Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Pendataan mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu PPFM Kab. Tanjung Jabung Timur.

e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk pengendalian dan pengaturan kebijakan guna mewujudkan pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi seluruh sektor ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup di masa mendatang. Pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta keserasian penataan ruang dalam upaya terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring & Evaluasi Bidang Infrastruktur Wilayah; Fasilitasi Program Perumahan Rakyat; Pembangunan Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP); Pendampingan Penyusunan Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP); Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.96.
Pencapaian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Pengembangan Data Dan Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	100%	100%
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Pembangunan	84%	96,70%
3	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi	16%	3,30%
4	Perencanaan Sosial Budaya	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Sosial Budaya	16%	3,30%
5	Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Dan LH	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Infrastruktur wilayah	16%	3,30%

Sumber : LKPJ Bappeda, 2018

Secara umum tidak ada permasalahan yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 namun ada beberapa langkah penting yang akan dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan di masa mendatang yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan;
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas;
5. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat;
6. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

4.27 Inspektorat

Inspektorat merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan bidang urusan *Pengawasan*. Pada Tahun 2018, Inspektorat melaksanakan 7 (tujuh) program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Inspektorat tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.97.
 Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat
 Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	620.132.296,00	616.570.880,00	(3.561.416,00)	99,43
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	460.300.000,00	457.653.500,00	(2.646.500,00)	99,43
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	15.000.000,00	14.944.500,00	(55.500,00)	99,63
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	14.000.000,00	13.736.350,00	(263.650,00)	98,12
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.550.000,00	3.549.000,00	(1.000,00)	99,97
6	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	2.435.055.594,00	2.432.627.837,00	(2.427.757,00)	99,90
7	PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	235.185.000,00	232.841.457,00	(2.343.543,00)	99,00
JUMLAH		3.783.222.890,00	3.771.923.524,00	(11.299.366,00)	99,70

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 2 (dua) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dan mengawal apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur telah dipatuhi dan berjalan sesuai rencana, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keadaan informasi yang dihasilkan oleh berbagai informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Darah yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh bupati tanjung jabung timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif; Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan; Review, Monitoring Dan Evaluasi; Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Monitoring Dan Penyelesaian TP-TGR; Audit Universe; Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pemkab Tanjab Timur.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas tenaga aparatur pemeriksa internal pemerintah di inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kualitas hasil pemeriksaan dapat ditingkatkan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan

Aparatur Pengawasan; Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.98.
Pencapaian Program Inspektorat
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP
		Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	82%	100 %
		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai " B "	60%	11%
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya Level IACM (Internal Auditor Capability Model)	Level 2	Level 2

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Capaian kinerja dari inspektorat tahun 2018 tergambar dari hasil pemeriksaan internal dan review tahun 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.99.
Jumlah Pemeriksaan Internal dan Review, 2018

No.	Kegiatan	capaian		Ket.
I.	Pengawasan internal secara Berkala	131	Obr	63 LHP
1	Reguler	24	Obr	24 LHP
2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Pemeriksaan Kasus/Khusus)	23	Ks	23 LHP
3	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	73	Obr	10 LHP
4	SIDAK	11	Kec	6 LHP
I.	Review Monitoring dan Evaluasi	331	Obr	37 Laporan
5	Review Laporan Keuangan	43	OPD	1 LHR Kompilasi
6	Evaluasi LAKIP SKPD	43	SKPD	1 LHE Kompilasi
7	Monitoring Penutupan Kas SKPD dlingkup Pemda, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah	43	SKPD	24 LHM
8	Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	73	Desa	10 LHP
9	Review APBDesa	73	Desa	1 LHR Kompilasi
10	Review RKA SKPD	43	OPD	1 LHR Kompilasi
11	Monitoring Dana BOS	1	OPD	1 LHP

No.	Kegiatan	capaian	Ket.
12	Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP	12 OPD	1 LHE Kompilasi

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Tabel 4.100.
Total Temuan hasil audit pemeriksaan Tahun 2012 – 2017

Tahun	Total Temuan	Cicilan			Sisa Temuan	% Kinerja ITKAB
		Melalui TLITKAB	Melalui MP TP-TGR	Jumlah		
2012	3.666.132.288,10	2.983.792.611,47	658.178.585,63	3.641.971.197,10	24.161.091,00	99,34
2013	1.227.141.167,68	779.132.656,31	423.008.511,37	1.202.141.167,68	25.000.000,00	97,96
2014	1.275.520.854,23	1.006.452.701,16	247.828.031,45	1.254.280.732,61	21.240.121,62	98,33
2015	11.378.040.087,83	6.691.743.582,16	2.691.377.059,68	9.383.120.642,17	1.994.919.445,66	82,47
2016	2.704.921.195,72	2.341.260.826,16	283.712.107,88	2.624.972.934,04	79.948.261,68	97,04
2017	1.070.858.042,54	1.070.858.042,54	-	1.070.858.042,54	-	100
TOTAL	21.322.613.636,10	14.873.240.420,13	4.304.104.296,01	19.177.344.716,14	2.145.268.919,96	
%TIENDAK LANJUT		69,75%	20,19%	89,94%	10,06%	

Sumber : LKPJ Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Dari total temuan Tahun 2012 s/d 2017 sebesar Rp. 21.322.613.636,10,- (Dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam koma satu rupiah), persentase penyelesaian melalui TLITKAB Tanjung Jabung Timur sebesar 69,75% atau Rp. 14.873.240.420,13 (*Empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh koma satu tiga rupiah*), dan penyelesaian melalui MP TP-TGR sebesar 20,19% atau Rp. 4.304.104.296,01,- (*Empat miliar tiga ratus empat juta seratus empat ribu dua ratus sembilan puluh enam koma nol satu rupiah*).

Total pengembalian uang atas temuan setoran ke kas negara sebesar 89,94% atau Rp. 19.177.344.716,14,- (*Sembilan belas milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam belas koma satu empat rupiah*).

Beberapa permasalahan/kendala yang ditemui terhadap pelaksanaan pengawasan OPD antara lain :

1. Kurangnya sumber daya manusia dibidang pengawasan karena keterbatasan jumlah dan kualitas auditor;
2. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu adanya koordinasi yang intens dan menyeluruh;
3. Masih adanya OBRIK/SKPD yang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan Tindaklanjut hasil pemeriksaan;
4. Kurangnya pemahaman Obrik terhadap Rekomendasi/saran dari temuan pemeriksaan;
5. Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.
6. Masih kurangnya kesadaran objek pemeriksaan (PD) mengenai Tupoksi Inspektorat sebagai leading sektor dalam hal pengawasan dan pembinaan, sehingga pada saat

kegiatan pemeriksaan dan pengawasan dilakukan, obrik tidak mengindahkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat.

Solusi yang dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut kedepan antara lain :

1. Pengiriman staf dan personil Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengikuti diklat dan sertifikasi tenaga auditor;
2. Koordinasi yang lebih intens untuk meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak terkait dan antar APIPDA;
3. Pemutakhiran data yang berkaitan dengan temuan dan hasil pengawasan akan lebih diintensifkan;
4. Pendekatan dengan objek pemeriksaan (PD) akan lebih ditingkatkan, sehingga Perangkat Daerah lebih memahami posisi Inspektorat dalam hal pengawasan dan pembinaan.

4.28 Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan anggaran, pendapatan dan pengelolaan barang milik Daerah;
2. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. pelaksanaan urusan pembendaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan pemerintah Daerah;
4. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penerimaan daerah serta pengelolaan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
5. pelaksanaan penatausahaan barang milik Daerah yang terinventarisasi dan sesuai standardisasi;

7. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, penyiapan penetapan dan pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
8. pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang keuangan, pendapatan dan barang milik daerah yang diberikan oleh Bupati.

Badan Keuangan Daerah melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan bidang urusan *Keuangan*. Pada Tahun 2018, Badan Keuangan Daerah melaksanakan 9 (sembilan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Keuangan Daerah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.101.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4.951.390.835,37	4.513.143.560,00	(438.247.275,37)	91,15
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.025.532.000,00	1.012.526.709,00	(13.005.291,00)	98,73
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	76.126.500,00	76.080.000,00	(46.500,00)	99,94
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	67.980.210,00	39.000.000,00	(28.980.210,00)	57,37
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	597.321.800,00	565.771.000,00	(31.550.800,00)	94,72
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.000.000,00	-	(5.000.000,00)	-
7	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.288.403.099,66	4.066.469.853,00	(221.933.246,66)	94,82
8	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	96.955.200,00	83.278.200,00	(13.677.000,00)	85,89
9	PENGAMANAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DAERAH	408.675.000,00	372.250.500,00	(36.424.500,00)	91,09
JUMLAH		11.517.384.645,03	10.728.519.822,00	(788.864.823,03)	93,15

Sumber : LKPJ Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peningkatan Manajemen Dan Evaluasi Aset Daerah; Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah; Sistem Informasi

Dan Manajemen Gaji; Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala; Pengamanan Aset Milik Pemerintah; Pengendalian Keuangan Daerah; Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Wilayah; Operasional UPTD Wilayah Timur; Operasional UPTD Wilayah Barat; Pemuktahiran Data Pajak Bumi Dan Bangunan.

b. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Transparansi Evaluasi Pelaksanaan Realisasi Anggaran (TEPRA);

c. Pengamanan Dan Pendayagunaan Aset Daerah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Dan Pemeliharaan Aset Daerah;

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.102.
Pencapaian Program Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WDP	WTP
		Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah	100%	94,82
		Persentase peningkatan PAD	100%	94,87
2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Transparansi Evaluasi Realisasi Anggaran OPD	100%	85,89
3	Pengamanan Dan Pendayagunaan Aset Daerah	Persentase aset daerah yang diamankan dan didayagunakan	100%	91,09

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2018

Selain program tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah selaku PPKD, selama tahun anggaran 2018 telah menyalurkan dana transper dan bantuan keuangan yang terdiri dari :

Tabel 4.103.
Dana transper dan bantuan keuangan tahun 2018

NO	URAIAN	REALISASI
I	BELANJA HIBAH	24.398.919.899,00
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok	24.398.919.899,00
II	BELANJA BANTUAN SOSIAL	100.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	100.000.000,00
III	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN	1.852.354.934,00

NO	URAIAN	REALISASI
PEMERINTAH DESA		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	1.852.354.934,00
IV BELANJA BATUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK		
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	134.794.655.035,00
2	Belanja Bantuan kepada Partai Politik	730.605.600,00
V BELANJA TIDAK TERDUGA		
1	Belanja Tidak Terduga	213.636.528,00
VI PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
1	Penyertaan Modal Pada BUMD	2.000.000.000,00
JUMLAH		164.090.171.996,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2018

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2018, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain :

1. Masih rendahnya Pencapaian sistem keuangan daerah yang transparan;
2. proses pensertifikatan lahan milik Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terkendala birokrasi yang panjang di BPN.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya melaksanakan rapat koordinasi rutin oleh pejabat yang berwenang pengambil kebijakan;
2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi vertikal yang berkompeten dalam rangka memperpendek birokrasi dan rentang waktu.

4.29 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan administrasi di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD);

2. Merencanakan program kerja Tahunan BKPSDMD berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan Fungsi Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan kebijakan BKPSDMD;
4. Merencanakan penyelenggaraan program kerja, kesekretariatan, formasi dan Informasi data, pengadaan, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, Pengembangan SDM, Pembinaan Disiplin, Pemberian Kesejahteraan serta Pengembangan Kompetensi PNS;
5. Mengadministrasi keuangan, umum, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengendalikan dan membina PNS di Lingkungan BKPSDMD;
7. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien Mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas;
8. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Bupati mengenai tata laksana kegiatan BKPSDMD;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan bidang urusan *kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan*. Pada Tahun 2018, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan 9 (sembilan) program dan 49 (empat puluh) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.104.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	879.611.800,00	856.597.447,00	(23.014.353,00)	97,38
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	215.530.000,00	214.071.349,00	(1.458.651,00)	99,32
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	44.312.500,00	33.000.000,00	(11.312.500,00)	74,47
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	37.400.000,00	36.723.000,00	(677.000,00)	98,19
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.800.000,00	13.767.000,00	(33.000,00)	99,76

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	250.025.000,00	238.717.025,00	(11.307.975,00)	95,48
7	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	578.294.000,00	569.929.268,00	(8.364.732,00)	98,55
8	PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS	106.015.000,00	100.658.816,00	(5.356.184,00)	94,95
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	3.205.808.582,00	2.847.837.940,00	(357.970.642,00)	88,83
	JUMLAH	5.330.796.882,00	4.911.301.845,00	(419.495.037,00)	92,13

Sumber : LKPJ BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya; Pengambilan Sumpah PNS.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Camat; Evaluasi Dan Pemrosesan Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah.

c. Program Pendidikan Kedinasan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Keterampilan Dan Profesionalisme; Pendidikan Dan Penjenjangan Struktural Diklat PIM III dan II.

d. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pemrosesan Usulan Pensiun Dan Pangkat Pengabdian.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Sistem Administrasi Pengurusan Kenaikan Pangkat Otomatis PNS; Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pns; Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala Dan Cuti PNS; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah; Pelayanan Kartu Taspen, Taperum, Karis, Karsu Dan Kartu Pegawai; Pemberian Bantuan Pendidikan Di PTN/PTS; Penyusunan Formasi PNS; Penempatan PNS/Redistribusi PNS; Proses Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil; Penataan Sistem Pengurusan Pengangkatan Fungsional Pns/Impassing PNS Fungsional; Pembekalan Masa

Persiapan Pensiun; Pemberian Tanda Jasa; Pemberian Penghargaan Bagi PNS Teladan; Proses Status Hukum; Pemrosesan Tugas Belajar dan Izin Belajar; Pengembangan Karir Dan Peningkatan Kompetensi Pendidikan Formal PNS; Pengelola Website Badan Kepegawaian Daerah; Seleksi Penerimaan CPNS; Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk IV: Operasional Tim Evaluasi Kinerja PNS; Pemetaan Jabatan; Operasional Tim Evaluasi Kinerja PNS.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.105.
Pencapaian Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	260 orang	54 Orang
		Jumlah Aparatur yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajar	35 orang	2 Orang
		Jenis Diklat, Bintek, Sosialisasi dan Rakor yang dilaksanakan sesuai dengan kompetensi bidang Teknis, Fungsional dan Keahlian.	11 Jenis	5 Jenis
2	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas	Jumlah PNS yang pensiun	70 orang	122 Orang
3	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Jabatan diisi oleh aparatur sesuai dengan kemampuan, keahlian, jenjang kepangkatan dan karier.	490 Jabatan	707 Jabatan
		Persentase Terbitnya Kartu Pegawai	92%	455% (455 kartu)
		Persentase Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala	92%	125% (1.873 SK)
		Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	92%	133% (633 SK)
		Persentase Terbitnya SK Fungsional	92%	93% (93 SK)
		Jumlah PNS yang menerima pemberian Tanda Jasa	100 orang	164 Orang
		Jumlah PNS yang menerima Penghargaan bagi PNS Teladan	4 orang	4 Orang

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	capaian
		Persentase Terprosesnya Kasus2 Pelanggaran Disiplin PNS	95%	100% (3 kasus)
		Jumlah Terselesainya Status Hukum Aparatur	5 kali	280% (14 Kali)
		Persentase PNS BUP(Batas Usia Pensiun) yang mendapatkan pembekalan untuk kewirausahaan	92%	100% (100 orang)
		Persentase Jumlah ASN tersandung masalah hukum yang mendapat bantuan hukum	100%	0%
		Jumlah Data ASN yang Akurat dan Terkini	4.790 orang	3.870 Orang
		Jumlah Aparatur Pengelola Yang berkompeten	1 orang	1 Orang
		Jumlah Aplikasi	1 Aplikasi	3 aplikasi

Sumber : LKPJ BKPSDMD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

4.30. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah mmpunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
2. penyelenggaraan, koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
3. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
5. pemberian bimbingan teknis urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan di seluruh SKPD;
6. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diberikan oleh Bupati.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan urusan Penunjang pemerintahan dengan Bidang urusan *Penelitian Dan Pengembangan*. Pada Tahun 2018, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah melaksanakan 8 (delapan) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Penelitian Pengembangan Daerah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.106.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	944.327.896,00	930.476.577,00	(13.851.319,00)	98,53
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	88.920.000,00	86.982.460,00	(1.937.540,00)	97,82
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	12.400.000,00	12.270.000,00	(130.000,00)	98,95
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	111.776.088,00	111.000.000,00	(776.088,00)	99,31
5	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.500.000,00	13.495.000,00	(5.000,00)	99,96
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERENCANAAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	150.000.000,00	149.892.260,00	(107.740,00)	99,93
7	KELEMBAGAAN DAN KELAKSANAAN	37.500.000,00	34.084.381,00	(3.415.619,00)	90,89
8	PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	303.900.000,00	262.263.448,00	(41.636.552,00)	86,30
JUMLAH		1.662.323.984,00	1.600.464.126,00	(61.859.858,00)	96,28

Sumber : LKPJ Balitbangda Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 5 (lima) program rutin dan 3 (tiga) program teknis yang meliputi :

a. Program Penelitian/Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penelitian Pengukuran Nilai Tukar Petani terhadap Penanggulangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat dan faktor-faktor yang berpengaruh.

b. Program Kelembagaan dan Kelaksanaan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Hakteknas.

c. Program Penelitian dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Kajian Prospek Pengembangan Budidaya Tambak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kajian Peremajaan Komoditi Kelapa Dalam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.107.
Pencapaian Program Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Kajian Ilmiah bidang Sosial dan Pemerintahan	2 kajian	1 Kajian
2	Penelitian dan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 kajian	2 Kajian
3	Kelembagaan Dan Kelaksanaan	Jumlah Tim Dewan Riset Daerah	1 Kegiatan/Tahun	-
		Jumlah Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Penelitian	1 Kegiatan/tahun	-
		Jumlah Kegiatan Haktekna	1 Kegiatan/tahun	1 Kegiatan/tahun

Sumber : LKPJ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Secara umum tidak ada permasalahan utama yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi di masa mendatang untuk pencapaian target kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan penelitian akan dilakukan lebih akurat dan cermat;
2. Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia;
3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan;
4. Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah/swasta dalam rangka pemenuhan dokumen perencanaan yang berkualitas;
5. Peningkatan sarana prasaran penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat;
6. Tetap konsisten untuk melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4.31. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi *staf Pendukung Kepala Daerah*. Pada Tahun 2018, Sekretariat Daerah melaksanakan 24 (dua puluh empat) program dan 96 (sembilan puluh enam) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat Daerah tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.108.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Sekretariat Daerah Tahun 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	13.157.427.353,00	12.723.792.041,00	(433.635.312,00)	96,70
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.882.068.000,00	4.590.541.341,00	(291.526.659,00)	94,03
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	385.532.000,00	365.376.000,00	(20.156.000,00)	94,77
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	211.356.000,00	139.817.820,00	(71.538.180,00)	66,15
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	155.485.000,00	155.029.856,00	(455.144,00)	99,71
6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	26.650.000,00	25.710.000,00	(940.000,00)	96,47
7	PENATAAN PELAYANAN PUBLIK	61.913.000,00	57.543.026,00	(4.369.974,00)	92,94
8	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	334.725.000,00	224.825.200,00	(109.899.800,00)	67,17
9	PENGUATAN OTONOMI DESA	764.724.575,00	728.194.887,00	(36.529.688,00)	95,22
10	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	1.168.388.000,00	1.146.728.000,00	(21.660.000,00)	98,15
11	KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	3.686.794.000,00	3.672.569.800,00	(14.224.200,00)	99,61
12	PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	944.361.000,00	880.110.400,00	(64.250.600,00)	93,20
13	PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	18.270.000,00	17.923.100,00	(346.900,00)	98,10
14	PENATAAN PENGUSAHAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	181.565.000,00	144.585.200,00	(36.979.800,00)	79,63
15	PENGEMBANGAN E-GOVERMENT	399.665.300,00	381.884.826,00	(17.780.474,00)	95,55
16	PENINGKATAN KUALITAS IMAN DAN TAQWA GENERASI QUR'ANI	7.303.045.500,00	6.979.670.900,00	(323.374.600,00)	95,57
17	MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	346.350.000,00	317.861.088,00,00	(28.488.912,00)	91,77
18	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-	612.559.200,00	560.846.200,00	(51.713.000,00)	91,56

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
	UNDANGAN				
19	PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	828.914.000,00	733.371.601,00	(95.542.399,00)	88,47
20	PENATAAN PERANGKAT DAERAH	803.943.900,00	766.112.463,00	(37.831.437,00)	95,29
21	PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH	101.586.600,00	79.941.600,00	(21.645.000,00)	78,69
22	FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN, KEAGAMAAN DAN PROFESI	457.036.000,00	429.988.937,00	(27.047.063,00)	94,08
23	PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	1.289.833.500,00	1.250.211.977,00	(39.621.523,00)	96,93
24	PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	132.275.300,00	127.792.136,00	(4.483.164,00)	96,61
JUMLAH		38.254.468.228,00	36.500.428.399,00	(1.754.039.829,00)	95,41

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 terdiri dari 6 (enam) program rutin dan 18 (delapan belas) program teknis yang meliputi :

a. Program Penataan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Pelayanan Publik kepada masyarakat.

b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Profil Desa; Koordinasi Aparatur Pemerintah Desa dan Bidang Perencanaan; Pembinaan dan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi.

c. Program Penguatan Otonomi Desa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi APBDesa; Penetapan dan Penegasan Tapal Batas Desa/Kelurahan; Penataan Desa/Kelurahan Perubahan Status Desa/Kelurahan; Sosialisasi Pilkades.

d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Dokumentasi; Pembuatan Majalah/Cetakan Berkala; Penyediaan Sarana/Prasarana Penunjang Kegiatan Media Center; Penataan Dan Pengelolaan Studio Dan Komunikasi.

e. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah; Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Berlangganan Majalah Dan Surat Kabar Harian, Mingguan, Bulanan; Publikasi Penerangan Masyarakat, Sosialisasi Dan Promosi; Penataan, Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Data, Informasi Dan Komunikasi.

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH diantaranya Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi; Pengendalian Pelaporan Kegiatan Pembangunan; Koordinasi Dan Pengendalian Pertambangan Dan Energi; Koordinasi Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; Pengendalian Inflasi Daerah; Penyusunan Program Kerja Pembangunan; Koordinasi dan Monitoring Penyaluran Beras Sejahtera; Koordinasi dan Monitoring Pembelian Beras Lokal oleh PNS.

g. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini dimaksudkan untuk membina dan memfasilitasi wirausahawan dengan modal yang diberikan pemerintah daerah sehingga diharapkan usaha yang dijalankan akan dapat lebih berkembang, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan BUMDes

h. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini dimaksudkan untuk meminimalisir sengketa lahan yang terjadi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

i. Program Pengembangan E-Goverment

Sebagai sarana melaksanakan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang mekanisme pelelangan dan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Layanan Pengadaan secara Elektronik; Pembinaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

j. Program Peningkatan Kualitas Iman dan Tagwa Generasi Muda Gurani

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten; Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi; Pelaksanaan Safari Ramadhan Dan Sholat Idul Fitri Dan Idul Adha; Pengembangan Qori Qoriah, Hafizh Hafizhah Dan Kaligrafer Potensial; Pelaksanaan Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kabupaten; Pelaksanaan FASI tingkat Propinsi; Pelaksanaan TC MTQ Tingkat Provinsi; Pengembangan Pondok Pesantren Tahfizh; Pelaksanaan Kegiatan Jemaah Haji Dan Umroh, Pelaksanaan Pelatihan Da'i – Daiah; Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

k. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Inti dari program ini guna penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah daerah, untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pemkab (Advokasi Dan Kuasa Hukum).

I. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan memiliki kegiatan diantaranya Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan; Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; Publikasi Peraturan Perundang-Undangan; Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah; Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;;

m. Program Penataan Daerah Otonomi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik hingga lapisan terendah, Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pemerintahan Umum; Penataan Dan Penegasan Batas Daerah; Peningkatan Kapasitas Camat; Pembakuan Nama Rupa Bumi; Pembinaan dan Evaluasi Paten; Penyusunan Laporan LPPD.

n. Program Penataan Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah; Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan; Penyusunan Prosedur Indeks Kepuasan Masyarakat, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal Dan Reformasi Birokrasi; Penataan Tata Naskah Dinas.

o. Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk lebih mengefektikan pelaksanaan pemerintahan dari sisi pembagian tugas pokok. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan Dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah.

p. Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Profesi

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan ialah Hari-Hari Besar Keagamaan; Pelaksanaan Pengajian Rutin BKMT.

q. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

r. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah.

Adapun Capaian Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.109.
Pencapaian Program Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018

No	Program	Indikator Program (Outcome)	Target	Capaian
1	Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Persentase penyelesaian sengketa lahan	100%	40%
		penyelesaian batas antar Kecamatan	1	1
2	Program Penguatan Otonomi Desa	Terpenuhinya Tapal Batas Desa/Kelurahan	100%	100%
3	Peningkatan Kualitas Iman Dan Taqwa Generasi Qur'Ani	Peringkat anak shaleh Indonesia	-	2
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum yang Terselesaikan	100%	100%
5	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Nilai LPPD Kab. Tanjung Jabung Timur	Tinggi	Tinggi
6	Program Pembinaan Generasi Muda	Peringkat MTQ Tk. Provinsi Jambi	1	1
7	Pengembangan E-Government	Sistem pengadaan berbasis elektronik (SOP)	100%	100%
8	Program Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi	Persentas Pegawai Negeri Wajib Lapor LHKPN	70%	92,46%
9	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	100%	100%

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah, 2018

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2018, tergambar capaian indikator Kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.110.
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2018

No.	Indikator Kinerja	Capaian
1	Nilai SAKIP	CC

Sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah, berbagai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

maupun Keputusan Bupati. Tabel berikut akan menggambarkan produk hukum yang dihasilkan tahun 2018.

Tabel 4.111.
Jumlah produk hukum yang dihasilkan Tahun 2018

No	Uraian	2018
1	Peraturan Daerah	6 Produk
2	Peraturan Bupati	58 Produk
3	Keputusan Bupati	719 Produk
4	Prolegda	9 buah

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah, 2018

Dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, dari tahun 2015 - 2018 terdapat 11 kasus yang ada, 3 kasus telah selesai dan sisanya masih proses penyelesaian oleh Tim Fasilitasi Penyelesaian sengketa. Kasus Sengketa Lahan Tahun 2015 - 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.112.
Penyelesaian Sengketa Lahan

No	Tahun	Nama Kasus Sengketa	Uraian	Percentase	Keterangan
1	2015	M Saleh warga desa Lagan dengan PT Indonusa Agromulya Kecamatan Geragai	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan melaksanakan negosiasi harga antara pihak perusahaan dan pihak M Saleh terkait tali asih	0%	Dalam Proses Pertimbangan pihak perusahaan
2	2016	Warga Kelurahan Teluk Dawan dengan PT Kaswari Unggul Kec. Ma Sabak Barat		100%	Selesai
3	2016	Masyarakat desa Sungai Jeruk Kec. Nipah Panjang dengan Masyarakat desa Rantau Rasau Kec. Berbak		100%	Selesai
4	2017	M. Nasir dkk warga desa Lagan Ulu dengan PT Indonusa Agromulya Kecamatan Geragai	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan melaksanakan negosiasi harga antara pihak perusahaan dan pihak M Nasir	0%	Menunggu tanggapan pihak perusahaan
5	2017	Masyarakat desa Pangkal Duri dengan PT Bumi Borneo Sentosa kec. Mendahara	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan melaksanakan negosiasi harga antara pihak perusahaan dan pihak Masyarakat desa Pangkal Duri	0%	Menunggu tanggapan pihak perusahaan
6	2017	H Latuo bin marek desa Sido Mukti dengan PT Kaswari Unggul Kec.		100%	Selesai

No	Tahun	Nama Kasus Sengketa	Uraian	Percentase	Keterangan
7	2018	Dendang H. Junawan dengan Latahere abi parit 2 Sungai Remau Kanan	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengeta lahan	0%	Proses
8	2018	H. Junawan dengan H Dahe Berdin parit lapis Sungai Jawi	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengeta lahan	0%	Proses
9	2018	H. Junawan dengan Bera Jumasse parit 2 Jepu Sungai Sayang	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengeta lahan	0%	Proses
10	2018	Mustari dengan Panaungi dkk Parit 1 sungai Remau Bako Tuo	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengeta lahan	0%	Proses
11	2018	H Puasa dengan Nuredi dkk kec. Rantau Rasau	Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa lahan akan melakukan rapat klarifikasi terkait sengeta lahan	0%	Proses

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah, 2018

Semua Pelaksanaan lelang tahun 2018 melalui LPSE, total paket yang dilelang sebanyak 205 paket dan efisiensi anggaran dari lelang yang dilaksanakan sebesar Rp. 15.424.776.606,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.113.
Rekap Lelang Tahun 2018

No	Paket Penyedia	Jumlah Paket			Jumlah
		APBN	APBD	APBD-P	
1	Pekerjaan Konstruksi	3	109	5	117
2	Pengadaan Barang	1	20	2	23
3	Jasa Konsultasi Badan Usaha	-	65	-	65
Jumlah Paket Lelang		4	194	7	205

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah, 2018

Tabel 4.114.
Efisiensi Anggaran Lelang Tahun 2018

No	Paket Penyedia	Jumlah Anggaran Lelang (Rp)			Jumlah
		APBN	APBD	APBD-P	
1	Pagu Lelang	2.437.884.000	256.605.012.360	10.226.576.000	269.269.472.360

No	Paket Penyedia	Jumlah Anggaran Lelang (Rp)			Jumlah
		APBN	APBD	APBD-P	
2	Nilai Kontrak	1.609.541.500	242.913.653.790	9.321.500.464	253.844.695.754
3	Efisiensi Anggaran	828.342.500	13.691.358.570	905.075.536	15.424.776.606

Sumber : LKPJ Sekretariat Daerah, 2018

Sampai dengan Tahun 2018 Sekretariat Daerah telah melaksanakan penataan Tapal batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

- 3) Segmen batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan perkiraan batas 77 Km, hasil penataan batas sebagai berikut :
 - a. Hasil Pelacakan 68,1 Km
 - b. Konsultan Dirjenpum 72 Km
 - c. Kesepakatan baru sepanjang 25 Km dan menunggu Permendagri;
- 4) Segmen batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Muaro Jambi dengan perkiraan batas 160 Km, hasil penataan batas sebagai berikut :
 - a. Konsultan Dirjenpum 140 Km
 - b. Kesepakatan baru sepanjang 20 Km dan menunggu permendagri;
- 5) Segmen batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan perkiraan batas 20 Km, hasil petaan batas dengan kesepakatan 20 Km berdasarkan Permendagri No 130 Tahun 2017.
- 6) Segmen batas Kecamatan Kuala Jambi dengan perkiraan batas 54,82 Km, hasil penataan batas dengan kesepakatan 54,82 Km dan dalam proses penyusunan draft SK.

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 terealisasi 92,46%. Jumlah Pegawai Negeri Wajib Lapor tahun 2018 sebanyak 305 wajib lapor dan yang telah melaporkan sebanyak 282 wajib lapor dan yang belum melaporkan sebanyak 51 wajib lapor.

Dalam pencapaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018, masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Masih kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di lingkup Sekretariat Daerah;
2. Jumlah SDM Setda yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
3. Kurangnya koordinasi perencanaan pada bagian lingkup Setda secara maksimal, sehingga masih terdapat kecenderungan perencanaan yang bersifat mandiri, menyebabkan daya dorong terhadap tercapainya dampak dari program kegiatan Setda belum maksimal
4. Penetapan indikator-indikator kinerja belum seluruhnya terukur dengan indikator kinerja yang tepat, sehingga target kinerja tiap tahun cenderung statis dan tidak dapat menunjukkan hasil kinerja sebenarnya.

Beberapa langkah tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, pelibatan tenaga ahli sebagai tenaga pendukung perencanaan serta pengadaan tenaga kontrak;
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada ASN setda untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
3. Menyusun dana menetapkan indikator Kinerja Sekretariat Daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah.

4.32. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. penyelenggaraan administrasi perencanaan dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang penganggaran dan pengawasan;
4. fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang legislasi;
5. fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
6. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD melaksanakan urusan *Staf Pendukung DPRD*. Pada Tahun 2018, Sekretariat DPRD melaksanakan 8 (delapan) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat DPRD tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.115.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7.034.953.900,00	6.811.990.572,00	(222.963.328,00)	96,83
2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.355.669.300,00	4.231.482.715,00	(124.186.585,00)	97,15
3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	457.855.000,00	451.952.000,00	(5.903.000,00)	98,71
4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	360.250.000,00	315.550.385,00	(44.699.615,00)	87,59
5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	152.050.000,00	126.738.031,00	(25.311.969,00)	83,35
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	155.081.000,00	100.780.000,00	(54.301.000,00)	64,99
7	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI MEDIA MASSA	1.532.453.300,00	1.382.667.648,00	(149.785.652,00)	90,23
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	7.333.818.500,00	6.738.853.872,00	(594.964.628,00)	91,89
JUMLAH		21.382.131.000,00	20.160.015.223,00	(1.222.115.777,00)	94,28

Sumber : LKPJ Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD antara lain yaitu **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**. Program ini mempunyai kegiatan berupa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;

Hearing / Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama; Rapat-Rapat Paripurna; Kegiatan Reses; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah; Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD; Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah.

Terdapat 1 (satu) Proram yang realisasinya dibawah 70%, hal ini dikarenakan kurang cermatnya dalam perencanaan Program Kegiatan dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, pada tahun 2018 ini telah dibahas Rancangan Peraturan Daerah yang berjumlah 6 Ranperda dan sampai dengan Bulan Februari 2019 telah dihasilkan sebanyak 5 perda, untuk 1 Ranperda yang lain masih menunggu hasil Evaluasi Propinsi. Prolegda yang telah dilakukan pembahasan dan ditetapkan sebagai Perda tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.116.

Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2018

NO.	PERATURAN DAERAH		TENTANG	TANGGAL PENETAPAN	PEMRAKARSA
	NOMOR	TAHUN			
1	4	2019	Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	8 Februari 2019	Inisiatif DPRD
2	5	2019	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	8 Februari 2019	Inisiatif DPRD
3	3	2019	Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah	8 Februari 2019	Inisiatif DPRD
4	2	2019	Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi	8 Februari 2019	Inisiatif DPRD
5			Pembentukan Produk Hukum Daerah		Biro Hukum Setda
6	1	2019	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021	7 Februari 2019	Bappeda

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

4.33. 11 Kecamatan

Sebelas Kecamatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. penyelenggaraan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh perundang-undangan.

Kecamatan melaksanakan urusan *Pemerintahan umum* dan *Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*. Total program dan kegiatan yang dilaksanakan 11 kecamatan pada tahun 2018 sebanyak 101 program dan 278 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja pada 11 kecamatan tertera dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.117.
Anggaran dan Realisasi Penyerapan 11 Kecamatan
Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	TARGET	REALISASI	+/-	%
1	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	4.948.161.562,85	4.929.516.179,00	(18.645.383,85)	99,62
2	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	2.304.433.857,92	2.298.609.022,00	(5.824.835,92)	99,75
3	KECAMATAN MENDAHARA	1.330.938.512,54	1.322.639.324,00	(8.299.188,54)	99,38
4	KECAMATAN MENDAHARA ULU	1.806.350.000,00	1.662.296.305,00	(144.053.695,00)	92,03
5	KECAMATAN GERAGAI	1.510.474.753,99	1.298.609.722,00	(211.865.031,99)	85,97
6	KECAMATAN KUALA JAMBI	2.076.086.587,00	1.969.382.088,00	(106.704.499,00)	94,86
7	KECAMATAN DENDANG	1.537.825.613,96	1.514.393.623,00	(23.431.990,96)	98,48
8	KECAMATAN BERBAK	1.884.589.077,00	1.818.204.860,00	(66.384.217,00)	96,48
9	KECAMATAN RANTAU RASAU	1.678.959.225,33	1.668.257.224,00	(10.702.001,33)	99,36
10	KECAMATAN NIPAH PANJANG	2.355.111.173,38	2.347.644.729,00	(7.466.444,38)	99,68
11	KECAMATAN SADU	1.625.010.435,00	1.618.822.560,00	(6.187.875,00)	99,62
JUMLAH		23.057.940.798,97	22.248.375.636,00	(809.565.162,97)	96,49

Sumber : LKPJ 11 Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini berisikan kegiatan penunjang administrasi perkantoran seperti jasa surat menyurat, jasa komunikasi, air dan listrik, jasa perlengkapan dan peralatan kantor, jasa

kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, makan dan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini lebih menitikberatkan pada sarana infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas kantor seperti pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini berisikan kegiatan tentang pengadaan pakaian dinas pegawai di kecamatan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini berisikan tentang penyusunan capaian kinerja dan keuangan kecamatan yang disusun dalam dokumen pelaporan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Subtansi dari program ini ialah alokasi anggaran di kelurahan baik untuk operasional/rutin maupun pembangunan di masing-masing kelurahan. Anggaran ini dikelola oleh masing-masing kelurahan yang ada.

f. Program Penataan Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil pembangunan yang ada di kecamatan sekaligus rencana pembangunan kedepan termasuk komoditi unggulan di kecamatan tersebut.

g. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program ini merupakan program dari kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin sehingga kesejahteraan kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang mendukung program ini ialah operasional excavator.

h. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas gender dan perlindungan kepada anak.

Data Pekerjaan Alat Berat (excavator) Tahun 2018 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 4.118.
Data Pekerjaan Alat Berat (Excavator) Tahun 2018

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Volume
	MUARA SABAK TIMUR		
1	Kel. Muara Sabak Ulu Jl. Parit Lapis RT. 06	Pembuatan Tanggul	3.000 m x 3 m x 1 m
2	Kel. Muara Sabak Ulu	Pembuatan Tanggul	4.000 m x 3 m x 1 m

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Volume
	Jl. Parit Lapis RT. 08		
3	Kel. Muara Sabak Ulu Jl. Parit Dok RT. 07	Pembuatan Tanggul	4.000 m x 3 m x 1 m
4	Kel. Muara Sabak Ulu RT 04 (Kantor Camat)	Pembuatan Tanggul	4.000 m x 3 m x 1 m
5	Kel. Muara Sabak Ilir Rt. 06	Pembuatan Tanggul Pertanian	3.500 m x 3 m x 1 m
6	Desa Kota Raja	Pembuatan Tanggul Pertanian	4.000 m x 3 m x 1 m
		Pembuatan Tanggul Pertanian	8.600 m x 3 m x 1 m
7	Desa Siau Dalam Parit 7 Rt. 22	Pembuatan Tanggul Pertanian	8.000 m x 3 m x 1 m
	MUARA SABAK BARAT		
1	Kel. Parit Culum 1	Pembuatan Tanggul dan Pendalaman Parit RT 13, 14 dan 15	4.400 m
2	Kel. Parit Culum 2	Pembersihan Parit dan Tanggul Poktan Sri Rezeki	5.800 m
	MENDAHARA		
1	Kelurahan Mendaahara Ilir	Peningkatan Tanggul Kebun Masyarakat (Parit Adong dan Parit I)	3.500 m
		Penimbunan Tanggul Keliling SMAN 7 Tanjung Jabung Timur	560 m
		Normalisasi Tanggul Parit I	3.000 m
		Pembersihan Lahan Lokasi Perumahan Nelayan	300 x 25 m = 7.500 m ²
		Normalisasi Tanggul Lapanagan Sepak Bola Manunggal	400 m
2	Lagan Ilir	Normalisasi Parit Dusun Baru	3.000 m
	MENDAHARA ULU		
1	Desa Sinar Wajo	Normalisasi Jalan/Parit Menuju Sungai Alam RT 05	3 x 3.300 m
		Normalisasi Parit kongsi Rt 04	3 x 2.000 m
		Normalisasi parit kongsi dan Jalan Lingkungan Rt 03	4 x 8.000 m
	GERAGAI		
1	Kel. Pandan Jaya	Normalisasi Parit SK 01, 02 dan 04	3.600 m
		Pembuatan Parit SK 8	4 m x 2 m x 2.500 m
2	Desa Pandan Lagan	Normalisasi Parit RT 12, 15	3.500 m
3	Desa Pandan Sejahtera	Normalisasi Parit Dusun Simpang Pandan dan Sukosari	13.500 m
4			
	DENDANG		
1	Desa Jati Mulyo	Pembangunan Jalan Produksi Ladang RT 10	3 x 500 m
		Pembangunan Jalan Produksi Ladang RT 11	3 x 1.100 m
		Pembangunan Jalan Produksi Ladang RT 13	3 x 1.100 m
		Pembangunan Jalan Produksi Ladang RT 14	3 x 1.000 m
		Pembangunan Jalan Produksi Ladang RT 08	3 x 1.500 m
		Pembangunan Jalan Produksi Ladang RT 09	3 x 1.500 m
		Pembangunan jalan Ex Tranmigasi RT 07 sampai RT 15	5 x 1.500 m
		Perbaikan Jalan Tanggul Jatimulyo ke Sidomukti	5 x 2.500 m
2	Desa Catur Rahayu	Penggalian/pembuatan Tanggul	L3,5x0,8mx2300m L 5mx0,5mx300m
		Peningkatan jalan lingkungan	5.000 m
		Steking lapangan bolah kaki	0,5 Ha
	KUALA JAMBI		
1	Kel. Tanjung Solok	Servis Tanggul SMA 9 dan Puskesmas	300 m
		Service Tanggul Parit 3	245 m
		Pembuatan Lapangan Madrasah Aliyah Nurul Ithihad	245 m ²
2	Kel. Kampung Laut	Pembersihan Lapangan Parit 5	800 M ²
		Service Tanggul Parit 5	3 m x 1.160 m
		Pembuatan Tanggul Baru Jalan Madrasah	3 m x 65 m
		Service dan Pembuatan Tanggul Pemakaman Umum belakang Masjid Raya AlAzhar	400 m ²
		Pembersihan Lokasi Pemakaman Umum	500 m ²
		Service Jalan Pasar Kamis	1.000 m
3	Majelis Hidayah	Service Tanggul dan Jalan Penghubung Antar RT	2.066 M ²
	BERBAK		
1	Desa Rantau Makmur	Pembuatan Tanggul Batas Tanah Polsek	400 m x 3 m x 1 m =1.200 m ³
		Pembersihan Lokasi Polsek/Steking	150 m x 250 m = 37.500 m ²
		Penimbunan Lokasi Polsek	20 m x 15 m x 1 m = 300 m ³
2	Kelurahan Simpang	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt 01 s/d Rt 07	2.000 m
		Cuci Parit dan Penggalian Rt 06 Rw 01	100 m

No	Nama dan Lokasi	Kegiatan	Volume
		Pembuatan Jalan Tanggul Rt 07	50 m x 4 m x 1 m = 200 m3
		Pembersihan Lingkungan Halaman Kantor Camat Berbak	2 ha
		Penimbunan jalan Rt 18 s/d Rt 17	300 m x 6 m x 1 m = 1.800 m3
		Penimbunan jalan menuju rumah dinas camat Berbak	20 m x 1 m x 1 m = 20 m3
		Service Jalan Lingkungan Rt 18	250 m
		Normalisasi, pencucian parit dan jalan tanggul Poktan Usaha Bersama	=4.000 mx 4 m x 0,5 m = 8.000 m3
		Pembuatan Jalan tembus Rt 18 s/d Rt 17 Rw 04	2.000 m x 3 m x 1 m = 6.000 m3
3	Desa Rawasari	Pembuatan Jalan, tanggul dan cuci parit Blok N menuju Blok O	3.000 m x 4 m x 1 m = 12.000 m3
		Pembersihan Saluran Air Masjid Blok N	=250 m x 1 m x 1 m =250 m3
	RANTAU RASAU		
1	Kelurahan Bandar Jaya	Pencucian Parit dan Penimbunan Jalan Lingkungan	6.000 m
2	Desa Rantau Jaya	Pencucian parit dan penggalian saluran Pertanian SK 22, 23, 25-27	12.000 m
	NIPAH PANJANG		
1	Desa Teluk Kijing	Pembuatan Tanggul dan Normalisasi Saluran (Pembersihan Parit)	30.365 m
	SADU		
1	Desa Remau Bako Tuo	Perbaikan Tanggul Perkebunan Masyarakat	2.000 m
2	Kel. Sei. Lokan	Pembersihan Lokasi Kantor Camat dan Pembuatan Tanggul Keliling	5 Ha
3	Desa Sungai Itik	Perbaikan Tanggul Makam Umum Kamboja	1.000 m
		Perbaikan dan Penggalian Tanggul Selat Nipah	2.000 m
		Pembersihan Lokasi Lapangan Sepak Bola Dusun Durian Sebatang	200 m
		Pembuatan badan jalan alternatif desa	700 m

Sumber : 11 Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.119.
Target dan Realisasi PBB dan Retribusi Daerah Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	PBB		%	Retribusi		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Muara sabak Barat	290.613.891	160.209.085	55,13	4.708.971	6.197.500	131,61
2	Muara sabak Timur	305.149.536	266.810.575	87,44	4.522.962	8.391.300	185,53
3	Mendahara	216.336.939	216.336.939	100,00	5.384.478	10.200.000	189,43
4	Mendahara Ulu	243.023.834	138.659.661	57,06	4.855.822	-	-
5	Geragai	239.375.950	165.596.404	69,18	7.920.078	-	-
6	Dendang	263.529.255	262.705.889	99,69	8.595.586	671.543,14	7,81
7	Kuala Jambi	63.907.726	49.451.228	77,38	3.994.304	-	-
8	Berbak	85.459.385	85.459.357	100,00	1.928.622	-	-
9	Rantau Rasau	208.323.720	208.407.099	100,04	15.654.147	550.600	3,52
10	Nipah Panjang	162.742.409	162.749.723	100,00	15.389.818	744.000	4,83
11	Sadu	124.602.080	124.602.080	100,00	9.545.212	633.550	6,64
JUMLAH		2.203.064.761	1.840.988.040	83,56	82.500.000	27.388.493	33,20

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2019

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Bantuan Keuangan Kepada Desa Tahun 2018.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan memiliki deskripsi sebagai berikut :

1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat.
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/atau desa.
3. Kepala Daerah memberitahukan Rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD.
4. Dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
5. OPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian/Lembaga.
6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah.
7. Saldo kas dikembalikan ke kas umum Negara.

Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut, disamping melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan Tugas Pembantuan. Azas Tugas Pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah Bawahan, penugasan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan ke Desa/Kelurahan, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya kepada pemberi tugas. Sedangkan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban diatur lebih

lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

5.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Pada Tahun 2018 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.1.1. Satuan Kerja Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan dana Tugas Pembantuan yaitu :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman;
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

5.1.2. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

5.1.2.1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diterima dari Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal dengan DIPA No. 067.08.4.350161/2018 tanggal 5 Desember 2017. Program yang dilaksanakan sebanyak 5 (lima) Program yaitu :

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
2. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya;
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana di kawasan Transmigrasi;
4. Pengembangan usaha transmigrasi; dan
5. Pengembangan sosial budaya Transmigrasi

Total Jumlah anggaran pada program tersebut diatas sebesar Rp. 3.769.634.000,00 (tiga milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), realisasi anggaran sebesar Rp. 3.578.204.980,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan persentase 94,92%.

5.1.2.2. Dinas Perumahan dan Permukiman

Program yang dilaksanakan Dinas Permukiman dari dana Tugas Pembantuan adalah :

1. Program Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Nipah Panjang sebanyak 1 unit.

2. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Nipah Panjang dan Berbak dengan pembangunan sebanyak 520 unit rumah.

3. Program Pembangunan Perumahan Khusus Nelayan

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Mendahara dengan pembangunan rumah nelayan sebanyak 50 unit.

4. Program Peningkatan Penurunan Kawasan Kumuh

Program ini dilaksanakan di kecamatan Nipah Panjang sebanyak 1 paket

5. Program Rusunawa

Program ini dilaksanakan di Kecamatan Muara Sabak Barat dengan realisasi sebanyak 42 unit

6. Program Pamsimas

Program ini dilaksanakan di 14 desa dalam lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.1.2.3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Tahun 2018 perbidang sebagai berikut :

1. **Bidang Tanaman Pangan**

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan DIPA No. 018.03.4.109119/2018 tanggal 5 Desember 2017. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Tanaman Pangan yang dilaksanakan Tahun 2018 sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

Tabel.5.1
Penyelenggaraan Tugas sumber Dana APBN tahun 2018
Bidang Tanaman Pangan Dinas TPH

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa
		Rp. (000)	Rp. (000)	%	Rp. (000)
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Produksi, Provitas dan hasil Mutu Hasil Tanaman Pangan	1.785.064	1.290.150	72,27	494.914
1761	Pengolahan Produksi Tanaman Aneka Kacang - Umbi, Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai	771.564	276.900	35,89	
	Pembinaan , Monev dan Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi	46.140	43.660	94,63	
	Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kedelai	725.424	233.240	32,15	
1762	Pengolahan Produksi tanaman Serelia	978.600	978.350	99,97	
	fasilitas penerapan Budidaya Jagung Litbang (Bima - Uri)	967.500	967.500	100,00	
	Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolahan Produksi Tanaman Serelia	11.100	10.850	97,75	
1766	 Layanan Dukungan Managemen Eselon	30.900	30.900	100,00	
	Pengelolahan Pembedaharaan	30.900	30.900	100,00	
	Evaluasi dan Pelaporan, Pengelolahan data dan Informasi	4.000	4.000	100,00	

Sumber : LKPJ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2018

Dari tabel diatas pagu anggaran penyelenggaraan tugas dana bersumber dari APBN tahun 2018 di Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 1.785.064.000,- dengan relaisasi capaian sebesar 1.290.150.000,- atau 72,27 % sehingga sisa pagu didapat Rp. 494.914.000,-

2. Bidang Sarana dan Prasarana

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Bidang Sarana dan Prasarana bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan DIPA No. 018.08.4.109125/2018 tanggal 5 Desember 2017. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang dilaksanakan tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel.5.2
Penyelenggaraan Tugas sumber Dana APBN tahun 2018
Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPH

No	Uraian	Pagu Anggaran
		Rp.
1	2	3
018.08.11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
526124	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk uang	107.600.000
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk uang	156.000.000
526312	Penyiapan Lahan dan Perbaikan Infrastruktur	4.800.000.000
526112	Belanja Peralatan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda	2.763.950.000

Sumber : LKPJ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2018

Pada tabel diatas disajikan detail penyelenggaraan tugas sumber dana APBN bidang sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pagu anggaran perkegiatan.

3. Bidang Hortikultura

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Bidang Hortikultura bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan DIPA No. 018.08.4.109905/2018 tanggal 5 Desember 2017. Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dilaksanakan Tahun 2018 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel.5.3
Penyelenggaraan Tugas sumber Dana APBN tahun 2018
Bidang Hortikultura Dinas TPH

No	Uraian	Harga Satuan Rp. (000)	Pagu Anggaran	Realisasi		Sisa Pagu Anggaran
				Rp. (000)	Rp. (000)	
1	2		3	4	5	6
1771	Program Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura		381.731	362.431	95	19.300

Sumber : LKPJ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2018

Pada tabel 5.3 disajikan detail penyelenggaraan tugas sumber dana APBN Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultutra Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pagu anggaran Rp.381.731.000,- dengan Realisasi Rp.362.431.000,- atau sebesar 95 %.

5.2. DANA DEKONSENTRASI

Selain Tugas Pembantuan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga menerima Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Teknis yaitu Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;

5.2.1. Satuan Kerja Pelaksana

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan dana Dekonsentrasi yaitu :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Ketahanan Pangan

5.2.2. Program Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya

5.2.2.2. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bersumber dari DIPA UPT Pusat Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dengan jumlah anggaran Rp. 1.105.170.000,00 (satu milyar seratus lima juta seratus tujuh puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.071.982.500,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar 99,97%.

Program yang bersumber dari dan Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 1 (satu) Program yaitu Pelatihan bagi pencari kerja dengan 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

1. Custom Made;
2. Operator Basic Office;
3. Pengolahan Hasil Pertanian;
4. Audio Video;
5. Instalatir Penerangan;
6. Juru las GMAW 3G; dan
7. Teknisi Pendingin AC Split.

Semua kegiatan dilaksanakan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rincian Pelatihan yang dilaksanakan melalui dana Dekonsentrasi dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel.5.4

Kegiatan Pelatihan dari Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

No	Pelatihan	Jumlah Peserta
1	Audio Video	32 orang
2	Operator Basic Office	80 orang
3	Instalasi Penerangan	32 orang
4	Costume Made	96 orang
5	Teknisi Pendingin AC	32 orang
6	Pengolahan Hasil Pertanian	32 orang
7	Juru las GMAW 3G	48 orang

Sumber : LKPJ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan kegiatan melalui Dana APBN Dekonsentrasi adalah

1. Terbatasnya tenaga Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal setelah DIPA/POK diterima;
2. Terdapat revisi DIPA/POK sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan dilapangan;
3. Keterbatasan SDM Ahli dalam kegiatan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dukungan OPD Teknis masih kurang

Solusi untuk mengatasi semua permasalahan yang ada antara lain :

1. Menggunakan Jasa Tenaga Ahli dibidang infrastruktur pada OPD lain;
2. Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi antar stakeholder.

5.2.2.3. Dinas Ketahanan Pangan

Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan diterima dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan DIPA Nomor. SP.DIPA-018.11.3.109019/2018 tanggal 5 Desember 2017. Program yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Program yaitu

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan 4 (empat) jenis kegiatan yaitu :

- 1) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
- 2) Pengembangan ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
- 3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

Jumlah Anggaran yang diberikan sebesar Rp. 448.700.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 99,18% atau Rp. 484.700.000,- (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.5.5
Target dan Realisasi Belanja Dana Dekonstrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Pagu Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
081.11.14	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	488.700.000,-	484.700.000,-	99,18%	4.000.000,-
1814	PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI & STABILITAS HARGA PANGAN	83.000.000,-	83.000.000,-	100%	-
1	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	83.000.000,-	83.000.000,-	100%	-
1815	PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN	37.000.000,-	37.000.000,-	100%	-
2	Kawasan Mandiri Pangan	37.000.000,-	37.000.000,-	100%	-
1816	PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	350.700.000,-	350.700.000,-	100%	-
3	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	350.700.000,-	350.700.000,-	100%	-
1817	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN	18.000.000,-	14.000.000,-	77,8%	4.000.000,-
4	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	18.000.000,-	14.000.000,-	77,8%	4.000.000,-

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018

Tabel.5.6
Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dana Dekonstrasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018

NO	Program/ Nomor Kode	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tingkat Capaian/Target (RP)	Realisasi (RP)	% Pencapaian Target (%)
			Input	Output	Out Comes	satuan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	081.11.14. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								
	1814 PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI & STABILITAS HARGA PANGAN								
1		Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Dana	Jumlah Gapoktan yang diberdayakan	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat	Gapoktan	Dana : 83.000.000,- Hasil : 1 Gapoktan	Dana : 83.000.000 Hasil : 1 Gapoktan	100
	1815 PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN								
2		Kawasan Mandiri Pangan	Dana	Honor Koordinator Pendamping dan PPL/Pendamping Swakarsa	Pembinaan dan Monitoring	Pertemuan	Dana : 37.000.000,- Hasil : 3 Kali Pertemuan dan 1 Kawasan Mandiri Pangan	Dana : 37.000.000,- Hasil : 3 Kali Pertemuan dan 1 Kawasan Mandiri Pangan	100
	1816. PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KOMSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN								
3		Pemberdayaan Pekarangan Pangan	Dana	Honor Pendamping Kab. Dan Honor Pertemuan Kelompok	Jumlah KRPL	KRPL	Dana : 350.700.000,- Hasil : 6 Kawasan Rumah Pangan Lestari	Dana : 350.700.000,- Hasil : 6 Kawasan Rumah Pangan Lestari	100
	1817. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN KETAHANAN PANGAN								
4		Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Dana	Dukungan Manajemen dan Administrasi	Evaluasi, Monitoring, dan Evaluasi	Bulan	Dana : 18.000.000,- Hasil : 12 Bulan	Dana : 14.000.000,- Hasil : 12 Bulan	77,8

Sumber : LKPJ Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2018

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kegiatan melalui Dana APBN Dekonsentrasi adalah :

1. Terdapat kegiatan yang uraian dan rinciannya kurang jelas serta biaya yang ada pada POK tidak sesuai dengan kegiatan sehingga POK harus di revisi agar sesuai dengan program dan kegiatan yang ada;
2. Pada saat proses pencairan dana APBN, harus dilaksanakan di KPPN Jambi dalam hal melalui Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jambi hal tersebut memperlambat proses karena terkendala jarak dan waktu.

Solusi untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan kegiatan melalui dana Dekonsentrasi, antara lain :

1. Walaupun untuk saat ini dalam hal merevisi DIPA maupun POK bisa dilaksanakan di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Wilayah Jambi, akan tetapi pada saat merevisi POK

- untuk Tahun Anggaran 2018 cukup diketahui dan disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena tidak merubah anggaran pada kode akun;
2. Perlunya perencanaan yang lebih efektif dan efisien untuk menyusun anggaran pada tahun yang akan datang

5.3. BANTUAN/HIBAH

Bantuan Hibah bersumber dari dana APBN melalui satker yang berada di OPD di Provinsi dan dana APBD Provinsi Jambi juga diterima oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2018, diantaranya Bantuan Hibah yang diterima oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

5.3.1. Satuan Kerja Penerima

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan Bantuan/Hibah yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan;

5.3.2. Jenis Bantuan yang diterima

5.3.2.2. Dinas Perkebunan dan Peternakan

A. Bantuan/Hibah Menggunakan Dana APBN

Bantuan/hibah menggunakan dana APBN dimana Satker berada pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

a. Bantuan Sektor Perkebunan

Kegiatan Penyaluran bantuan saprodi peremajaan Kelapa Dalam

Tabel.5.7
Bantuan saprodi peremajaan Kelapa Dalam Sumber Dana APBN

No	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jenis Bantuan Yang Diterima					
			Bibit (Btg)	Pupuk NPK (Kg)	Herbisida (Ltr)	Hand Sprayer (Bh)	CIP SAW (Bh)	Uang Pembersihan Lahan
1	Sri Rezeki V	35	4.200	1.050	70	14	3	12.250.000
2	Setia Baru	35	4.200	1.050	70	14	3	12.250.000
3	Makmur Jaya	35	4.200	1.050	70	14	3	12.250.000
4	Hati Sabar	90	10.800	2.700	180	36	6	31.500.000
5	Sinar Wajo	44	5.280	1.320	88	18	3	15.400.000
6	Karya Utama	39	4.680	1.170	78	15	3	13.650.000
7	Sido Mukti	32	3.840	960	64	13	3	11.200.000
8	Maturrue	35	4.200	1.050	70	14	3	12.250.000
9	Maju Jaya	35	4.200	1.050	70	14	3	12.250.000
10	Pada Idi	50	6.000	1.500	50	20	4	17.500.000
	Jumlah	430	51.600	12.900	810	172	34	150.500.00

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

b. Bantuan Sektor Peternakan

1) Kegiatan Penyaluran bantuan Ternak Sapi

Tabel.5.8
Bantuan Ternak Sapi Sumber Dana APBN

No	Kelompok Tani	Lokasi	Jumlah Sapi Diterima	
			Jantan	Betina
1	Karya Tani	Desa Karya Bhakti, Kec. Rantau Rasau	9	24
2	Setia Maju	Desa Rantau Rasau I, Kec. Rantau Rasau	6	14
4	Kembali Jaya	Desa Rantau Rasau, Kec. Berbak	5	17
	Jumlah		20	55

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

2) Kegiatan Kesehatan Hewan

Tabel.5.9
Bantuan Vaksin Kesehatan Hewan Ternak Sumber Dana APBN

No	Vaksin	Jumlah (Dosis)
1	Vaksin Rabies	2.000
2	Vaksin Jembrana	350
	Jumlah	2.350

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

B. Bantuan/Hibah menggunakan dana APBD Provinsi Jambi

Bantuan/hibah menggunakan dana APBD I Provinsi Jambi yaitu melalui Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi diantaranya yaitu :

a. Bantuan Sektor Perkebunan

- 1) Kegiatan Penyaluran bantuan saprodi/uang pembersihan lahan untuk peremajaan Kelapa Dalam, Kopi, dan Kakao

Tabel.5.10
Bantuan saprodi/uang pembersihan lahan peremajaan Kelapa Dalam, kopi, dan kakao Sumber Dana APBD I

No	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Jenis Bantuan Yang Diterima						
			Bibit Kelapa (Btg)	Bibit Kopi (Btg)	Bibit Kakao (Btg)	Pupuk NPK (Kg)	Herbisida (Ltr)	Biaya Perbaikan Saluran Tersier	Biaya Pembersihan Lahan
1	Bambu Rumcing	5		3.750		500	15	4.000.000	
2	Sumber Rezeki	5		3.750		500	15	4.000.000	
3	Berkat Usaha	10		7.500		1.000	30	8.000.000	
4	Giat Usaha	10		7.500		1.000	30	8.000.000	
5	Harapan Kita	32			24.000	3.200	96	25.600.000	
6	Mario Tani	30	3.900			900	60		24.000.000
7	Empat Maju	30	3.900			900	60		24.000.000
	Jumlah	122	7.800	22.500	24.000	8.000	306	49.600.000	48.000.000

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

2) Kegiatan Penyaluran bantuan Sarana/alat pengolah Pinang

Tabel.5.11
Bantuan sarana/alat pengolah pinang Sumber Dana APBD I

No	Kelompok Tani	Lokasi	Jenis bantuan	Volume
1	Tunas Muda	Kel. Nipah Panjang II, Kec. Nipah Panjang	- Pisau pembela pinang - Terpal - Bak Palstik - Sabit	60 Buah 60 Buah 60 Buah 60 buah

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

b. Bantuan Sektor Peternakan

1) Penerimaan Nitrogen Cair (N2) dan Semen Beku

Tabel.5.12
Penerimaan nitrogen cair (N2) dan semen beku Sumber Dana APBD I

NO	BULAN	N2 (L)	DITERIMA									
			Straw (Dosis)									
			Angus	Bali	Brahman	FH	Limosin	Simental	Ongole	Kb boer	PE	Jumlah straw
1	Januari	560	-	200	-	-	-	-	-	100	-	300
2	Februari	275	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200
3	Maret	220	-	270	-	-	-	-	-	-	-	270
4	April	535	-	200	-	-	-	50	-	-	-	250
5	Mei	175	-	200	-	-	-	-	-	-	-	200
6	Juni											
7	Juli	805	-	400	-	-	200	100	-	-	-	700
8	Agustus	435	50	200	-	-	50	10	-	-	-	310
9	September	420	-	380	-	-	80	20	-	-	-	480
10	Oktober	660	-	400	-	10	15	30	10	-	-	465
11	November											
12	Desember	630	-	300	-	-	-	-	-	-	-	300
	Jumlah	4.715	50	2.750	-	10	345	210	10	100	-	3.475
	Keterangan											
01.00	APBD II	2.700	-	1.900	-	-	300	300	-	-	-	-
02.00	APBD I/ APBN	2.015	50	850	-	10	45	90	10	100	-	-

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

2) Kegiatan Bantuan Ternak Ayam

Tabel.5.13
Bantuan ternak Ayam Sumber Dana APBD I

No	Nama Kelompok Tani	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Ternak Awal		Jumlah Ternak Awal		Ket
				Jantan	Betina	Jantan	Betina	
1	KT. SUKA MAJU	Desa Kota Baru	Ayam Buras	40	360	40	360	BBGRM
2	KT. MEKAR JAYA	Desa Kota Baru	Ayam Buras	20	180	20	180	KTM
3	KT. TIM PENGGERAK PKK	Desa Pandan Lagan	Ayam Arab	96	104	96	104	Tim Penggerak PKK
4	KT. SUKA MAJU	Desa Sinar Kalimantan	Ayam Buras	20	180	15	174	TMMD
JUMLAH				176	824	171	818	

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

3) Kegiatan Kesehatan Hewan

Tabel.5.14
Bantuan vaksin kesehatan hewan ternak Sumber Dana APBD I

No	Vaksin	Jumlah (Dosis)
1	Vaksin SE	450
2	Vaksin Jembrana	500
	Jumlah	950

Sumber : LKPJ Dinas Perkebunan dan Peternakan Ka. Tanjung Jabung Timur 2018

5.4. BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

Untuk penugasan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Pemerintah Desa selama tahun anggaran 2018 dengan memberikan Bantuan Keuangan Desa yang dapat digunakan sebagai belanja pembangunan desa selain belanja rutin desa. Untuk lebih memacu pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah meningkatkan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel.5.15
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016-2018

Bantuan Desa	Tahun		
	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
ADD	34.871.849.000	67.161.153.510	69.666.584.907
DD	47.202.331.000	60.169.683.000	61.125.428.000
Total	82.074.180.000	127.330.836.510	130.792.012.907

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018

Terdapat peningkatan Bantuan Keuangan kepada Desa tahun 2016-2018, peningkatan yang cukup signifikan sebesar 99,78% pada Alokasi Dana Desa dan 29,5% pada Dana Desa, hal ini membuktikan perhatian yang serius dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam meningkatkan pembangunan di desa.

Anggaran untuk desa ini antara lain diperuntukan untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh 73 desa tahun 2018 antara lain :

1. Pembuatan ruang rapat di kantor desa
2. Perbaikan kantor desa
3. Pembangunan/rehab jerambah dan dermaga
4. Pembangunan dan pembuatan jalan setapak dan jalan tanggu
5. Pembuatan pagar dan gapura
6. Pembuatan gorong-gorong
7. Pembuatan sumur bor dan sumur biasa
8. Pembangunan kantor kepala desa
9. Pembangunan dan rehab jembatan
10. Pembangunan posyandu
11. Pembangunan los pasar
12. Pembangunan jalan jerambah beton
13. Pembangunan MCK
14. Pengadaan meubeliur kantor

Selengkapnya Anggaran Bantuan Keuangan Desa tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.16
Rekapitulasi Bantuan Keuangan Desa Tahun 2018

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD	PDRD	BAN. PROV	DD	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	MUARA SABAK TIMUR	ALANG-ALANG	961.293.417	23.770.444	60.000.000	1.034.845.000	2.079.908.861
2		LAMBUR	1.269.774.066	27.535.516	60.000.000	869.073.000	2.226.382.582
3		SIMBUR NAIK	1.028.671.769	45.445.754	60.000.000	722.918.000	1.857.035.523
4		LAMBUR I	922.249.581	24.717.556	60.000.000	738.149.000	1.745.116.137
5		LAMBUR II	1.172.645.049	33.744.356	60.000.000	883.716.000	2.150.105.405
6		KOTA RAJA	864.830.191	27.896.565	60.000.000	799.949.000	1.752.675.756
7		SIAU DALAM	902.425.176	26.569.387	60.000.000	774.287.000	1.763.281.563
8		SUNGAI UALAR	727.469.259	21.459.070	60.000.000	743.771.000	1.552.699.329
9		KOTA HARAPAN	839.447.153	22.201.730	60.000.000	736.851.000	1.658.499.883
10		KUALA SIMBUR	771.077.335	18.858.232	60.000.000	754.982.000	1.604.917.567
11	NIPAH PANJANG	SIMPANG JELITA	738.824.565	21.102.954	60.000.000	724.924.000	1.544.851.519
12		SIMPANG DATUK	883.461.058	25.559.353	60.000.000	811.689.000	1.780.709.411
13		TELUK KIJING	800.942.277	26.684.468	60.000.000	764.170.000	1.651.796.745

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD	PDRD	BAN. PROV	DD	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
14		SUNGAI RAYA	879.947.371	23.474.966	60.000.000	812.656.000	1.776.078.337
15		PEMUSIRAN	824.269.392	21.700.473	60.000.000	734.197.000	1.640.166.865
16		SUNGAI TERING	919.833.867	22.612.522	60.000.000	783.076.000	1.785.522.389
17		SUNGAI JERUK	895.789.529	19.830.584	60.000.000	810.013.000	1.785.633.113
18		BUNGA TANJUNG	813.056.450	21.842.589	60.000.000	727.234.000	1.622.133.039
19	MENDAHARA	PANGKAL DURI	1.211.981.907	25.413.691	60.000.000	1.093.498.000	2.390.893.598
20		MENDAHARA TENGAH	1.085.418.152	22.682.488	60.000.000	788.043.000	1.956.143.640
21		LAGAN ILIR	937.005.604	25.597.915	60.000.000	871.485.000	1.894.088.519
22		SINAR KALIMANTAN	796.544.145	29.988.209	60.000.000	738.100.000	1.624.632.354
23		SUNGAI TAWAR	1.073.714.622	21.521.072	60.000.000	866.318.000	2.021.553.694
24		BAKTI IDAMAN	963.170.027	21.676.170	60.000.000	751.724.000	1.796.570.197
25		MERBAU	1.079.614.099	29.029.521	60.000.000	843.309.000	2.011.952.620
26		PANGKAL DURI ILIR	999.216.949	20.913.765	60.000.000	869.035.000	1.949.165.714

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD	PDRD	BAN. PROV	DD	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
27	RANTAU RASAU	RANTAU RASAU I	943.427.684	24.711.116	60.000.000	758.362.000	1.786.500.800
28		RANTAU RASAU II	890.073.178	31.739.734	60.000.000	700.244.000	1.682.056.912
29		HARAPAN MAKMUR	936.156.132	29.095.690	60.000.000	745.681.000	1.770.932.822
30		BANGUN KARYA	873.220.055	26.264.828	60.000.000	751.332.000	1.710.816.883
31		RANTAU JAYA	928.167.917	28.912.649	60.000.000	735.423.000	1.752.503.566
32		SUNGAI DUSUN	661.625.842	22.032.988	60.000.000	704.626.000	1.448.284.830
33		KARYA BAKTI	959.134.434	24.946.819	60.000.000	846.965.000	1.891.046.253
34		MARGA MULYA	808.755.260	20.651.815	60.000.000	770.085.000	1.659.492.075
35		PEMATANG MAYAN	780.646.494	16.911.183	60.000.000	722.900.000	1.580.457.677
36		TRI MULYO	907.853.441	26.369.167	60.000.000	789.225.000	1.783.447.608
37	SADU	SUNGAI SAYANG	1.000.348.344	21.546.904	60.000.000	890.149.000	1.972.044.248
38		AIR HITAM LAUT	1.252.504.478	23.320.171	60.000.000	1.180.279.000	2.516.103.649
39		SUNGAI JAMBAT	1.360.311.241	25.287.959	60.000.000	1.248.222.000	2.693.821.200
40		SUNGAI ITIK	1.205.502.449	31.278.526	60.000.000	1.167.737.000	2.464.517.975
41		SUNGAI BENUH	739.023.837	16.723.070	60.000.000	727.504.000	1.543.250.907

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD	PDRD	BAN. PROV	DD	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
42		SUNGAI CEMARA	771.020.169	18.989.378	60.000.000	737.468.000	1.587.477.547
43		REMAU BAKU TUO	914.667.942	16.917.671	60.000.000	858.550.000	1.850.135.613
44		LABUHAN PERING	1.135.019.874	28.907.323	60.000.000	940.385.000	2.164.312.197
45	DENDANG	KUALA DENDANG	1.089.762.591	21.730.053	60.000.000	926.257.000	2.097.749.644
46		KOTO KANDIS DENDANG	790.164.863	21.998.220	60.000.000	797.243.000	1.669.406.083
47		KOTO KANDIS	1.547.700.781	33.051.011	60.000.000	1.301.138.000	2.941.889.792
48		SIDO MUKTI	1.027.457.786	32.339.986	60.000.000	810.601.000	1.930.398.772
49		CATUR RAHAYU	1.026.689.852	31.454.323	60.000.000	803.545.000	1.921.689.175
50		JATI MULYO	691.044.000	20.529.948	60.000.000	701.584.000	1.473.157.948
51	KUALA JAMBI	TELUK MAJELIS	1.140.051.304	21.218.209	60.000.000	954.773.000	2.176.042.513
52		KUALA LAGAN	806.929.054	21.721.873	60.000.000	777.596.000	1.666.246.927
53		MAJELIS HIDAYAH	814.249.064	18.529.893	60.000.000	717.132.000	1.609.910.957
54		MANUNGGAL MAKMUR	689.813.205	17.754.331	60.000.000	715.273.000	1.482.840.536

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD	PDRD	BAN. PROV	DD	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
55	MENDAHARA ULU	PEMATANG RAHIM	1.451.070.296	25.086.127	60.000.000	1.298.509.000	2.834.665.423
56		SUNGAI TOMAN	954.340.774	32.701.730	60.000.000	797.941.000	1.844.983.504
57		BUKIT TEMPURUNG	757.036.082	42.533.607	60.000.000	705.404.000	1.564.973.689
58		SINAR WAJO	1.097.456.136	23.918.388	60.000.000	1.107.756.000	2.289.130.524
59		SUNGAI BERAS	1.148.971.318	31.877.940	60.000.000	914.053.000	2.154.902.258
60		MENCOLOK	905.750.147	21.588.011	60.000.000	816.551.000	1.803.889.158
61	GERAGAI	LAGAN ULU	1.039.162.654	25.557.238	60.000.000	796.320.000	1.921.039.892
62		LAGAN TENGAH	971.236.962	29.728.550	60.000.000	779.880.000	1.840.845.512
63		PANDAN MAKMUR	879.691.739	22.594.839	60.000.000	745.907.000	1.708.193.578
64		PANDAN LAGAN	856.674.871	29.166.182	60.000.000	713.925.000	1.659.766.053
65		SUKA MAJU	886.573.789	24.667.770	60.000.000	726.518.000	1.697.759.559
66		KOTA BARU	815.451.115	22.916.306	60.000.000	717.463.000	1.615.830.421
67		RANTAU KARYA	703.554.697	24.192.708	60.000.000	696.760.000	1.484.507.405
68		PANDAN SEJAHTERA	829.184.896	21.582.268	60.000.000	709.501.000	1.620.268.164

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD	PDRD	BAN. PROV	DD	JUMLAH TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
69	BERBAK	RANTAU RASAU	1.200.344.632	23.404.284	60.000.000	1.100.407.000	2.384.155.916
70		RANTAU MAKMUR	1.271.101.313	27.754.606	60.000.000	1.175.728.000	2.534.583.919
71		SUNGAI RAMBUT	727.702.547	17.121.324	60.000.000	714.822.000	1.519.645.871
72		RAWA SARI	746.212.445	17.448.751	60.000.000	728.156.000	1.551.817.196
73		TELAGA LIMO	1.371.074.213	17.929.431	60.000.000	1.051.536.000	2.500.539.644
TOTAL			69.666.584.907	1.808.534.248	4.380.000.000	61.125.428.000	136.980.547.155

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2018

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018. Secara umum Bab ini terdiri dari kerjasama antar daerah, kerjasama dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dan keuangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada azas desentralisasi dan kewenangan otonom yang dimiliki, dimana secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada baik oleh badan, dinas, bagian maupun unit kerja lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara operasional, tugas umum pemerintahan daerah dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

6.1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Otonomi daerah yang digulirkan pemerintah dimaksudkan agar masing-masing daerah dapat leluasa dalam mengelola sumber daya yang ada dengan berbagai kewenangan yang telah diserahkan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah daerah dituntut untuk menciptakan berbagai terobosan guna memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar daerah memungkinkan suatu daerah untuk memaksimalkan berbagai potensinya, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia.

Globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan suatu daerah tidak dapat mengasingkan diri dan terlepas dari daerah yang lain. Suatu daerah dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi secara global baik perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun perkembangan di bidang-bidang yang lain. Guna

mengantisipasi hal tersebut dan mempertahankan eksistensinya, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu menjalin kerjasama dengan daerah-daerah lain maupun dengan pihak- pihak lainnya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan tersebut. Dengan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kerjasama antar daerah dimasa yang akan datang.

Beberapa kebijakan daerah telah ditetapkan sebagai upaya untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dalam rangka mewujudkan keserasian/sinergitas hubungan antar dan inter lembaga pemerintahan daerah, terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antar daerah, mantapnya koordinasi pemerintahan, terciptanya suasana yang kondusif, aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, terbangunnya sistem informasi dan komunikasi daerah yang mudah, aktual dan terpercaya.

Kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Daerah lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut .

Tabel.6.1
Kerjasama Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

NO	JENIS KERJASAMA	KERJASAMA DENGAN	TENTANG	KERANGKA LEGAL				KOORDINATOR & PELAKSANA	
				KESEPAKATAN BERSAMA		PERJANJIAN KERJASAMA			
				TANGGAL MULAI	TANGGAL BERAKHIR	TANGGAL MULAI	TANGGAL BERAKHIR		
1	KERJASAMA DAERAH	PEMKAB. BANYUASIN DENGAN PEMKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH PERBATASAN	18 Juli 2016	18 Juli 2021			TIM KKSD	
2	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	BAPPELITBANG KAB. BANYUASIN DENGAN BAPPEDA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	KERJASAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENATAAN RUANG DIWILAYAH PERBATASAN			18 Juli 2016	18 Juli 2021	BAPPEDA	
3	KERJASAMA DAERAH	PEMKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN PEMKOT. BANDUNG	KERJASAMA ANTAR DAERAH	6 Juli 2017	6 Juli 2018			DIKOMINFO	
4	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DISKOMINFO KOTA BANDUNG DENGAN DISKOMINFO KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SMART CITY KOTA BANDUNG DI KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR			10 Juli 2017	10 Juli 2020	DIKOMINFO	
5	KERJASAMA DAERAH	PEMKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN PEMKAB. LINGGA	KERJASAMA ANTAR DAERAH	20 Okt 2017	20 Okt 2018			TIM KKSD	
6	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS PERINDAG KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN PERDAGANGAN KAB. LINGGA	KERJASAMA PERDAGANGAN			20-Nov-17	20-Nov-22	DISPERINDAG	
7	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS PARBUDPORA KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN DINAS PARPORA KAB. LINGGA	KERJASAMA PENGELOLAAN KAWASAN DESTINASI PARIWISATA PULAU BERHALA DAN SEKITARNYA			20-Nov-17	20-Nov-22	DISPARBUDPORA	
8	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS TPH, DINAS KETAHANAN PANGAN, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KAB. LINGGA	KERJASAMA BIDANG PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN			20-Nov-17	20-Nov-22	DINAS LINGKUP PERTANIAN	

9	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS PERIKANAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA	KERJASAMA PENGELOLAAN INDUSTRI PENGALENGAN IKAN, TEPUNG IKAN DAN MINYAK IKAN			20-Nov-17	20-Nov-22	DINAS PERIKANAN
10	KERJASAMA DAERAH	PEMKOT. JAMBI DENGAN PEMKAB/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI JAMBI	PELAYANAN TERA, TERA ULANG, ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPAN (UTTP) DAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL	20-Nov-17	20-Nov-18			DIFASILITASI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
11	KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA	PEMKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA	KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	22-Feb-18	22-Feb-19			TIM KKSD
12	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS KOMINFO KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SURAT ELEKTRONIK PEMKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR			3 Mei 2018	3 Mei 2022	DISKOMINFO
13	KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA	PEMKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN YAYASAN BHAKTI TANOTO FOUNDATION	PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	5 Mei 2018	5 Mei 2020			DINAS PENDIDIKAN
14	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS PUTR KAB. BANYUASIN DENGAN DINAS PUPR KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN PENGHUBUNG DI WILAYAH PERBATASAN			2018	2021	DINAS PUPR
15	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS PERKIMTAM KAB. BANYUASIN DENGAN DINAS PERKIM KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN AIR BERSIH DI WILAYAH PERBATASAN			2018	2021	DINAS PERKIM
16	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS PENDIDIKAN,PORAPAR KAB. BANYUASIN DENGAN DINAS PENDIDIKAN KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	PENYELENGGARAAN PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN			2018	2021	DINAS PENDIDIKAN
17	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS KOMINFO KAB. BANYUASIN DENGAN DINAS KOMINFO KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARAN TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH PERBATASAN			2018	2021	DINAS KOMINFO

18	KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	DINAS KOMINFO KAB. BANYUASIN DENGAN DINAS KOMINFO KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH PERBATASAN			2018	2021	DINAS KESEHATAN
19	KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA	PEMKAB. TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO INDONESIA	PENGEMBANGAN AGROBISNIS KOMODITAS KOPI DAN KAKAO DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	2018	2021			TIM KKSD

6.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga juga merupakan salah satu upaya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga sama dengan prinsip yang dianut dalam kerjasama antar daerah, yaitu : efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama daerah, menyatakan bahwa kerjasama daerah adalah kesepakatan antar gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban. Peraturan pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa pihak ketiga adalah departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan hukum milik daerah, seperti yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Adapun kerjasama dilaksanakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara lain :

1. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Universitas Jambi

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Universitas Jambi juga dilakukan dalam penyusunan dokumen-dokumen penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang membutuhkan tenaga akademis sebagai narasumber.

2. Kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI

Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian pertanggungjawaban pada aspek manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 050/968/DATA/BAPPEDA dan Nomor PRJ-5118/PW05/2007.

3. Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur membangun jaringan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan RI (BPK-RI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor 188/NK/X-XIII.2/11/2012 dan Nomor 180/04/HKM/2012.

4. Kerjasama dengan Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Jambi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel maka sejak tahun ini telah diterapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah secara online dalam rangka mempersiapkan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. Pada tanggal 24 September 2014, telah pula ditandatanganin Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) mengenai Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah antara Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Nomor NK-6/WBP.06/2014 dan Nomor 900/2474/DPKAD/2014.

5. Kerjasama dengan Perusahaan Migas Petrochina Jabung Ltd.

Dalam rangka mewujudkan kewajiban perusahaan berupa *Cooporate Social Responsibility* (CSR), ada beberapa program dari Petrochina Jabung Ltd. tahun fiskal 2017, antara lain : UMKM, Pelatihan Keuangan Desa, Optimalisasi Water Filtration (Pelatihan untuk Pengurus BUMDES), Sumur Bor untuk Ponpes Gontor, Pembangunan PAUD Gemilang di Kelurahan Pandan Jaya Kec. Geragai, Pelatihan dan Peralatan Membatik, Pelatihan Pengolahan Buah Nenas, Pengadaan Pelatihan Montir Roda Empat, Pengadaan Peralatan Salon, Pengadaan Peralatan Pelatihan Komputer, Pengadaan Paket Perlengkapan Sekolah.

6. Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Kerjasama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam hal pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi (*e-government*) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui MoU No.050/393/Eko/Bappeda, dan No.HK.840/DES-U01/2008 pada tanggal 21 Oktober 2008. Sampai dengan tahun 2017 ini pengembangan sistem informasi berdasarkan teknologi informasi (*e-government*) sudah dapat diimplementasikan secara bertahap ditengah keterbatasan sarana prasarana termasuk kapasitas bandwith yang tersedia dan jaringan pembangunan

jaringan Optik. Selain itu pada Tahun 2018 juga dilanjutkan kerjasama dalam Penyediaan Jaringan Internet yaitu Astinet dan Wifi ID.

7. Kerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi

Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah daerah berkerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada bulan Maret lalu, yang tertuang dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor Pemda:973/845/131/DPKAD/2014 dan Nomor Bank Jambi:33.12/PKS.DIR/2012. Kerjasama ini diadakan untuk penerimaan pembayaran serta penatakelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. Kerjasama Dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Kerjasama Dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Layanan Informasi Kualitas Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan nomor : KS.302/023/KB/IX/2015 dan nomor : 181/7/HKM/2015.

Adapun inti dari perjanjian kerjasama tersebut adalah kesepakatan tentang Pemanfaatan Lahan untuk Layanan Informasi Kualitas Udara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan menggunakan Peralatan Pemantau Kualitas Udara Partikulat PM 2,5. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 30 September 2015.

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemanfaatan lahan, listrik dan jaringan komunikasi milik Pihak Kedua yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang digunakan untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan milik BMKG Pusat tepatnya di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan, sedangkan Pihak Kesatu menyiapkan peralatan pemantauan kualitas udara partikulat PM 2,5, komputer PC, UPS 650VA, UPS 4000VA, panel outdoor, dan shelter empat persegi. Para pihak secara bersama-sama berkewajiban menjaga kesinambungan operasional peralatan Kualitas Udara partikulat PM 2,5 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

9. Kerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Kerjasama Pembangunan Taman Teknologi Pertanian yang berlokasi di kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) desa Kota Baru Kecamatan Geragai.

10. Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jambi untuk kegiatan Diklat Pim III dan IV dengan realisasi kegiatan sebanyak 54 orang dan kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme dengan realisasi kegiatan sebanyak 13 orang;

11. Kerjasama dengan pemerintah Kota Malang Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan Diklat Pim III dan IV dengan realisasi kegiatan sebanyak 54 orang;
12. Kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk kegiatan Diklat Pim II dengan realisasi kegiatan sebanyak 4 orang;
13. Kerjasama dengan PT Taspen untuk kegiatan Pembekalan Persiapan Masa Pensiun dengan realisasi kegiatan sebanyak 100 orang;
14. Kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri untuk kegiatan Diklat Kompetensi Camat dengan realisasi kegiatan sebanyak 6 orang;
15. Kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara UPT Jambi untuk kegiatan seleksi penerimaan CPNS dengan realisasi kegiatan sebanyak 115 orang;
16. Kerjasama dengan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk kegiatan Pemetaan Jabatan, Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dengan realisasi kegiatan sebanyak 27 orang;
17. Kerjasama dengan PT Wahana Amanah R yan thro selaku Assesor Independen untuk kegiatan Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama sebanyak 27 orang;
18. Koordinasi dengan Imigrasi Kuala Tungkal dalam kegiatan memperoleh data dan informasi tentang kegiatan dan keberadaan orang asing, LSM asing dan Tenaga Kerja asing.
19. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Koordinasi tentang kebakaran lahan dan kebun yang berada Kab. Tanjung Jabung Timur.
20. Koordinasi dengan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak (BPTUHMT) Padang Mangatas, melalui kegiatan ini terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka mengembangkan Balai Pembibitan Ternak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
21. Balai Veteriner Bukit Tinggi pengiriman sampel di Laboratorium untuk pemeriksaan spesimen terhadap penyakit hewan dan ternak serta uji coba kandungan

6.3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAERAH

Koordinasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2018 adalah koordinasi institusional. Kegiatan koordinasi yang dilakukan mampu secara efektif mengkomunikasikan berbagai informasi dan masukan yang diperlukan oleh segenap penyelenggara pemerintahan, sehingga proses pelaksanaan tugas dan fungsi segenap aparatur penyelenggara negara dapat berjalan optimal melalui pengaturan bersama dan kesepakatan bersama.

Beberapa koordinasi utama yang dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Koordinasi dengan unsur Forkompimda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - a. Polres Tanjung Jabung Timur, diantaranya : Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Penanganan Konflik Sosial, Pemantauan dan Pengawasan orang asing, Pemantauan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Penyuluhan terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Kodim 0419 Tanjung Jabung, diantaranya : Penyusunan dan pengumpulan data informasi tentang intelijen daerah, Pengawalan pencapaian produksi tanaman pangan melalui kegiatan Upsus PAJALE.
 - c. Kejaksaan Begeri Muara Sabak, diantaranya : Penanganan Konflik sosial, Demonstrasi, Penganut Aliran Kepercayaan
3. Koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum.
4. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam kegiatan meningkatkan Kerukunan intra dan antar umat beragama, penerbitan rekomendasi pendirian rumah ibadah, data rumah ibadah, lembaga keagamaan, pengaruh aliran kepercayaan dan konflik SARA.
5. Koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kegiatan tahapan dan pelaksanaan pemilihan umum legislatif, Presiden dan Wakil Presiden;
6. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk kegiatan Pembebasan lahan situs purbakala yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Koordinasi dengan BKSDA Kementerian LHK dalam peningkatan objek wisata yang berwawasan lingkungan dan objek wosata hitam mangrove (bajau) yang berada di Taman Nasional Berbak (TNB);
8. Koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, koordinasi ini dimaksudkan untuk penyusunan dan pengumpulan data statistik sektor Perkebunan, Peternakan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
9. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), koordinasi ini dimaksudkan untuk pemanfaatan/perluasan tata ruang lahan perkebunan dan perizinan.
10. Koordinasi dengan perangkat pusat di daerah dan instansi vertikal lainnya seperti BPS Kabupaten, BMKG, Balai Taman Nasional Berbak dan BPN Kabupaten.

Pelaksanaan koordinasi yang bersifat utama dan strategis dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur bersama-sama dengan unsur Forkompimda Kabupaten

Tanjung Jabung Timur serta perangkat daerah yang terkait. Bersama dengan para pimpinan wilayah, Bupati Tanjung Jabung Timur melakukan rapat-rapat atau menyelenggarakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), sedangkan dengan perangkat daerah dilakukan dalam bentuk rapat-rapat koordinasi yang sifatnya koordinasi teknis. Rapat atau forum koordinasi dimaksudkan dalam rangka konsultasi dan koordinasi untuk mewujudkan dan memelihara stabilitas juga situasi serta kondisi daerah yang kondusif.

Rapat Forkompimda yang dilakukan memiliki beberapa tujuan antara lain :

1. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara berdaya guna dan berhasil guna.
2. Mengevaluasi dan melakukan penilaian atas intensitas, ekstensitas, situasi dan kondisi ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta merumuskan langkah-langkah strategis, teknis dan taktis yang diperlukan dalam rangka pengendalian, pencegahan maupun penanggulangan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Menentukan sistem, prosedur dan mekanisme operasional pengamanan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan kota guna mewujudkan stabilitas nasional dan daerah yang mantap dan terkendali serta kondusif.

Selain koordinasi ke samping (horizontal) dan ke bawah, tugas umum pemerintahan yang bersifat koordinatif juga diselenggarakan secara vertikal, baik kepada instansi vertikal di tingkat provinsi maupun dengan berbagai kementerian teknis terkait.

Di sektor Pertanian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Koordinasi dengan TNI AD dalam rangka pengawalan pencapaian peningkatan produksi Tanaman Pangan kegiatan UPSUS PAJALE, selanjutnya koordinasi dengan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi dan Kementerian Pertanian dalam rangka percepatan pembangunan pertanian. Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Sungai Sumatera VIII, DINAS Pekerjaan Umum tetang penentuan lokasi dan kedalaman pembangunan irigasi. Dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan mempertahankan Lahan Pertanian Berkelanjutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya memperkuat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/kota sebagai lembaga

koordinasi fungsional dalam menyusun rekomendasi kebijakan pangan dan gizi kabupaten/kota.

Disektor peternakan dan perkebunan, koordinasi dilakukan dengan : 1) Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Makanan Ternak (BPTUHMT) Padang Mangatas dengan tujuan untuk menghimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka mengembangkan Balai Pembibitan Ternak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 2) Balai Veteriner Bukit Tinggi dalam rangka pengiriman sampel di Laboratorium untuk pemeriksaan specimen terhadap penyakit hewan dan ternak serta uji coba kandungan; 3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pengendalian dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Disektor Perencanaan melaksanakan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi kebutuhan Dokumen Perencanaan melalui kegiatan Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Dokumen Tinjauan Ekonomi Makro Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penyusunan Dokumen Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indeks Ekonomi dan Penyusunan Publikasi Susenas.

Di sektor Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan kerjasama dengan BASARNAS Provinsi Jambi dalam rangka pelatihan penanggulangan bencana.

Di sektor penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan kerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan program MP3KI dengan tujuan akselerasi pengurangan kemiskinan dan program MP3EI dengan tujuan akselerasi pertumbuhan dengan pemerataan (*Growth with Equity*).

Di sektor Kabudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahaga, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan koordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional dengan kegiatan Pembebasan Lahan Situs Purbakala yang ada dikabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya juga melakukan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kementerian Kehutanan dalam peningkatan Objek wisata yang berwawasan lingkungan dan objek wisata hutan mangrove (bakau) yang berada ditaman berbak. Selain itu juga mengadakan kerjasama dengan Lembaga Lingkungan Hidup dalam kegiatan berupa penanaman penghijauan hutan mangrove yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di sektor Penelitian dan Pengembangan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi dengan tujuan terhimpun berbagai informasi dan masukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Sektor Infrastruktur, dilaksanakan kerjasama dengan : 1) Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi prosedur kerja dalam pembebasan lahan; 2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dalam rangka Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 3) Balai Pelaksanaan Pembangunan Jalan Nasional (P2JN) Jambi terkait Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; 4) Balai Sungai Sumatera VIII, Kementerian Pekerjaan Umum dalam Perencanaan dan Penentuan Lokasi Pengairan, irigasi dan tanggul; 5) BKSDA Kementerian Kehutanan dalam penentuan trace jalan yang berdekatan dengan Taman Nasional Berbak.

Di sektor keamanan dan Ketertiban dilaksanakan kerjasama dengan : 1) Polres Tanjung Jabung Timur, Kemenkumhan dan BNNK dalam rangka mensinergikan penegakan hukum daerah dan pengendalian keamanan dan ketertiban dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain operasi terhadap penyalahgunaan obat dikalangan pelajar, pengamanan HUT Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pemantauan wilayah secara intelijen; 2) Polres Tanjung Jabung Timur, Kejaksaan Negeri Muara Sabak, Imigrasi Kuala Tungkal dan Kementerian Agama dalam rangka Penyusunan dan pengumpulan data informasi tentang intelijen daerah, cegah dini dan deteksi dini terhadap terorisme khususnya ISIS, Pemantauan dan pengawasan orang asing, Penanganan konflik sosial dan demo yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penerbitan rekomendasi pendirian rumah ibadah, data rumah ibadah, konflik SARA, Peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan melalui razia gabungan; 3) Kodim 0419 Tanjung Jabung Timur dalam rangka peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa bagi pelajar serta generasi muda; 4) KPUD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka Tahapan pelaksanaan Pemilu; 5) Polairud, KSOP Muara Sabak, Mendahara dan Nipah Panjang dalam rangka razia kapal ukuran GT 07 kebawah

6.4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki ancaman bencana berupa: bencana banjir, kebakaran, gelombang pasang, Abrasi, Hujan Lebat disertai Angin Kencang dan bencana angin badai puting beliung, disamping pengaruh potensi bencana kabupaten lain di provinsi Jambi berupa gempa bumi, pada tahun 2018 mengalami tiga jenis bencana alam di kabupaten ini.

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2018 lebih banyak diakibatkan karena kelalaian dari manusia dari pada faktor alam. Berikut kejadian/bencana yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2017 dan 2018.

Tabel.6.2.
Kejadian Bencana Kab. Tanjung Jabung Timur tahun 2017 dan 2018

No	Jenis Bencana	TAHUN							
		2017				2018			
		No.	Tanggal	Tempat	Keterangan	No.	Tanggal	Tempat	Keterangan
1.	Kebakaran Pemukiman	1.	15 November 2017	Ds. Simbur Naik, Kec. Ma. Sabak Timur	75 kk/261 jiwa	1.	23 Oktober 2018	Ke. Muara Sabak Ilir, Kec. Muara Sabak Timur	2 kk/12 jiwa
		2.	12 Maret 2017	Ds. Lagan Tengah, Kec. Geragai	1 kk/6 jiwa	2.	24 April 2018	Kelurahan Rantau Indah, Kec. Dendang	1 kk/6 jiwa
		3.	20 Juli 2017	Ds. Bakti laman, Kec. Mendahara	5 kk/17 jiwa	3.	1 April 2018	Desa Lagan Ulu, Kec. Dendang	6 kk/19 jiwa
		4.	27 Juli 2017	Ds. Sungai Toman, Kec. Mendahara Ulu	1 kk/4 jiwa	4.	18 Februari 2018	Desa Pangkal Duri, Kec. Mendahara	1 kk/3 jiwa
		5.	22 Agustus 2017	Ds. Rantau Rasau II, Kec. Rantau Rasau	1 kk/4 jiwa	5.	29 September 2018	Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara	1 kk/5 jiwa
		6.	04 September 2017	Ds. Rantau Makmur, Kec. Rantau Rasau	1 kk/3 jiwa	6.	19 Agustus 2018	Desa Bukit Tempurung, Kec. Mendahara Ulu	1 kk/2 jiwa
		7.	03 Agustus 2017	Ds. Bangun Karya, Kec. Rantau Rasau	2 kk/7 jiwa	7.	15 November 2018	Desa Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	1 kk/3 jiwa
		8.	14 Juli 2017	Ds. Telaga Lima, Kec. Berbak	1 kk/5 jiwa	8.	08 April 2018	Desa Tri Mulya kec. Rantau Rasau	1 kk/4 jiwa
		9.	22 Oktober 2017	Ds. Rantau Rasau, Kec. Berbak	1 kk/2 jiwa	9.	21 Juli 2018	Desa Sungai Cemara, Kec. Sadu	1 kk/5 jiwa
		10.	12 Februari 2017	Kel. Nipah panjang, Kec. Nipah Panjang	1 kk/2 jiwa				
		11.	17 Mei 2017	Kel. Nipah Panjang II, Kec. Nipah Panjang	9 kk/75 jiwa				
		12.	09 November 2017	Kel. Nipah Panjang II, Kec. Nipah Panjang	1 kk/3 jiwa				
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	1.	31 Juli 2017	Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat	0,5 Ha	1.	14 Agustus 2018	Kel. Muara Sabak Ulu, Kec. Muara Sabak Timur	0,25 ha
		2.	06 Agustus 2017	Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat	1 Ha	2.	22 Februari 2018	Kel. Kampung Singkep, Kec. Muara Sabak Barat	2 Ha
		3.	01 Agustus 2017	Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi	0,5 Ha	3.	03 Juli 2018	Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat	0,0030 Ha
		4.	03 Agustus 2017	Ds. Lagan Ulu, Kec.	7 Ha	4.	18 Juli 2018	Kel. Rano, Kec. Muara	0,0871 Ha

		Geragai				Sabak Barat	
5.	30 Juli 2017	Ds. Sinar Wajok, Kec. Mendahara Ulu	1 Ha	5.	25 Juli 2018	Kel. Parit Culum II, Kec. Muara Sabak Barat	0,4149 Ha
6.	02 Agustus 2017	Ds. Mencolok, Kec. Mendahara Ulu	5 Ha	6.	26 Juli 2018	Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0,1306 Ha
7.	04 Agustus 2017	Ds. Pematang Mayan, Kec. Rantau Rasau	5 Ha	7.	06 Agustus 2018	Kel. Rano, Kec. Muara Sabak Barat	0,1382 Ha
8.	27 Juli 2017	Ds. Rantau Makmur, Kec. Berbak	2 Ha	8.	17 Agustus 2018	Kel. Teluk Dawan, Kec. Muara Sabak Barat	0,2195 Ha
9.	04 Agustus 2017	Ds. Rantau Makmur, Kec. Berbak	5 Ha	9.	22 Agustus 2018	Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat	3,0000 Ha
10.	02 Agustus 2017	Ds. Sungai Sayang, Kec. Sadu	10 Ha	10.	18 Januari 2018	Desa Catur Rahayu Kec. Dendang	1,2492 Ha
11.	05 Agustus 2017	Ds. Air Hitam Laut, Kec. Sadu	1 Ha	11.	17 Juli 2018	Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang	1,6693 Ha
12.	03 September 2017	Ds. Remau Baku Tuo, Kec. Sadu	4 Ha	12.	28 September 2018	Desa Catur Rahayu, Kec. Dendang	1,000 ha
13.	04 September 2017	Ds. Air Hitam Laut, Kec. Sadu	4 Ha	13.	25 juli 2018	Desa Lagan Ulu, Kec. Geragai	0,1863 Ha
				14.	04 Agustus 2018	Desa Suka Maju, Kec. Geragai	1,000 ha
				15.	12 JULI 2018	Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	1,500 Ha
				16.	14 Agustus 2018	Desa Sinar Wajo, Kec . Mendahara Ulu	1,5020 Ha
				17.	18 Agustus 2018	Ds. Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu	15,000 Ha
				18.	19 Agustus 2018	Ds. Simpang Tuan, Kec. Mendahara Ulu	4,000 Ha
				19.	16 Februari 2018	Ds. Rantau Rasau II, Kec. Rantau Rasau	0,500 Ha
				20.	21 Juli 2018	Kel. Nipah Panjang I, Kec. Nipah Panjang	0,2500 Ha
				21.	14 Agustus 2018	Ds. Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang	
				22.	14 Februari 2018	Ds. Sungai Sayang, Kec. Sadu	6,000 Ha
				23.	23 Juli 2018	Ds. Sungai Sayang, Kec. Sadu	10,000 Ha
				24.	29 Juli 2018	Ds. Remau Baku Tuo, Kec. Sadu	2,6195 Ha

						25.	13 Agustus 2018	Ds. Labuan Pering, Kec. Sadu	1,7108 Ha
						26.	20 Agustus 2018	Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu	5,000 Ha
3.	Abrasi	1.	11 November 2017	Ds. Simbur Naik, Kec. Muara Sabak Timur	5 kk/15 Jiwa	1.	10 Agustus 2018	Desa Sungai Tawar, Kec. Mendahara	2 kk/8 jiwa
4.	Putting Beliung	1.	04 Januari 2018	Kel. Mendahara ilir, Kec. Mendahara	4 kk/12 Jiwa	1.	18 November 2018	Kel. Nipah Panjang	2 kk/5 jiwa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur, 2018

2. Status Bencana

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 semuanya berskala lokal seperti kebakaran (Rumah maupun Lahan), angin puting beliung, Hujan Lebat yang disertai angin kencang dan abrasi.

3. Pembiayaan dan Anggaran

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tahun 2018, baik bencana kebakaran (Rumah maupun Lahan), angin puting beliung, Hujan Lebat yang disertai angin kencang dan abrasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada DPA OPD teknis terkait dan pos pembiayaan dana tidak terduga pada PPKD.

4. Antisipasi Daerah

Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dilakukan dengan metode-metode preventif, seperti peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan terjadinya bencana, penyuluhan hukum tentang pentingnya memenuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan ruang dan pemukiman, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan lain-lain.

Dari Letak kondisi geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah terbentuknya Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD), maka dilakukan langkah penyusunan program dan kegiatan mengarah kepada Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bersifat :

- 1) Pengurangan resiko bencana menjadi salah satu acuan penting perencanaan pembangunan;
- 2) Upaya yang terintegrasi dalam pra, saat dan pasca bencana antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 3) Merubah pendekatan responsive menjadi pendekatan preventif untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana.

Dengan demikian terjadi perubahan paradigm penanggulangn bencana dari responsive kepada pendekatan preventif yang membuat penanggulangan bencana bias diupayakan/direncanakan, tidak gobyakan setelah terjadi bencana baru bertindak, Karena hal demikianlah penanggulangan bencana berjalan komprehensif,

simultan dan handal karena banyak aspek yang bersinggungan langsung dengan bencana.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka peluang yang bias dimanfaatkan untuk menciptakan program penanggulangan bencana yang handal sebagai berikut :

- 1) Program pencegahan dini bersifat lintas Perangkat Daerah dimana semua Perangkat Daerah diharapkan bisa melaksanakan program tersebut sesuai amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Program tanggap darurat meliputi kedaruratan dan manajemen logistik;
- 3) Program rehabilitasi dan konstruksi berupa fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan pelaksanaan yang lebih baik sekaligus dalam upaya melakukan mitigasi bencana.

5. Satuan Kerja yang Menangani Bencana

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan fungsi Perangkat Daerah yang menangani bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun disamping itu terdapat dinas instansi yang juga terlibat atau mempunyai tugas dan fungsi dalam penanganan bencana antara lain :

- a. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- d. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- e. Dinas Pekerjaan Umum, dan
- f. Dinas Kesehatan

6. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk untuk Menangani Bencana

Bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu baik kehidupan dan penghidupan masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan dan hasilnya sehingga upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan dengan tindakan yang terencana, terkoordinasi, terpadu, tepat dan cepat. Untuk itu diperlukan upaya nyata dalam rangka penanggulangannya dengan mengerahkan sumber daya yang ada dan dalam pelaksanaannya diperlukan satu wadah/lembaga tetap yang mengkoordinir seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah telah memberikan juklak dan juknis dalam penanganannya secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP), sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dikoordinasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk pertengahan tahun 2015.

6.5. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan terhadap aparat trantib guna mewujudkan hubungan koordinasi yang baik serta meningkatnya kemampuan dan kesiapan aparat dalam penanganan berbagai permasalahan hukum dan trantib, pengamanan aset-aset daerah serta penegakan Peraturan Daerah.

1. Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa.

Wujud pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam pelaksanaan siskamswakarsa antara penyelenggaraan FMD (fisik, mental, dan disiplin), bela diri dan pelatihan korsik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Output dari kegiatan ini diharapkan anggota tidak hanya memiliki fisik yang kuat tetapi juga memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan mental baik.

2. Kegiatan penertiban Peraturan Daerah dan kebijakan Kepala Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Sasaran dari kegiatan diprioritaskan kepada penertiban kepada Peraturan Daerah yang berhubungan dengan ketertiban umum dan aset-aset daerah.

BAB VII

PENUTUP

Bab ini memuat kata akhir dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2018

Kembali ditegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2018 ini merupakan perwujudan dan tekad dari setiap Kepala Daerah untuk menuju pada kepemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 merupakan produk manajemen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun demikian, sebagai sesuatu yang bersifat dinamis dan terus berkembang, LKPJ ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan-masukan positif sangat diperlukan bagi penyempurnaan pelaksanaan manajemen pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Akhirnya, kami beserta segenap aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengharapkan agar LKPJ Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Terima kasih

Muara Sabak, Maret 2019

Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO,SE



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang
Kelurahan Rano, Muara Sabak Barat
Jambi, Indonesia

Telp. (0740) 7370006 Fax. (0740) 7370006
Website : www.tanjabtimkab.go.id